BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KALTENG BERKAH
KALTENG MAJU

KALTENG TANGGUH 2045

INDONESIA EMAS 2045

RENCANA STRATEGIS 2025 2029



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Brigjen Katamso No.11, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111

dp3appkb.kalteng.go.id
uptppa.kalteng.go.id

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kalteng

@dp3appkbprovkalteng

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dearah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Dearah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria;

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Operasionalisasi Prosedur Konsolidasi Tanah;
33. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, meliputi:
    1) Inspektorat Daerah;
    2) Dinas Pendidikan;
    3) Dinas Kesehatan;
    4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    6) Dinas Sosial;
    7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    8) Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    9) Dinas Ketahanan Pangan;
    10) Dinas Lingkungan Hidup;
    11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
    12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13) Dinas Perhubungan;
14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
20) Dinas Kelautan dan Perikanan;
21) Dinas Perkebunan;
22) Dinas Kehutanan;
23) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
26) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
27) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
28) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
29) Badan Pendapatan Daerah;
30) Badan Kepegawaian Daerah;
31) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32) Badan Penanggulangan Bencana;
33) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
34) Badan Penghubung;
35) Sekretariat DPRD; dan
36) Sekretariat Daerah;

Pasal 2

(1) Renstra disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
d. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
e. Penutup.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;

(2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan;

(3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Provinsi menggunakan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat kami selesaikan pada waktunya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan dalam urusan :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa RPJMD maupun pada tingkat pusat. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penutup, dan lampiran.

Sebagaimana amanat yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dilaksanakan guna mendukung Visi : “Mengangkat/Terangkatnya/Kebangkitan/Bangkitnya Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Manggatang Utus)/Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah/Kalteng Maju/Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045” Pada Misi Kedua yaitu “Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat”, Misi Keempat yaitu “Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial” dan Misi Kelima yaitu “Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pembeirdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2025-2029.

Palangka Raya, 22 September 2025

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19680717 199003 2 006

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Gambar		iv
Daftar Tabel		vi
BAB I	**PENDAHULUAN .....**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	10
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....**	13
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah……	13
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ……..	25
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……..	41
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ……..	54
	2.5 Rekomendasi Rangkaian Kerja Pembangunan 2025-2029……..	61
	2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah……	62
	2.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih……	65
	2.8. Telaah Renstra K/L.....	72
	2.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.....	78
	2.10. Penentuan Isu-isu strategis.....	78
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN .....**	79
BAB IV	**PROGRAM,, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....**	87
BAB V	**PENUTUP.....**	120

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian …….	26
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan ……...	26
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan	26
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional ……...	27
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan ……..	27
Tabel 2.6	Daftar Inventaris Dinas P3APPKB Tahun 2025 ……..	29
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ……	42
Tabel 2.8	Pembanding antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2021-2024	45
Tabel 2.9	Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024 ……..	52
Tabel 2.10	Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 …….	60
Tabel 2.11	Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Peningkatan Kualitas Keluarga ……	60
Tabel 2.12	Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Ketimpangan Gender ……	61
Tabel 2.13	Arahan Indikator Utama Pembangunan dalam Periode I RPJPD (2025-2029) Provinsi Kalimantan Tengah …….	61
Tabel 2.14	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ……...	63
Tabel 2.15	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……..	68
Tabel 2.16	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA ……	73
Tabel 2.17	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN ……..	77
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ……	81
Tabel 3.2	Tahapan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ……..	84
Tabel 3.3	Arah Kebijkan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah……	84

Tabel 4.1 Rumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ……... 89

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030 …… 99

Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ……..… 115

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah …. 116

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ….. 117

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Struktur organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah …….	15
Gambar 2.2	Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah …...	47
Gamber 2.3	Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin ……...	47
Gambar 2.4	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022 …….	58
Gambar 2.5	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019- 2022 ……	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Mengingat tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Dua urusan yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/40/2025 Tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1)

Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan. Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Walaupun masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Untuk itu, dalam indikator pembangunan manusia, lndeks Pembangunan Gender (IPG) dan lndeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator capaian yang harus diutamakan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam mendorong tercapainya keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian adanya PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun anggaran pembangunan yang responsif gender. Kondisi ini bermula karena adanya ketidakadilan yang terjadi secara global. Perempuan banyak yang tertinggal, hal ini dapat menghambat pembangunan. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang sistematis.

Kaum perempuan diharapkan untuk ikut menentukan arah kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga meliputi masalah perempuan. Pada tataran kehidupan sosial dan politik, masyarakat Indonesia secara umum, termasuk juga masyarakat Kalimantan Tengah, telah dan senantiasa memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin.

Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk dengan penetapan kuota 30 persen perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung.

Masyarakat juga dapat menilai bahwa para perempuan tersebut memang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni dan layak untuk menempati

kedudukan sebagai legislator. Pada Pemilu tahun 2024, ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap dengan sistem *zipper* (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat semakin mengangkat harkat dan martabatnya, serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi dan eksistensi yang sejajar dengan laki-laki. Legislator perempuan di kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan pengarusutamaan gender.

Bersumber pada data Simfoni PPA tanggal 02 Januari 2025 mencatat bahwa terjadinya kenaikan kasus kekerasan di Provinsi Kalimantan tengah dari tahun 2024 dalam angka 420 kasus yang semula di tahun 2023 mencapai 342 kasus. Kota Palangka Raya tercatat terdapatnya kasus tertinggi sebanyak 72 kasus, di urutan kedua Kotawaringin Timur 71 kasus, dan di urutan ketiga yaitu Paangka Raya dengan jumlah 64 kasus. Jumlah penurunan kasus juga disebabkan oleh laporan yang masuk lebih sedikit. Faktor lainnya disebabkan karena korban enggan melapor atau cenderung mengadu pada keluarga atau orang terdekat. Minimnya literasi teknologi juga menjadi salah satu kendala korban untuk melapor.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ditujukan dengan Pemenuhan Hak Anak mulai dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) Tahun. Anak merupakan masa depan bangsa sebab itu anak-

anak harus dipenuhi haknya dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan anak selalu berkembang seiring perkembangan jaman yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang saling mendukung dan sinergis. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut provinsi dan kab/kota didorong melaksanakan pemenuhan hak anak yang tertuang dalam kelembagaan dan 5 (lima) kluster serta terdiri dari 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Upaya pengaturan kelahiran melalui keikutsertaan masyarakat dalam keluarga berencana. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa program ini bukan hanya sekedar mengampanyekan program 2 anak cukup saja, namun bagaimana keluarga dapat merencanakan masa depannya agar dapat lebih sejahtera dan berkualitas. Disamping hal itu, angka kelahiran pada usia remaja yang tinggi menjadi permasalah utama di Kalimantan Tengah. Usia remaja yang dimaksud yakni penduduk usia 15 tahun hingga usia 19 tahun. Hal itu tentunya menunjukkan terjadinya perkawinan pada usia anak yang seharusnya pada usia ini mereka harus mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Sehingga hal itupun berdampak pada tingginya lama sekolah di Kalteng. Sangat berat upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, banyaknya perceraian, kenakalan anak dan tuntutan/gaya hidup yang semakin berubah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Renstra yang mendukung ketercapaian **Visi "Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045**". Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:

a. **Misi Kedua** : "**Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat"**
b. **Misi Keempat : "Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial"**.
c. **Misi Kelima :" Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045"**

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
f) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal palsafah Huma Betang (Rumah Besar);
b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damia;
c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;

d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Misi Keempat dan Misi Kelima secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Rencana Strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif bagi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Perencanaan Daerah (Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah), sebagai upaya mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, membantu Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan, menganalisis dan mencari solusi masalah utama (isu kritis) yang dihadapi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 selanjutnya dapat menjadi acuan yang memadai bagi penentuan arah kebijakan, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026. Perencanaan ini memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan

sampai tahun 2026. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam pelaksanaannya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun. Rencana kerja tahunan ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut :

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
(5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
(6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
(7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
(9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
(10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
(11) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem

Informasi Keluarga;

(12) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;

(13) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

(14) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;

(15) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);

(16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

(17) Peraturan Bersama Tiga Menteri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

(18) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

(19) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

(21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;

(22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;

(23) Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri

Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;

(24) Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

(25) Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;

(26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 34);

(27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 04 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);

(28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);

(29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);

(30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

(31) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 71);

(32) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

(33) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 20);

(34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

(35) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37

(36) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

(37) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029

(38) Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah.

(39) Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029;

(40) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

(41) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/40/2025 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

(42) Surat Edaran Sekretaris DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Nomor 000.7.2.2/1159/II/Bapperida/2025 Tanggal 20 Agustus 2029 Tentang

Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029..

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini diharapkan dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dapat diukur, spesifik, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kerangka waktu 5 (lima) tahun dan disadarkan kemampuan daerah. Diharapkan melalui Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat dibangun kesepahamanan dari seluruh pemangku kepentingan demi pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini secara lebih spesifik ditujukan untuk terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme baik antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan dan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan program dan kegiatan, anggaran pada masing-masing program dan kegiatan, serta penanggung jawab program/ kegiatan pembanguan periode 1 (satu) tahunan selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

Maksud Penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 yaitu untuk menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, Program yang tertuang RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 kedalam Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih rinci dan sesuai dengan perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan atau jangka menengah. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi

Tujuan Renstra ini adalah menjadikan dokumen perencanaan ini sebagai

pedoman Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam merencanakan, melaksanakan tugas-tugas dan fungsi serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan dana yang di alokasikan. Disamping itu juga sebagai acuan stakeholder yang terkait sekaligus sebagai sistem kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) berdasarkan target- target indikator yang tertuang di dalamnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/40/2025 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka tugas pokok Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

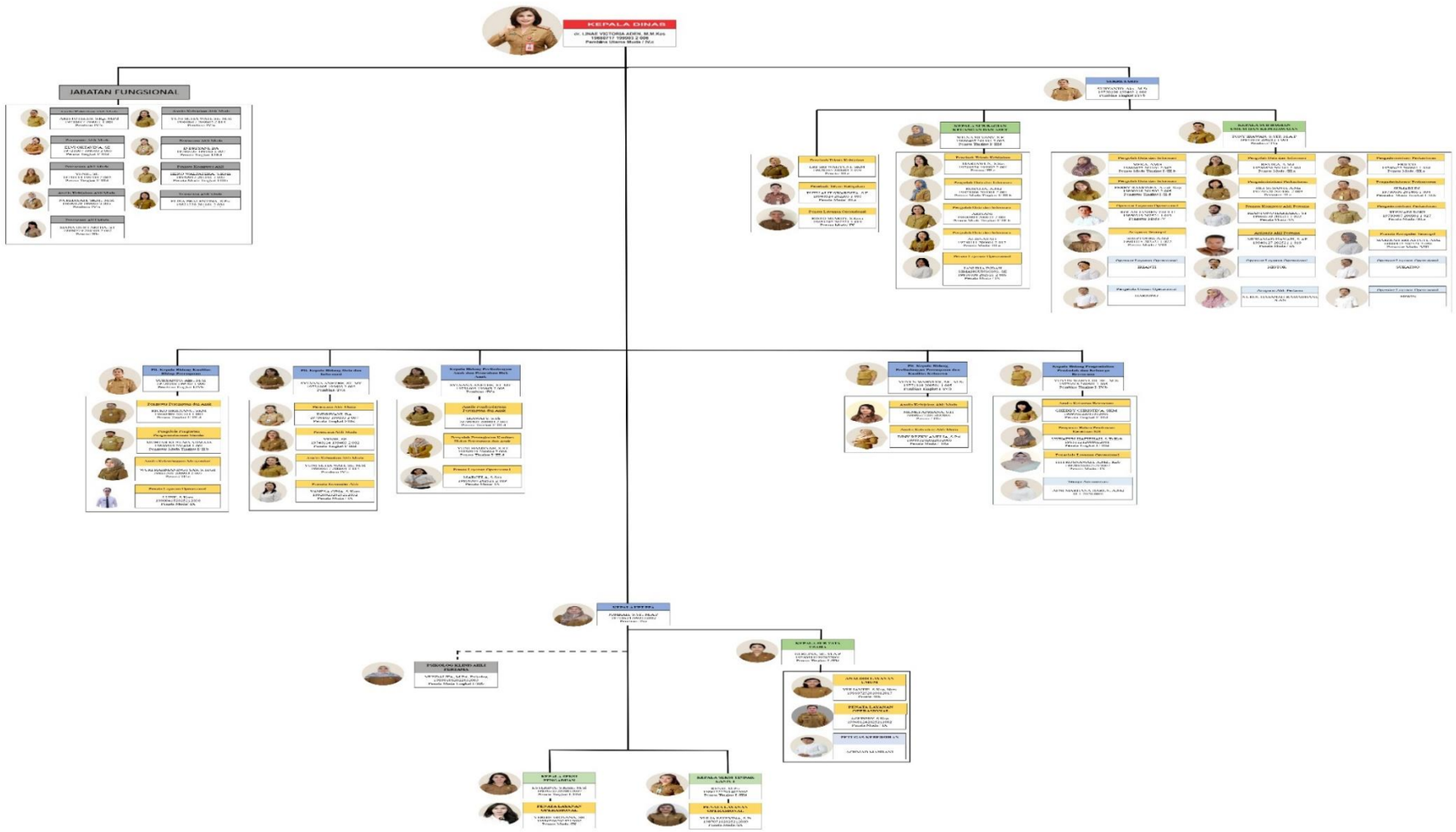
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Melaksanakan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
5) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
6) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
7) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
9) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Dinas; dan
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Adapun gambaran skema struktur organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu:

a). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

b). Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan 2 urusan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dengan 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Susunan organisasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Berencana, terdiri atas:

Berikut akan dipaparkan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dan kelompok jabatan fungsional dalam Struktur Organisasi Dinas P3 Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

1) Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender;
2) Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3) Menetapkan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
4) Menetapkan program data dan informasi gender dan anak;
5) Menetapkan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
6) Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
7) Menetapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
8) Menguatkan pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas;
9) Menguatkan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
10) Menetapkan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro

kependudukan dan keluarga;

11) Melaksanakan keserasian kebijakan kependudukan;
12) Melaksanakan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) Menghimpun bahan/data perencanaan dan penyusunan program serta anggaran Dinas;
2) Melaksanakan perumusan administrasi kepegawaian;
3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
4) Melaksanakan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
5) Melaksanakan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
6) Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
    a) **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, yang mempunyai tugas: pengelolaan keuangan dan aset.
    b) **Sub Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas: mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

1) Merumuskan kajian dan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
2) Melaksanakan fasilitasi pembentukan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
3) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
4) Melaksanakan pengordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
5) Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
6) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan,

pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;

7) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
8) Melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
9) Melaksanakan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
11) Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.

D. Bidang Data dan Informasi

Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
3) Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
5) Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
8) Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website* (e-*gov*);
9) Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan parstisipasi masyarakat;

E. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan

anak

3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
5) Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
7) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
8) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembanagn lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;

3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
4) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
5) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
6) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
8) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan

Keluarga Berencana;

6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
7) Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
8) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
9) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
10) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, penggerakan dan informasi;
11) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk;

H. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) mempunyai tugas operasional teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :

1) Memberikan layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
2) Memberikan layanan penadampingan hukum;
3) Memberikan layanan penadampingan psikologis;
4) Memberikan layanan penadampingan bimbingan rohani;
5) Memberikan perlindungan khusus;
6) Memberikan layanan penjangkauan korban;
7) Melaksanakan pengelolaan kasus;
8) Memberikan layanan penampungan sementara;
9) Memberikan layanan mediasi terkait kasus anak;

10) Memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
11) Memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;

Susunan organisasi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA), terdiri atas :

1. **Seksi Bagian Tata Usaha**, yang mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub bagian Atata Usaha yang meliputi penyususnan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaaan naskah dinas.
2. **Seksi Pengaduan**, yang mempunyai tugas : melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung, dan melindungi korban di penampungan sementara.
3. **Seksi Tindak Lanjut**, yang mempunyai tugas : melaksanakan mediasi, emlakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya dan penadampingan korban dalam upaya pemulihan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

1. Pranata Komputer Ahli Pratama

2. Perencana Ahli Pertama
3. Perencana Ahli Muda
4. Analis Kebijakan Ahli Muda

2) Jabatan Fungsional Umum

Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum juga ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan ke dalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan

Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per Juli 2025 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

a) Jumlah ASN/ Tenaga Kontrak

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	12	32	44
2.	Tenaga PPPK	7	7	14
3.	Tenaga Kontrak	5	3	8
Jumlah		**24**	**42**	**66**

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	6	10
2.	Golongan III	6	24	30
3.	Golongan II	2	2	4
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		**12**	**32**	**44**

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

b) Pendidikan

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN			
2.	SLTP			
3.	SLTA	5	2	7
4.	D3	-	4	4
5.	S1	3	17	20

6.	S2	4	9	13
7.	S3			
Jumlah		**12**	**32**	**44**

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

c) Struktur esselon / jabatan fungsional

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid/Kepala UPT	Esselon III	7	2	2	4
3.	Kasubbag / Kasi	Esselon IV	5	1	4	5
4.	Fungsional Tertentu	-	46	2	8	10
Jumlah			**59**	**5**	**15**	**20**

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Dari data komposisi di atas bahwa ada kekosongan karena pensiun dan mutasi untuk jabatan.

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	10
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	1	1	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	2	-	2	

5.	Pembina	IV / a	2	5	7	
6.	Penata Tk. I	III / d	1	11	12	32
7.	Penata	III / c	-	5	5	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	2	5	7	
9.	Penata Muda	III / a	3	3	6	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	-	1	1	4
11.	Pengatur	II / c	-	1	1	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	2	-	2	
13.	Pengatur muda	II / a	-	-	-	
14.	Juru Tk. I	I / d	-	-	-	-
15.	Juru	I / c	-	-	-	
16.	Juru muda TK. I	I/b	-	-	-	-
17	Juru Muda	I/a	-	-	-	-
JUMLAH			**12**	**32**	**44**	**44**

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Komposisi jumlah PNS tahun 2025 sebanyak 44 orang, dari jumlah PNS sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 10 orang, Golongan III 32 orang dan golangan II 4 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III sebanyak 32 orang sebesar 67,39 %. Di mana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu gedung 1 dan gedung 2. Gedung 1 terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Ruang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Gedung 2 terdiri dari Ruang Bidang Data dan Informasi, Ruang Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Ruang Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Ruang UPT-PPA, Ruang ASI, Mushola serta Ruang Rapat. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Conditioner* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prarasana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, *printer*, *scanner* serta jaringan *WiFi*, sebagaimana data aset pada Tabel 2.5 sebagai berikut ini.

Tabel 2.6
Daftar Inventaris Dinas P3APPKB Tahun 2025

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.2.02.001.004.001	000001	Sepeda Motor	Honda / NF 125	JB81189K426633	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
2	1.3.2.02.001.004.001	000002	Sepeda Motor	Honda / NF 125	JB81179K430464	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
3	1.3.2.05.001.004.001	000002	Lemari Besi/Metal	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
4	1.3.2.05.001.004.005	000001	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
5	1.3.2.05.001.004.007	000001	Brandkas	A3 / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
6	1.3.2.05.003.001.005	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2009	Baik	1
7	1.3.2.05.003.003.006	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2009	Rusak Berat	1
8	1.3.2.05.001.004.001	000004	Lemari Besi/Metal	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
9	1.3.2.05.001.004.005	000021	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
10	1.3.2.10.001.002.010	000007	Personal Komputer lainnya	Intel Core i3 / -	-	Plastik	Pembelian	2010	Baik	1
11	1.3.2.05.001.004.005	000022	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2011	Baik	1
12	1.3.2.05.002.001.002	000001	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
13	1.3.2.05.002.001.030	000119 s/d 000120	Kursi Rapat	Montana / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2011	Baik	2
14	1.3.2.05.003.001.007	000033 s/d 000034	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Baik	2
15	1.3.2.05.001.001.002	000003	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Brother / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
16	1.3.2.10.001.002.003	000005	Note Book	Thosiba Satelite / -	-	Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
17	1.3.2.05.002.004.006	000008	Kipas Angin	Maspion / Stand	-	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
18	1.3.2.10.001.002.001	000001	P.C Unit	Intel / Pentium 5	-	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
19	1.3.2.10.002.003.003	000009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA / -	-	Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
20	1.3.2.02.001.003.002	000001	Pick Up	CHOVROLET	MMM148MGODH616721	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
21	1.3.2.02.001.004.001	000003	Sepeda Motor	DOUBLE CABIN / COLORADO LTZ CREW CAB 2.5MT MY12 HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5	MH1JB9134DK460939	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
22	1.3.2.02.001.004.001	000004	Sepeda Motor	M/T HONDA SUPRA X	MH1JB9133DK460995	BESI	Pembelian	2014	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				125 / NF125TR5						
23	1.3.2.02.001.004.001	000005	Sepeda Motor	M/T HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB913XEK550601	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
24	1.3.2.02.001.004.001	000006	Sepeda Motor	125 TR) HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB9131EK550602	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
25	1.3.2.02.001.004.001	000007	Sepeda Motor	125 TR) HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB9137EK550586	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
26	1.3.2.02.001.004.002	000001	Scooter	125 TR) HONDA / VARIO TECHNO PGM F1	JFB128EK272753	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
27	1.3.2.05.001.004.001	000021 s/d 000025	Lemari Besi/Metal	A/T) Brother / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	5
28	1.3.2.05.001.004.002	000002	Lemari Kayu	Lokal / -	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	1
29	1.3.2.05.001.004.005	000032 s/d 000038	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	7
30	1.3.2.05.001.004.005	000039	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	1
31	1.3.2.05.002.001.004	000001	Kursi Kayu	Lokal / -	-	Rotan/Busa	Pembelian	2014	Baik	1
32	1.3.2.05.002.001.008	000003	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
33	1.3.2.05.002.001.030	000133 s/d	Kursi Rapat	Polaris / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2014	Baik	59
34	1.3.2.05.002.001.050	000007 s/d 000010	Meubeleur lainnya	Lokal / -	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	4
35	1.3.2.05.002.004.004	000006	A.C. Split	LG / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
36	1.3.2.05.002.004.006	000010 s/d 000017	Kipas Angin	Miyako / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	4
37	1.3.2.05.002.004.006	000018 s/d 000019	Kipas Angin	Miyako / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
38	1.3.2.05.002.006.008	000002	Sound System	LG / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
39	1.3.2.05.002.006.077	000002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Jam Besar	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
40	1.3.2.05.003.001.004	000002	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
41	1.3.2.05.003.001.005	000009 s/d 000016	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	8
42	1.3.2.05.003.001.007	000051 s/d 000092	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	42
43	1.3.2.05.003.003.004	000002	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	1.3.2.06.001.002.105	000002	Layar Film/Projector	Infokus / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
45	1.3.2.06.002.001.022	000002	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Krezt / Wireless	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
46	1.3.2.10.001.002.001	000006 s/d 000016	P.C Unit	Acer Aspire / Intel Corei3	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	10
47	1.3.2.10.001.002.003	000007	Note Book	Asus / Intel Corei3 12	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
48	1.3.2.10.001.002.003	000008	Note Book	Acer / Intel Corei3 11,6"	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	1
49	1.3.2.10.002.003.003	000016 s/d 000019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA MG2570 / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
50	.3.2.05.001.001.002	000004 s/d 000006	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Brother / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
51	1.3.2.05.001.004.001	000026 s/d 000036	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2015	Baik	11
52	1.3.2.05.001.005.077	000001	Papan Pengumuman	Lokal / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
53	1.3.2.05.001.005.077	000002	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
54	1.3.2.05.002.001.014	000001	Meja Resepsionis	Lokal / -		Kayu	Pembelian	2015	Baik	1
55	1.3.2.05.002.004.001	000002	Lemari Es	Toshiba Glacio / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
56	1.3.2.05.002.006.002	000002	Televisi	Panasonic		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
57	1.3.2.05.003.003.005	000009 s/d 000016	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	8
58	1.3.2.05.003.003.006	000017 s/d 000019	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	3
59	.3.2.05.003.003.006	0000020	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
60	1.3.2.05.003.003.006	000021 s/d 000033	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	12
61	1.3.2.05.003.003.007	000024 s/d 000077	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	19
62	1.3.2.06.001.002.003	000002	Camera Electronic	Sony / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
63	1.3.2.06.001.002.060	000001	Camera Film	Nicon / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
64	1.3.2.10.001.002.002	000005 s/d 000008	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	4

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1.3.2.10.001.002.002	000009	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
66	1.3.2.10.001.002.002	000010 s/d 000012	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
67	1.3.2.10.002.003.003	0000023	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
68	1.3.2.10.002.003.003	0000024	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
69	1.3.2.02.001.004.002	000002	Scooter	Honda Vario / Vario 125 CBS	MH1JFV119GK513151	Besi	Hibah	2016	Baik	1
70	1.3.2.02.001.004.002	000003	Scooter	ISS Honda Vario / Vario 125 CBS	MH1JFV118GK514324	Besi	Hibah	2016	Baik	1
71	1.3.2.02.001.006.018	000001	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	ISS Daihatsu / Luxio	MHKW3CA3JGK016284	Besi	Hibah	2016	Baik	1
72	1.3.2.05.001.005.012	000002 s/d 000003	Mesin Absensi	Finger Spot / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
73	1.3.2.06.002.001.022	000003 s/d 000004	alat komunikasi telephone lainnya	Toa / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
74	1.3.2.10.001.002.002	000013	Lap Top	Apple / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Rusak Berat	1
75	1.3.2.10.001.002.002	000014 s/d 000016	Lap Top	Lenovo / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	3
76	1.3.2.10.002.001.012	000003 s/d 000005	Hard Disk	WD My Passport	-	Plastik	Pembelian	2016	Baik	3
77	1.3.2.05.002.006.012	000001	Wireless	Bismarck / -	-	Plastik/besi	Pembelian	2018	Baik	1
78	1.3.2.06.001.002.003	000003	Camera Electronic	Panasonic / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
79	1.3.2.06.002.001.004	000001	Telephone Mobile	Samsung / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
80	1.3.2.10.001.002.003	000009	Note Book	Apple / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
81	1.3.2.10.002.001.012	000006	Hard Disk	WD / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
82	1.3.2.10.002.003.003	000025	Printer (Peralatan Personal	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
83	1.3.2.10.002.003.003	000026	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
84	1.3.2.02.001.001.006	000001	kendaraan dinas bermotor	Kijang Inova	MHFAW8EM3K0212816	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
85	1.3.2.02.001.004.002	000004	perorangan lainnya (dst) Scooter	Venture / MPV Honda / X1H02N35M1	MH1KF4118KK430656	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
86	1.3.2.02.001.004.002	000005	Scooter	A/T Honda / X1H02N35M1	MH1KF411XKK430643	Besi	Pembelian	2019	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	1.3.2.05.001.004.003	000001 s/d 000003	Rak Besi	A/T Lokal / -	-	Besi/Kayu	Pembelian	2019	Baik	3
88	1.3.2.05.001.004.005	000040 s/d 000041	Filing Cabinet Besi	Informa / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
89	1.3.2.05.002.001.003	000001 s/d 000002	Kursi Besi/Metal	Informa / Kursi tunggu	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
90	1.3.2.05.002.001.008	000004 s/d 000004	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2019	Baik	2
91	1.3.2.05.002.001.025	000001	Kasur/Spring Bed	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
92	1.3.2.05.002.001.030	000193 s/d 000232	Kursi Rapat	Montana / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	40
93	1.3.2.05.002.001.048	000001	Sofa	Informa / Sofa	-	Busa	Pembelian	2019	Baik	1
94	1.3.2.05.002.001.050	000011 s/d 000014	Meubeleur lainnya	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2019	Baik	4
95	1.3.2.05.002.004.004	000007 s/d 000009	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
96	1.3.2.05.002.004.004	000010 s/d 000011	A.C. Split	Panasonic /	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
97	1.3.2.05.002.004.004	000012 s/d 000015	A.C. Split	Panasonic /	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
98	1.3.2.05.002.004.004	000016	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
99	1.3.2.05.002.004.004	000017	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
100	1.3.2.05.002.004.004	000018	A.C. Split	Pansonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
101	1.3.2.05.002.004.004	000019 s/d 000021	A.C. Split	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
102	1.3.2.05.002.004.015	000001 s/d 000003	Alat Pendingin lainnya	Imatsu / Air Curtain	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
103	1.3.2.05.002.006.002	000003	Televisi	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
104	1.3.2.05.002.006.002	000004 s/d 000006	Televisi	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
105	1.3.2.05.002.006.008	000003	Sound System	Ashly / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
106	1.3.2.05.002.006.008	000004	Sound System	B&B / Mini	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
107	1.3.2.05.002.006.020	000001 s/d 000002	Stabilisator	Hokimotto / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
108	1.3.2.05.002.006.038	000001	Dispenser	Sanken / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
109	1.3.2.05.002.006.038	000002 s/d 000003	Dispenser	Sanken / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	1.3.2.05.002.007.001	000001 s/d 000005	Alat Pemadam/Portable	Lokal / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	5
111	1.3.2.05.003.003.005	0000017	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Informa / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
112	1.3.2.05.003.003.006	000034 s/d 000036	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
113	1.3.2.05.003.005.007	000001 s/d 000003	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Informa / Kursi Pelayanan	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
114	1.3.2.06.001.001.075	000001	Digital Audio Taperecorder	Sony ICD-TX650 / Voice Recorder	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
115	1.3.2.06.001.002.060	000002	Camera Film	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
116	1.3.2.06.001.002.060	000003	Canon / Mirrorless	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
117	1.3.2.06.001.002.060	000004	Camera Film	Go Pro / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
118	1.3.2.06.001.002.105	000001 s/d 000002	Layar Film/Projector	Lokal / Layar Proyektor	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
119	1.3.2.06.001.002.105	000003	Layar Film/Projecto	BENQ MS506p / LCD	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
120	1.3.2.06.001.002.105	000004	Layar Film/Projector	View Sonic m1 / LCD Portable	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
121	1.3.2.06.001.002.105	000005	Layar Film/Projector	LG PH450 / LCD Short Throw	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
122	1.3.2.06.001.002.105	000006	Layar Film/Projector	GP70UP / LCD Mini	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
123	1.3.2.06.001.002.105	000007	Layar Film/Projector	Epson / LCD	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
124	1.3.2.06.002.001.006	000001 s/d 000004	Handy Talky (HT)	Kenwood / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
125	1.3.2.07.001.001.004	000001 s/d 000002	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	ABN Spektrum / -	-	Bes	Pembelian	2019	Baik	2
126	1.3.2.10.001.002.001	000017 s/d 000019	P.C Unit	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
127	1.3.2.10.001.002.001	000020 s/d 000021	P.C Uni	Lenovo / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
128	1.3.2.10.001.002.002	000017 s/d 000020	Lap Top	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	1.3.2.10.001.002.002	000021 s/d 000022	Lap Top	Asus / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
130	1.3.2.10.001.002.003	0000010	Note Book	Asus / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
131	1.3.2.10.001.002.003	0000011	Note Book	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
132	1.3.2.10.001.002.010	0000017	Personal Komputer lainnya	Samsung Galaxy / Tablet	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
133	1.3.2.10.002.003.003	0000027	Printer (Peralatan Personal Komputer)	pson / L3110	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
134	1.3.2.10.002.003.003	0000028	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
135	1.3.2.10.002.003.003	000029 s/d 000031	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
136	1.3.2.10.002.003.003	0000032	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
137	1.3.2.10.002.003.003	0000033	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
138	1.3.2.06.001.002.060	000005	Camera Film	Logitech / -	-	Plastik	Pembelian	2020	Baik	1
139	1.3.2.10.002.003.003	000034 s/d 000037	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2020	Baik	4
140	1.3.2.05.001.004.001	000037 s/d 000042	Lemari Besi/Metal	Lokal / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2021	Baik	6
141	1.3.2.05.001.004.002	000003 s/d 000004	Lemari Kayu	Lokal / Arsip	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
142	1.3.2.05.001.004.003	000004 s/d 000009	Rak Besi	Lokal / -	-	Besi/kayu	Pembelian	2021	Baik	6
143	1.3.2.05.002.001.008	000006	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
144	1.3.2.05.002.001.014	000002 s/d 000003	Meja Resepsionis	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
145	1.3.2.05.002.001.036	000001 s/d 000150	Kursi Lipa	Chitose / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	150
146	1.3.2.05.002.001.048	000002 s/d 000003	Sofa	Lokal / -	-	Busa	Pembelian	2021	Baik	2
147	1.3.2.05.002.001.048	000004 s/d 000009	Sofa	Lokal / -	-	Busa	Pembelian	2021	Baik	6

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	1.3.2.05.002.004.001	000003 s/d 000007	Lemari Es	Panasonic / 2 Pintu	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	5
149	1.3.2.05.002.004.004	000022 s/d 000031	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	10
150	1.3.2.05.002.004.004	000032 s/d 000051	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	20
151	1.3.2.05.002.004.004	000052 s/d 000093	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	42
152	1.3.2.05.002.006.002	000007	Televisi	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
153	1.3.2.05.002.006.038	000004 s/d 000010	Dispenser	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	7
154	1.3.2.05.002.006.039	000001	Mimbar/Podium	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
155	1.3.2.05.002.006.059	000001	Gordyin/Kray	Shin-Inchi / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
156	1.3.2.05.002.006.077	000003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Krisbow-Generat or / -	-	Besi	Pembelian	2021	Baik	1
157	1.3.2.05.003.001.004	000003	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
158	1.3.2.05.003.001.005	000017 s/d 000022	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	6
159	1.3.2.05.003.001.006	000017 s/d 000034	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	18
160	1.3.2.05.003.001.007	000093 s/d 000144	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	52
161	1.3.2.05.003.003.004	000003	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	1
162	1.3.2.05.003.003.005	000018 s/d 000023	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	6
163	1.3.2.05.003.003.006	000037 s/d 000052	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	16
164	1.3.2.05.003.003.007	000079 s/d 000085	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	7
165	1.3.2.05.003.003.007	000086 s/d 000130	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	45
166	1.3.2.06.001.001.041	000001	Professional Sound System	Yamaha Audioline / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
167	1.3.2.06.001.002.045	000001	Tripod Camera	ProGear	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	1.3.2.06.001.002.045	000002	Tripod Camera	ProGear (FoxPro) / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
169	1.3.2.06.001.002.055	000001 s/d 000002	Lighting Stand Tripod	GVM / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
170	1.3.2.06.001.002.126	000001 s/d 000002	Camera Digital	Nikon / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
171	1.3.2.06.001.002.130	000001	Video Conference	Logitech / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
172	1.3.2.06.001.006.001	000001	Alat Studio Lainnya	Hikvision / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
173	1.3.2.06.001.006.001	000002	Alat Studio Lainnya	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
174	1.3.2.10.001.002.001	000022 s/d 000029	P.C Unit	HP / All in One	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	8
175	1.3.2.10.001.002.001	000030	P.C Unit	Asus / Desktop	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
176	1.3.2.10.001.002.002	000023 s/d 000025	Lap Top	Dell / -		Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
177	1.3.2.10.002.003.003	000038	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -		Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
178	1.3.2.10.002.003.003	000039 s/d 000041	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / A3		Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
179	1.3.3.01.001.001.001	00003	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	027/052/PBJ/DP3APPKB/VIII/202	Beton	Pembelian	2021	Baik	1
180	1.3.4.04.002.003.001	000001	Jaringan listrik lainnya	-	027/052/PBJ/DP3APPKB/VIII/202		Pembelian	2021	Baik	1
181	1.3.2.05.001.001.008	00001	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Brother / GX-6750	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
182	1.3.2.05.001.004.001	000043	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 rak	-	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
183	1.3.2.05.001.004.001	000044	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 Rak	-	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
184	1.3.2.05.001.004.002	000005 s/d 000006	Lemari Kayu	Lokal / Loker	-	Kayu	Pembelian	2022	Baik	2
185	1.3.2.05.001.004.027	00005	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Pakaian	-	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
186	1.3.2.05.001.004.027	00006	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Sepatu	-	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
187	1.3.2.05.001.005.077	00003	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	1.3.2.05.001.005.077	00004	Papan Pengumuman	Lokal / whiteboard	-	Kayu-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
189	1.3.2.05.001.005.077	00005	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Besi-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
190	1.3.2.05.001.005.077	00006	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
191	1.3.2.05.001.005.077	00007	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
192	1.3.2.06.001.006.001	00003	Alat Studio Lainnya	P8 Outdoor	-	-	Pembelian	2022	Baik	1
193	1.3.2.06.002.001.004	00002	Telephone Mobile	Realme / 5G	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
194	1.3.2.06.002.001.004	000003 s/d 000004	Telephone Mobile	Samsung Galaxy A23 / Android	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
195	1.3.2.10.001.002.001	000031 s/d 000035	P.C Unit	HP / All in one PC	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
196	1.3.2.10.001.002.003	000012	Note Book	MSI CF633 / Core i7	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
197	1.3.2.10.001.002.003	000013 s/d 000014	Note Book	MSI Pulse / Core i9	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
198	1.3.2.10.001.002.009	00001	Tablet PC	Samsung Galaxy / Android Tab S6	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
199	1.3.2.10.002.001.012	000007 s/d 000011	Hard Disk	Seagate / One Touch 1 T	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
200	1.3.2.10.002.002.009	00001	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / Workforce ES-50	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
201	1.3.2.10.002.003.003	000042	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
202	1.3.2.10.002.003.018	000001 s/d 000004	Peralatan Personal Komputer lainnya	Inforce / Uninterrupterible Power Suply (UPS)	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	4
203	1.3.3.01.001.033.001	00001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/041/PBJ/DP3APPKB/V/2022	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
204	1.3.3.01.001.033.001	00002	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/105/PBJ/DP3APPKB/XI/2022	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
205	1.3.2.02.001.002.002	00001	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Toyota / HI ACE PREMIO 2.8 M/T	JTF2A9CP2P6002785	Besi	Pembelian	2023	Baik	1

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	1.3.2.05.002.001.001	000001 s/d 000020	Meja Kerja Besi/Metal	Lokal / Meja Lipat	-	Besi	Pembelian	2023	Baik	20
207	1.3.2.05.002.001.008	00007	Meja Rapat	Lokal / --	-	Kayu	Pembelian	2023	Baik	1
208	1.3.2.05.002.001.031	00003	Kursi Tamu	Lokal / --	-	Kayu	Pembelian	2023	Baik	1
209	1.3.2.05.003.003.009	00001	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Lokal / --	-	Besi/Busa	Pembelian	2023	Baik	4
210	1.3.2.08.001.011.208	00001	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Camrera Video Converence		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
211	1.3.2.08.001.011.208	00002	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Camera Recorder		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
212	1.3.2.08.001.056.081	000001 s/d 000002	Meja Kerja	Lokal / Meja Lipat Panjang		Bes	Pembelian	2023	Baik	2
213	1.3.2.10.001.002.002	000026 s/d 000033	Lap Top	- / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	8
214	1.3.2.10.002.002.009	00002	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
215	1.3.2.10.002.003.003	000043 s/d 000048	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	6
216	1.3.3.01.001.036.001	00002	Taman Permanen	-	12/SPK/PP/DP3APPKB/202		Pembelian	2023	Baik	1
217	1.3.3.04.001.004.001	00006	Pagar Permanen	-	12/SPK/PP/DP3APPKB2023	Beton	Pembelian	2023	Baik	1
218	1.3.2.05.001.004.002	000007 s/d 000022	Lemari Kayu	Lokal / Lemari Kayu 2 pintu	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	16
219	1.3.2.05.002.001.002	000031	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
220	1.3.2.05.002.001.048	000010	Sofa	Lokal / Kursi Kayu	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
221	1.3.2.05.002.003.003	00001	Mesin Pemotong Rumput	- / -	-	Besi	Pembelian	2024	Baik	1
222	1.3.2.05.002.004.006	000020 s/d 000023	Kipas Angin	Sekai / Kipas angin embun	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	4
223	1.3.2.05.002.006.002	000008 s/d 000009	Televis	Smart TV	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	2
224	1.3.2.05.002.006.007	000005 s/d 000006	Loudspeaker	- / -	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	2
225	1.3.2.05.003.002.011	00001	Meja Tamu Biasa	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
226	1.3.2.05.003.005.007	000004 s/d 000005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	- / -	-	Plastik-Busa	Pembelian	2024	Baik	2
227	1.3.2.06.001.002.105	000008 s/d 000010	Layar Film/Projecto	Epson / LCD Proyektor	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	3

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	1.3.2.10.001.002.002	000034 s/d 000047	Lap Top	Acer / --	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	14
229	1.3.2.10.001.002.009	00002	Tablet PC	Samsung / Tablet Android	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
230	1.3.2.10.002.001.012	000012	Hard Disk	Samsung / Tablet Android	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
231	1.3.2.10.002.003.003	000049 s/d 000063	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Seagate / Harddisk	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	15
232	1.3.2.10.002.003.009	00001	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Samsung / Cover		Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
233	1.3.3.01.001.013.001	00001	Gedung Pos Jaga Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB	Beton	Pembelian	2024	Baik	1
234	1.3.3.01.001.033.001	00003	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB		Pembelian	2024	Baik	1
235	1.3.3.04.001.004.001	00005	Pagar Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB	Beton	Pembelian	2024	Baik	1
236	1.3.2.05.002.001.039	00002	Meja Komputer	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, Januari 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016-2021 secara terinci sebagaimana Tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPKMD Tahun 0	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**													
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81.88	81,88	81,90	81,92	81,96	82,08	81,98	79,99	79,99	1,00	1,00	0,98	0,98
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,43	3,43	3,43	3,50	3,6	3,43	3,38	1,64	3,16	1,00	0,99	0,47	0,88
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	100,00	85,00	87,5	90	100,00	108,36	114,28	102.11	1,00	1,27	1,31	0,05
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	61,83	63,68	65,59	57,68	59,56	60,37	63,68	0,93	0,96	0,95	0,97
5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50	100,00	50,00	55	60	84,62	100	100	100	0,85	2,00	1,82	1,67
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**													
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	60,32	62.44	64.55	51,65	54,25	62,6	62,72	0,86	0,90	23,95	23,19
2	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	2,1	2.06	2.00	2,37	2,31	2,28	2,26	1,13	1,10	26,06	27,12
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ moderm Contraceptive (mPCR)	73.23	73.23	73.23	73.68	74,26	64,90	64,20	65,50	66,4	21,23	21,00	0,89	0,89
4	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5.36	5.36	5.36	5.18	5.00	-	11,75	8,33	8,1	-	50,36	37,72	38,88
5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	21	21	20,00	18	19,70	63,13	36	38,4	0,94	3,01	1,80	2,13

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPG adalah indikator yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki - Laki dan Perempuan. Data tersebut menunjukan bahwa laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan dalam mengisi pembangunan daripada perempuan. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yangjustru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing- masing komponennya.

IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. IPG merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol.

Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menuju untuk meningkatkan IPG melalui peningkatan Kinerja Pembangunan dalam IPM dan Pembangunan Responsif Gender. Kesetaraan Gender adalah tujuan dalam Pembangunan Responsif Gender yang dilakukan melalui pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, kaum disabilitas maupun anak-anak. Dalam hal komitmen Kalimantan Tengah telah mempunyai Payung Hukum dalam bentuk Perda No 4 Tahun

2014 tentang Pengrusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar Pembangunan Reponsif Gender menuju Kesetaraan Gender di Kalimantan Tengah. Melalui Perda ini semua perangkat daerah, swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidangnya masing masing.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Instruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah; PUG adalah strategi yang harus di laksanakan di semua bidang pembangunan, dikuatkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Permendagri tersebut PUG dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prasyarat PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, sumberdaya manusia, system informasi data terpilah gender, alat analisis untuk menemukenali isu gender dan partispasi lembaga masyarakat.

Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender dalam misi RPJMD 2021-2026 menunjukkan selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal proses pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. Kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dibandingkan dengan Provinsi lainnya IPG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 pada nilai indeks 89,82 masih rendah dan demikian juga masih sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang mencapai angka sebesar 91,06 artinya secara rata- rata kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan di Kalimantan Tengah masih belum optimal dan belum melalui perencanaan dan penganggaran tematik atau untuk menyeleaikan isu-isu gender yang ada.

IPG dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) derajat kesehatan khususnya kesehatan ibu hamil dan bayu; 2) tingkat pendidikan masyarakat baik perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan; 3) tingkat ekonomi perempuan dalam mendapatkan penhgasilan atau uang. Masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); tingkat pendidikan yang belum maksimal memberikan kesempatan dan peluang yang sama pada gender.

Tabel 2.8
Pembanding antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2021-2024

Tahun	IPM perempuan	IPG
2021	71,05	89,03
2022	67,67	89,20
2023	69,87	89,82
2024	68,82	89,82

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

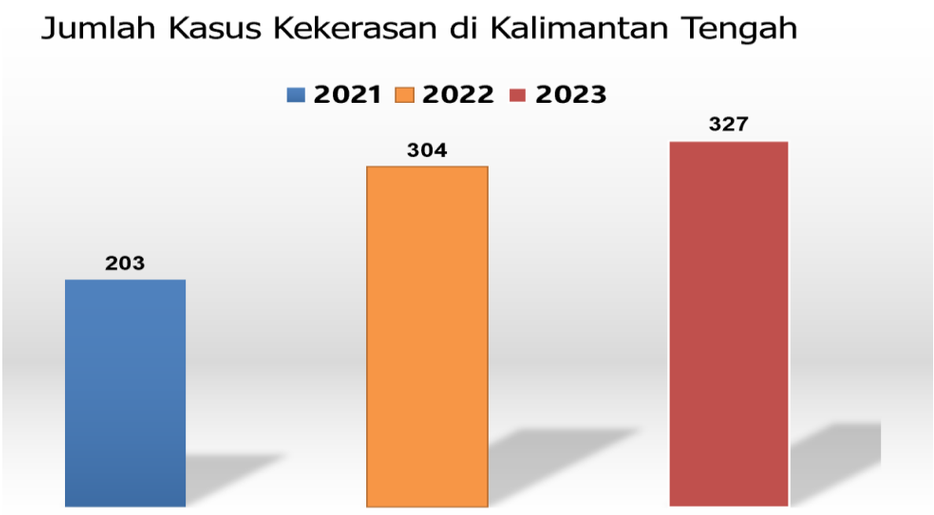
Tabel 2.8 melihatkan IPM dan IPG saling terkait. Jika IPM Naik maka IPG juga, demikian sebaliknya. Maka itu Pembangunan Responsif Gender banyak dipengaruhi Indikator IPM. Dapat di tarik kesimpulan bahwa IPM dan IPG Kalimantan Tengah merupakan Indikator yang terkait dengan pembangunan Responsif Gender. Secara umum pencapaian pembangunan manusia dan gender semakin membaik meskipun capaian pembangunan manusia perempuan belum mampu menyamai laki-laki.

Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyak hak akses (ikut), partisipasi (mempunyai suara), kontrol (ikut mengambil keputusan) dan manfaat (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga manager,profesional administrasi dan teknisi, sumbangan dalam pendapatan kerja. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan perlemen,tenaga propesional dan ekonomi.

Berdasarkan pencapaian indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,54 yaitu pada tahun 2019 dan 2020 dengan pencapaian 6,34%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Data ini menunjukkan masih belum terdata tentang partisipasi perempuan di pemerintahan karena faktor berkurangnya jumlah perempuan di lembaga pemerintahan karena pensiun dan tes penerimaan CPNS baru dilaksanakan akhir tahun 2019 dan SK pengangkatan CPNS baru terdata jumlahnya di tahun 2021.

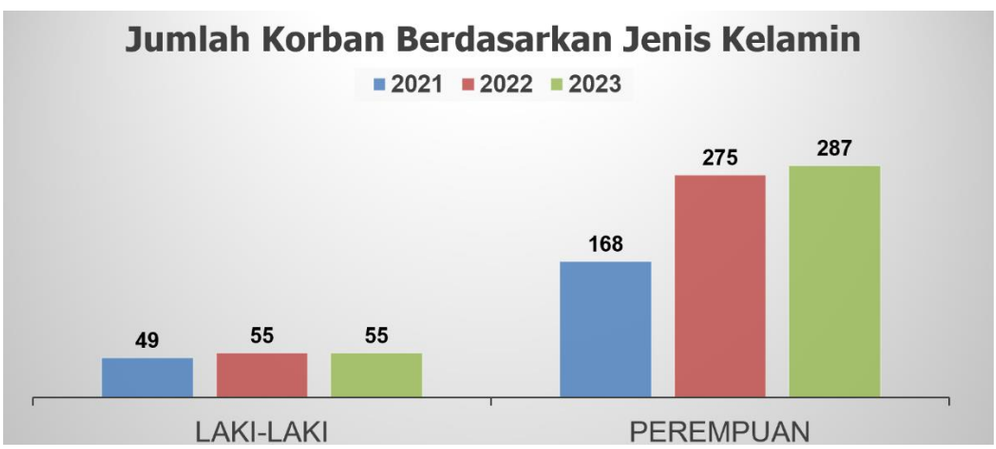
Berdasarkan pencapaian indikator Rasio KDRT berada pada nilai rasio maksimum yaitu 563,56. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Kasus Kekerasan di Kalimantan Tengah saat ini baik di Kabupaten Kota telah banyak terjadi tidak saja kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak namun juga kasus pelecehan seksual juga menjadi perhatian seluruh dinas maupun instansi terkait baik Pemerintah Kota maupun Provinsi. Melalui peran UPT PPA di tingkat provinsi dan di setiap kabupaten Kota sebagai pengganti satgas perlindungan perempuan dan anak diharapkan kasus KDRT di Kalimantan Tengah dapat diatasi.



Gambar 2.2 Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: UPT PPA Provinsi Kalteng, 2024

Sementara itu berdasarkan data yang dimiliki admin sistem informasi *online* perempuan dan anak Simfoni P3APPKB Kalteng pelaporan terhadap tindak kekerasan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2021 yaitu 203 kasus, tahun 2022 sebanyak 304 kasus, tahun 2023 yaitu 327 kasus, korban kasus meningkat selama tiga tahun berturut-turut karena korban kekerasan sudah berani melaporkan ke UPT PPPA Dinas P3APPKB dari tahun sebelumnya yang masih takut melaporkan kekerasan yang dialami korban.



Gambar 2.3. Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Gambar 2.3 kasus yang ada korban kekerasan lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan. terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial

budaya, dan faktor ekonomi.

- Faktor individu perempuan

  Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

- Faktor pasangan

  Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain.

  Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

  Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menggangur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur.

  Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

  Perempuan dengan suami pengguna narkotika beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkotika. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkotika tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan

fisikdan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

- Faktor ekonomi

  Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

- Faktor sosial budaya

  Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Berdasarkan pencapaian indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,53 yaitu pada tahun 2017 dengan pencapaian 0,58 rata-rata jumlah anak. Walaupun terjadi penurunan rata-rata jumlah anak per wanita usia subur menjadi 0,58 anak tahun 2017, bukan berarti jumlah penduduk akan semakin menurun. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga adalah jumlah anak yang dilahirkan per keluarga. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur

15-49 tahun). Program KB yang selama ini menjadi program utama pencegahan meledaknya penduduk sangat dianggap bermanfaat bagi Indonesia. Dengan melihat kedudukan Indonesia menduduki peringkat ke empat penduduk paling banyak di dunia. Pemerintah terus menyosialisasikan pentingnya program Keluarga Berencana untuk meredam ledakan penduduk. Perempuan di Indonesia lebih bebas mempunyai anak tidak seperti di beberapa negara lain yang pemerintahnya membatasi tiap keluarga hanya punya 1 anak.

Berdasarkan pencapaian indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu berada pada nilai rasio maksimum 1,62 yaitu pada tahun 2021 dengan pencapaian 239.304 keluarga. Tingkat kesejahteraan menurut indikator keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program pembangunan keluarga sejahtera sudah dilakukan oleh untuk membentuk keluarga yang sejahtera.

Adapun ruang lingkup dapat dikatakan keluarga sejahtera yaitu dapat terpenuhi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan keluarga disini dapat dinilai melalui 13 variabel. Variabel tersebut meliputi agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat. Ketigabelas variabel tersebut kemudian dituangkan menjadi 21 item yang terbagi ke dalam lima tahapan sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahteraIII (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus). Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I

1. Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)

   Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I.
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

   Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (*psychologicalneeds*) keluarga. Indikatornya yaitu:
   a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
   b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah danbepergian.

c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

2.3.1. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh anggaran belanja langsung dan realisasinya Tahun 2021-2024 dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024

No	Uraian Program	Pagu Anggaran Tahunm (Rp)				Realisasi Anggaran Tahun (Rp)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.683.018.536	11.329.594.098	12.272.169.181	13.711.529.709	16.671.616.474	9.789.321.995	10.798.307.280	12.745.771.198
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.426.673.400	1.283.531.350	1.074.393.501	989.855.574	1.402.356.960	1.252.050.952	707.140.568	831.081.860
3	Program Perlindungan Perempuan	539.311.400	681.024.621	1.029.521.131	526.052.238	521.660.822	670.752.283	920.917.688	519.785.357
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	97.157.400	157.547.750	158.521.078	249.544.817	96.757.250	151.913.250	157.820.950	240.632.500
5	Program Pengelolaan Sistem data Gender Dan Anak	171.104.000	218.245.000	217.530.460	205.030.460	164.575.700	211.606.300	217.267.310	199.676.790
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	273.633.200	360.341.370	778.448.913	637.058.913	238.981.600	353.945.344	754.656.114	635.137.435
7	Program Perlindungan Khusus Anak	368.564.000	432.702.000	589.622.435	988.231.328	245.992.854	430.340.150	576.382.850	961.692.357
8	Program Pengendalian Penduduk	39.440.000	198.477.300	-	151.984.773	38.036.500	136.596.300	-	143.446.176
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	138.371.000	136.994.500	36.339.945	36.339.945	135.531.200	127.029.850	36.219.400	36.238.120
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	44.410.000	147.287.500	1.473.155.100	659.740.491	44.256.000	141.602.500	1.436.850.404	648.438.968
TOTAL		**20.781.682.936**	**14.945.745.489**	**17.629.701.744**	**18.155.368.248**	**19.559.765.360**	**13.265.158.924**	**15.605.562.564**	**16.961.900.761**

No	Uraian Program	Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
		2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0,94	0,86	0,88	0,93	13.749.077.881	12.501.254.237
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,98	0,98	0,66	0,84	1.193.613.456	1.048.157.585
3	Program Perlindungan Perempuan	0,97	0,98	0,89	0,99	693.977.348	658.279.038
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,00	0,96	1,00	0,96	165.692.761	161.780.988
5	Program Pengelolaan Sistem data Gender Dan Anak	0,96	0,97	1,00	0,97	202.977.480	198.281.525
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	0,87	0,98	0,97	1,00	512.370.599	495.680.123
7	Program Perlindungan Khusus Anak	0,67	0,99	0,98	0,97	594.779.941	553.602.053
8	Program Pengendalian Penduduk	0,96	0,69	-	0,94	97.475.518	79.519.744
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	0,98	0,93	1,00	1,00	87.011.348	83.754.643
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0,94	0,96	0,98	0,98	581.148.273	567.786.968
TOTAL		**0,94**	**0,89**	**0,89**	**0,93**	**17.878.124.604**	**16.348.096.902**

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, Desember 2024

Anggaran yang diterima DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Jika melihat angkanya setiap tahun menunjukkan penurunan anggaran, kecuali pada tahun 2021 terjadi peningkatan untuk dukungan anggaran aset berupa lanjutan pembangunan Gedung Dinas P3APPKB di Jl. Brigjen Katamso No. 11 (pasca kebakaran tahun 2015). Angka realisasi yang menunjukkan perencanaan program berjalan dengan baik sehingga program yang dianggarkan mencapai target meskipun anggaran sangat terbatas dan cenderung mengalami penurunan.

Dari Tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa capaian dan realisasi pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk belanja langsung pencapaiannya dari Tahun 2021–2024 berfluktuatif cenderung menurun, hal ini menindikasikan pentingnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengelola kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan, dan memiliki sumberdaya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Minimnya Pemahaman dan komitmen mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, keterwakilan terhadap perempuan dan anak, sehingga masih belum berpihak penganggaran untuk program dan kegiatan.
2) Minimnya modal dan kapasitas SDM perempuan serta kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
3) Masihnya adanya beban ganda, diskriminasi, stereotipe, pelabelan di lingkungan sosial pada perempuan;
4) Industri Rumahan dan UMKM perempuan belum paham tentang cara pengemasan yang menarik dalam *marketing;*
5) Kondisi alam yang *fluktuaktif* mempengaruhi kondisi perekonomian

perempuan;

6) Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
7) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
8) Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
9) Belum ada kesepakatan /MOU antara lembaga dalam meningkatkan kualitas keluarga;
10) Minimnya dukungan SDM yang menguasai IT, serta kurangnya sosialisasi terhadap layanan yang tersedia;
11) Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
12) Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak serta minimnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
13) Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
14) Banyak Regulasi yang materialnya muatannya justru mendiskriminasikan perempuan;
15) Lemahnya perlindungan hak atas privasi perempuan, nihilnya narasi hak perempuan dalam sektor bisnis serta perlindungan perempuan pembela HAM atas lingkungan masih minim;
16) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
17) Partisipasi Masyarakat yang belum optimal dalam pencegahan kekerasan.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1) Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong

banyaknya SDM Perempuan yang potensial;

2) Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
3) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD termasuk dalam Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2021-2026, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
4) Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Organisasi Perempuan (BKOW, Dharma Wanita Provinsi, Kaukus Perempuan Parlemen), Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak;
5) Meningkatnya Pertumbuhan Industri Rumahan dan UMKM Perempuan serta perkembangan teknologi informasi yang cepat melalui media sosial dengan penjualan *online*;
6) Peningkatan kreatifitas dan inovasi memberikan peluang ekonomi kreatif bagi perempuan, cukup banyak tumbuh di tengah masyarakat;
7) Tersedianya *platform* baik portal *website*, media sosial dan layanan *hotline*) memberi peluang sebagai sarana promosi dan sosialisasi terkait Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
8) Adanya dukungan kepala daerah dalam mendukung Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026 serta Penyusunan Data dan Informasi Terpilah dalam Peangarusutamaan Gender dan Anak;
9) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
10) Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
11) Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
12) Tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang Pelaksanaan

Penyelenggara Perlindungan Hak Perempuan dan Kebijakan Tentang TPPO;

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1) Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
2) Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
3) Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja;
4) Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah;
5) Minimnya dukungan dari para penentu kebijakan dan pengambil keputusan di tingkat masyarakat;
6) Rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang bahaya dan dampak pernikahan dini serta masih adanya anggapan jika menikah di usia remaja adalah hal yang lumrah;
7) Rendahnya taraf hidup masyarakat saat kondisi pandemi *Covid-19*;
8) Dampak dari pandemi *Covid-19* meningkatkan angka kelahiran;
9) Masyarakat belum tahu dan memahami dengan benar tentang pesan ataupun aturan dari regulasi yang ada dari pemerintah;
10) Masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanganan *stunting*

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

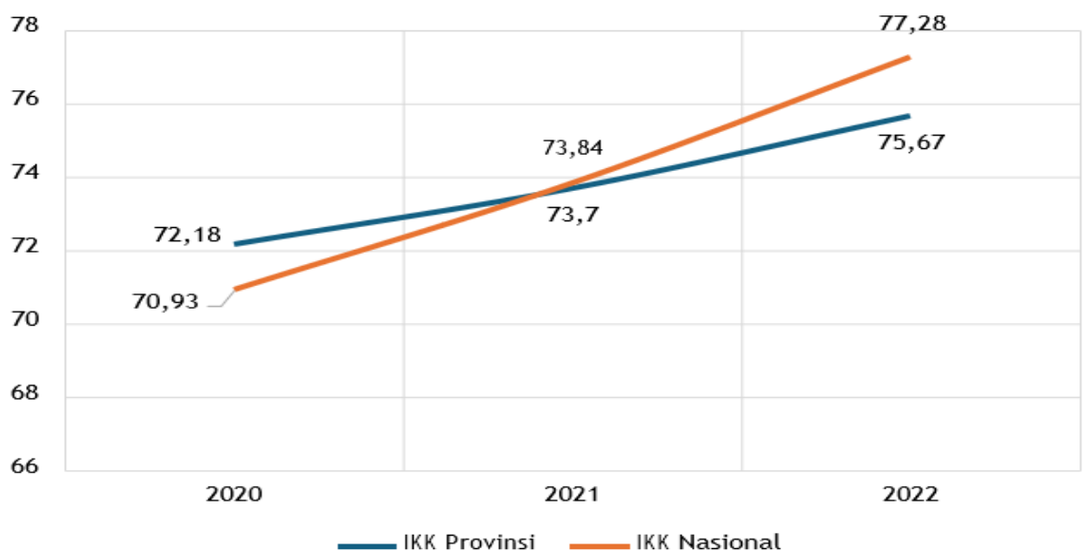
1) Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
2) Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program KKBPK;
3) Adanya Kebijakan Daerah dan Komitmen Bersama terkait pencegahan dan penanganan *stunting* di Kalimantan Tengah

4) Tersedianya Surat edaran untuk mendukung/menghapus pernikahan pada usia anak

5) Mudahnya informasi yang didapat di masyarakat dapat mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan tindakan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak dan *stunting* di masyarakat
6) Berbagai macam media teknologi dan informasi dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat
7) Kemudahan informasi tentang KB
8) Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007.

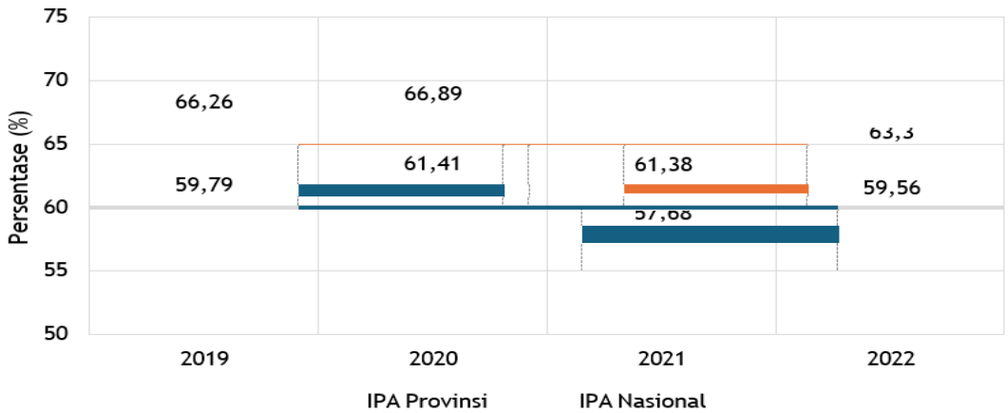
Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Pembangunan keluarga di Indonesia diukur dengan beberapa indikator, salah satunya adalah Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak dan kesetaraan gender.

IKK diukur menggunakan dimensi kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial-psikologi, dan kualitas ketahanan sosial-budaya. IKK Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, IKK Provinsi Kalimantan Tengah meningkat 3,4 menjadi 75,67. Nilai tersebut berada di bawah nilai IKK nasional, yaitu 77,28.



Gambar 2.4. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik kondisi daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. IPA menggunakan indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus dalam penilaiannya. IPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Hal tersebut sejalan dengan tren IPA nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2020, IPA meningkat 1,62 dari tahun 2019. Pada tahun 2022, IPA Provinsi Kalimantan Tengah meningkat kembali setelah turun pada tahun sebelumnya walaupun belum melampaui capaian IPA tahun 2019.



Gambar 2.5 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019- 2022
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 dan 2022

Pengukuran pemberdayaan perempuan di suatu wilayah menggunakan indeks pembangunan gender, indeks ketimpangan gender, dan indeks pemberdayaan gender. Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2019-2023, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, IPG menurun dari tahun 2019. Sementara, pada tahun 2022-2023, IPG meningkat melebihi kondisi awal pada tahun 2019. IPG pada tahun 2023 adalah 89,49.

Indeks ketimpangan gender (IKG) menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan antargender pada ketiga dimensi tersebut. Selama tahun 2019-2023, IKG mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2023, terjadi peningkatan IKG dari tahun sebelumnya. IKG pada tahun 2023 adalah 0,541 yang sama dengan IKG pada tahun 2019.

Sementara, indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan partisipasi atau

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara terus-menerus pada tahun 2020-2022. IDG Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 81,98, turun poin dari tahun 2019.

Tabel 2.10. Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,09	89,03	88,79	89,2	89,49
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,541	0,547	0,537	0,526	0,541
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,2	82,41	82,08	82	81,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024

a. Masalah yang di hadapi

1) Perlunya Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil pembangunan dapat menjadi cerminan keberhasilan pembangunan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah nilai IKK nasional. Rendahnya nilai IKK penurunan nilai penyusun pada dimensi kualitas ketahanan fisik dan kualitas ketahanan ekonomi.

Tabel 2.11
Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Peningkatan Kualitas Keluarga

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Nilai indeks kualitas keluarga masih di bawah nilai nasional	Prevalensi ketidakcukupan pangan semua umur masih tinggi	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
	Penurunan anggota rumah tangga yang memiliki asuransi	
	Peningkatan rumah tangga dengan anak menerima hukuman fisik/agresi psikologis	

2) Ketimpangan Gender yang Masih Tinggi

Ketimpangan gender menilai kesenjangan gender pada dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Kondisi-kondisi pada setiap dimensi tersebut menggambarkan ketimpangan yang terjadi antargender. Permasalahan kesehatan pada perempuan terkait dengan beban reproduksi perempuan, yaitu hamil dan

melahirkan. Permasalahan tenaga kerja yang timpang ditandai dengan rendahnya keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja.

Tabel 2.12
Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Ketimpangan Gender

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Ketimpangan gender masih	Proporsi perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan masih tinggi	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
	Perempuan melahirkan di usia bawah 20 tahun masih tinggi	
	Kecenderungan penurunan TPAK perempuan	

2.5 Rekomendasi Rangkaian Kerja Pembangunan 2025-2029

Sesuai ketentuan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, rumusan sasaran pokok merupakan indikator dan target ukuran pencapaian keberhasilan dalam periode jangka panjang. Sasaran jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam setiap tahapan pembangunan lima tahunan dengan menetapkan target sasaran pokok untuk masing-masing periode. Indikator sasaran pokok jangka panjang perlu diadaptasi menjadi indikator tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun berikut adalah sasaran pembangunan periode 1 RPJPD (Tahun 2025-2029) Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.13
Arahan Indikator Utama Pembangunan dalam Periode I RPJPD (2025-2030) Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pokok Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2030	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,89	76,22	OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,430	0,385	OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 2.14 di bawah ini :

Tabel 2.14.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
			Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran
			terjemahan ajaran agama yang bias gender.
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
2	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
3	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender *machinery* di daerah belum optimal
4	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG
5	Data terpilah gender yang belum *valid* dan *update*.	Kurang nya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan instansi terkait, mengenai data	Kurangnya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data
			Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terpilah Gender dan Anak	pembangunan di semua sektor
6	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota
7	Belum terwujudnya Kalimantan Tengah Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/ kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan hak anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
8	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
			Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan pelayanan UPT PPA	Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan layanan UPT serta belum memadai sarana pendukung seperti gedung perkantoran, etalase pelayanan dan belum tersedia rumah aman.	Minimnya dukungan UPT PPA sebagai UPT yang menerima berbagai kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif , mengingat fungsinya sebagai rujukan lanjutan.
10	Tingginya Angka kelahiran total	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP
			Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE
			Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
11	*Stunting* pada anak	Masih tingginya prevalensi *stunting*	Masih minimnya pemahaman keluarga tentang *stunting*
			Praktek pengasuhan yang kurang baik
12	Pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
			Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2025 -2029 adalah :

VISI :

“Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045.

”

MISI :

1). *Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal*
2). *Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan yang inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat*
3). *Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas da mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan*
4). *Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat sebagai keadilan sosial*
5). *Pemberdayaan keadilan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.*

Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:

a. Misi Kedua : “**Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya**

manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat"

b. **Misi Keempat : "Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial"**.
c. **Misi Kelima :" Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045"**

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

g) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
h) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
i) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
j) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
k) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
l) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

f) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal palsafah Huma Betang (Rumah Besar);
g) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damia;
h) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;

i) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
j) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

tersebut di atas menuangkan ke dalam Rencana Srategis secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan permasalahan lintas sector (*crosscutting issues*) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partispasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan *Focal Point* Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Kalimantan Tengah Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Kesempatan dan peluang untuk Perempuan masih tinggi dengan didukungnya Perda PUG No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
3	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cederung rendah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
4	Data terpilah gender yang belum *valid* dan *update*	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/kota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Rendahnya penididikan dan kualitas hidup masyarakat 2. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan merupakan aib keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasus nya. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal 2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan 3. Adanya kemajuan tehnologi, menyebabkan anak – anak dengan mudanya mengakses *social media*, yang tidak diimbangi dengan	1. Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT 4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan dan anak

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
				pengawasan dari orang tua	
7	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Terbatasnya kouta penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang yang dibutuhkan UPT PPA	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	Sudah terbentuknya UPT Provinsi dan beberapa UPT kabupaten yang memacu pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kualifikasi

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Tingkat kesadaran usia untuk berkeluarga yang masih rendah akibat dari rendahnya ekonomi keluarga	Sebagai *leading sector* terkait anak akan memudahkan koordinasi dengan lintas sektor dan SKPD terkait	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
2	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Budaya dan agama terentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

2.8 Telaahan Renstra K/L

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dinas yang menangani 2 Urusan, yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Renstra :

1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah perlu dikemukakan dengan adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian.

2.8.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Tujuan KPPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi KPPPA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di KPPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas

kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan; Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	• Indikator IPG fluktuatif dan belum pada kondisi di atas rata-rata nasional	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya SDM masing/masing SKPD dalam pelaksanaan program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (ARG)	• Adanya Komitmen kepala daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan
		• IDG dan dimensinya bersifat *fluktuatif* namun cenderung meningkat tiap tahun	• Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan • Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan • Ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran	• Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif • Adanya 5 arahan Presiden yang masuk Isu Prioritas di Kementerian PPPA RI Tahun 2020 -2024. • Koordinasi dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			terjemahan ajaran agama yang bias gender.	kerjasama dengan SKPD Terkait dengan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan
		• Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	• Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	• Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi
		• Masih rendah nya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup dan keluarga	• Kurang nya kepedulian antar sesama terhadap masyarakat sekitar, serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan	• Adanya Partisipasi atau dukungan dari Lembaga-lembaga atau pemerintah daerah.
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak; Sasaran : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	• Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Anak • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	• Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak • Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam pemenuhan hak anak
3	Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			
4.	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	• Tingginya kasus Kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	• Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber dayadalam proses pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan
5.	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Sasaran : Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak anak	• Adanya kemajuan tehnologi, menyebabkan anak–anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua • Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber daya dalam proses pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak

2.8.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024.
5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran	*Total Fertility Rate* (TFR) dapat	• Rendahnya kesadaran masyarakat tentang	• Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Total/	mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP) karena takut efek samping • Masih tingginya angka kelahiran pada PUS diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingya kontrasepsi	mendukung program keluarga berencana sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan • Tersedianya ragam media untuk memberikan informasi tentang pentingnya mewujudkan Keluarga Berkualitas, salah satunya dengan penggunaan Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur
2.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Masih belum optimalnya penggunaan Kontrasepsi Modern	• Tersedianya ragam kontrasepsi modern bagi PUS • Tersedianya tenaga medis diseluruh wilayah
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need*	*Unmet Need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024	• Masih rendahnya Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana • Kesadaran PUS untuk menggunakan kontrasepsi dalam melindungi Keluarga masih rendah	Adanya peluang untuk meningkatkan peserta KB
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age *Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasan usia perkawinan anak
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga))	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024	Belum terselenggaranya pembangunan keluarga yang terintegrasi dari lintas sektor, mengakibatkan belum bersinerginya penanganan masalah keluarga	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015-2035, sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada faktor- faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

2.10 Penentuan Isu – isu strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

2.10.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Mewujudkan PUG menjadi sasaran utama dalam pembangunan;
2. Terwujudnya sistem data terpilah gender dan anak yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara akurat dan terkini sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik berbasis Gender dan Anak.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Kabupaten/kota Layak Anak;
4. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
5. Peningkatan pelayanan secara komprehensif melalui pemenuhan kapasitas SDM, sarana prasarana utama dan pendukung pada UPT PPA.

2.10.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan keluarga dalam melahirkan generasi yang berkualitas.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran dalam mensukseskan pencapaian **Misi Kedua**, yakni **Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat, Misi Keempat** yakni **Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial** serta **Misi Kelima**, yaitu **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.**

Sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan **tugas** dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Perangkat Daerah telah menetapkan beberapa indikator tujuan dan sasaran serta target capaian kinerja tahunan selama Periode 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

A. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yeng ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu:

a. Kualitas Hidup Perempuan;
b. Perlindungan Perempuan;
c. Kualitas Keluarga;
d. Sistem Data Gender dan Anak;
e. Pemenuhan Hak Anak; dan
f. Perlindungan Khusus Anak.

B. Sasaran RPJMD 2025-2029

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
S10 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transpormasi Ekonomo	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta mewujudkan Keluarga Berkualias dan Sejahtera	1 ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***	Nilai Sakip	Angka	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	80,50
		2 ***Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan***	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,13	89,15	89,3	89,45	89,6	89,6
			Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
			Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
			Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	14	14	14	14	14
S20 : Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi Kesehatan		3 ***Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak***	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	71,43	78,57	85,71	92,85	100	100
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79	75,99
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,5	3,48	3,46	3,44	3,42	4,4
		4 ***Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak***	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
			Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
S21 : Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan		5 ***Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga***	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,2
			Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,4	38,2	38	37,8	37,6	37,6
			Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,8	57,9	58	58,1	58,2	58,3
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,4	66,41	66,42	66,43	66,43	66,44
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	20,9	21	21,1	21,2	21,3	21,4
			Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,81	88,82	88,83	88,84	88,85
			Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,45	8,44	8,43	8,42	8,41	8,40
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,72	62,7	62,74	62,75	62,76	62,77
			Indeks Lansia Berdaya	Indeks	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81	66,81
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52	89,52

			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78	43,78

Tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 (lima) tahun mendatang selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025 – 2029 Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut :

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran 1 ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***

- ✓ Nilai Sakip

Sasaran 1 ***Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan***

- ✓ Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- ✓ Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
- ✓ Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi
- ✓ Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak

Sasaran 2 ***Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak***

- ✓ Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA
- ✓ Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- ✓ Rasio kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak

Sasaran 3 ***Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak***

- ✓ Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
- ✓ Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Sasaran 4 ***Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga***

- ✓ Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)
- ✓ Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR)
- ✓ Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)
- ✓ Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)
- ✓ Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
- ✓ Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)
- ✓ Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)
- ✓ Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
- ✓ Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
- ✓ Indeks Lansia Berdaya
- ✓ Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
- ✓ Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, demi mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi, bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan organisasi tersebut.

Pada bab ini juga dikemukakan rumusan pernyataan penahapan Renstra, strategi dan arah kebijakan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang. Berikut tahapannya :

Tabel 3.2. Tahapan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan Data terpilah Gender Perempuan dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan analisis stratergi pembangunan lima tahunan di atas maka arah kebijakan yang akan dilakukan dalam Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut pada Tabel 3.3 :

Tabel 3.3. Arah Kebijkan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu: A. Kualitas Hidup Perempuan; B. Perlindungan Perempuan; C. Kualitas Keluarga; D. Sistem Data Gender dan Anak; E. Pemenuhan Hak Anak; dan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi mengenai kebijakan hak sipil anak, pendidikan anak, kesehatan dasar anak dll. 2) Melaksanakan *workshop* bahaya pornoaksi/pornografi dan penanaman nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter anak yang berkualitas. 3) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan SDM lembaga PHA 4) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang KLA.

	F. Perlindungan Khusus Anak.		5) Melaksanakan sosialisasi/*workshop* peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA. 6) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Forum Anak Daerah. 7) Menyusun dan mensosialisasikan peraturan/regulasi daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan. 8) Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan. 9) Meningkatkan koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan lainnya 10) Melakukan sosialisasi secara efektif kepada Masyarakat tentang Layanan UPT PPA 11) Melaksanakan upaya semaksimal mungkin dalam penjangkauan korban, pendampingan, penanganan hingga penyelesaian kasus kekerasan.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	1) Meningkatkan kapasitas keterampilan usaha maupun kemampuan organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi Perempuan 2) Meningkatkan tata kelola dan pengorganisasian data gender dan anak dan Promosi Informasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD. 2) Melaksanakan pelatihan SDM fasilitator PPRG di setiap SKPD dan di kabupaten/kota. 3) Melaksanakan Advokasi dan sosialisasi PUG di bidang politik.
		Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan *stunting* pada

		multisektor	anak
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengoptimalan KIE kepada Masyarakat terkait peningkatan kualitas keluarga

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah instrumen penjabaran kebijakan dan strategi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk diimplementasikan agar tercapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan serta sub kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian program sebagai berikut :

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
   2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pengendalian Penduduk (PP)

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu: A. Kualitas Hidup Perempuan; B. Perlindungan Perempuan; C. Kualitas Keluarga; D. Sistem Data Gender dan Anak; E. Pemenuhan Hak Anak; dan F. Perlindungan Khusus Anak.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera				Indeks Ketimpangan Gender	
		Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
			Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya	**Terlaksananya**	**Pengadaan Barang Milik**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
			Terbentuknya Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah		**Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
				elaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi	**Perempuan Kewenangan Provinsi**	
						Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**
						Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
				Lembaga Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga	**Jumlah Lembaga Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
				Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	**Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
				pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**
						Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
		Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak			**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	
			Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang		**Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			memenuhi kriteria KLA		**memenuhi kriteria KLA**	
				Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**
						Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
						Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak			**Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan**	
			Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan		**Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
				Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	**Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
					Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
			Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	**Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan	**Dokumen Pelaksanaan**	**Penyediaan Layanan bagi**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	**Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	**Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
		Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga			**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	
			Menurunkan Angka Kelahiran		**Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
				Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
			Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern		**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
				pengembangan design	**Dokumen hasil**	**Pengembangan Desain**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	**pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
						Fasilitasi kerja sama dengan stakeholde rs dan mitra kerja dalam pelaksana an advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**
						Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
			Meningkatkan Keluarga sejahtera		**Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**
				Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	**2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**21.329.909.105,10**	**21.016.983.249,48**	**21.873.418.599,74**	**22.835.697.698,38**	**23.952.512.341,86**
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**16.677.131.562,10**	**15.094.483.249,48**	**15.709.280.599,74**	**16.400.337.626,38**	**17.202.463.179,86**
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**539.205.000,00**	**539.205.000,00**	**561.204.563,00**	**585.897.562,00**	**614.547.951,00**
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.037.000,00	146.037.000,00	151.995.309,00	158.683.102,00	166.442.705,00
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	28.000.000,00	28.000.000,00	29.142.400,00	30.424.665,00	31.912.431,00
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.015.000,00	42.015.000,00	43.729.212,00	45.653.297,00	47.885.743,00
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.153.000,00	323.153.000,00	336.337.642,00	351.136.498,00	368.307.072,00

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9.509.381.769,00**	**9.509.381.769,00**	**9.897.364.544,00**	**10.332.848.583,00**	**10.838.124.877,00**
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.409.336.769,00	9.409.336.769,00	9.793.237.709,00	10.224.140.168,00	10.724.100.622,00
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.838.000,00	10.838.000,00	11.280.190,00	11.776.518,00	12.352.389,00
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	89.207.000,00	89.207.000,00	92.846.645,00	96.931.897,00	101.671.866,00
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**42.459.000,00**	**42.459.000,00**	**44.191.327,00**	**46.135.745,00**	**48.391.782,00**
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.459.000,00	42.459.000,00	44.191.327,00	46.135.745,00	48.391.782,00
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**267.778.000,00**	**267.778.000,00**	**278.703.342,00**	**290.966.289,00**	**305.194.540,00**
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	267.778.000,00	267.778.000,00	278.703.342,00	290.966.289,00	305.194.540,00
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**3.686.896.457,10**	**2.104.248.144,48**	**2.189.043.905,74**	**2.285.210.522,38**	**2.397.106.368,86**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	36.428.000,00	38.030.832,00	39.890.539,00
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	711.462.457,00	500.000.000,00	520.400.000,00	543.297.600,00	569.864.852,00
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.640.000,00	73.640.000,00	76.644.512,00	80.016.870,00	83.929.694,00
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.489.600,00	13.039.142,00	13.676.756,00
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	65.000.000,00	67.652.000,00	70.628.688,00	74.082.430,00
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.656.760.000,10	1.285.574.144,48	1.336.968.006,74	1.395.643.285,38	1.464.039.297,86
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	133.034.000,00	133.034.000,00	138.461.787,00	144.554.105,00	151.622.800,00
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**779.782.336,00**	**779.782.336,00**	**811.597.455,00**	**847.307.743,00**	**888.741.091,00**
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	529.782.336,00	529.782.336,00	551.397.455,00	575.658.943,00	603.808.665,00

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	260.200.000,00	271.648.800,00	284.932.426,00
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.227.415.000,00**	**1.227.415.000,00**	**1.277.493.532,00**	**1.333.703.247,00**	**1.398.921.335,00**
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.800.000,00	15.800.000,00	16.444.640,00	17.168.204,00	18.007.729,00
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.000.000,00	345.000.000,00	359.076.000,00	374.875.344,00	393.206.748,00
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.615.000,00	866.615.000,00	901.972.892,00	941.659.699,00	987.706.858,00
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**624.214.000,00**	**624.214.000,00**	**649.681.931,00**	**678.267.935,00**	**711.435.235,00**
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.214.000,00	199.214.000,00	207.341.931,00	216.464.975,00	227.050.112,00
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	78.060.000,00	81.494.640,00	85.479.727,00
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	364.280.000,00	380.308.320,00	398.905.396,00

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**1.752.700.000,00**	**1.972.500.000,00**	**2.052.978.000,00**	**2.143.309.032,00**	**2.248.116.839,00**
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	**280.500.000,00**	**410.000.000,00**	**426.728.000,00**	**445.504.032,00**	**467.289.177,00**
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	66.500.000,00	95.000.000,00	98.876.000,00	103.226.544,00	108.274.322,00
	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	53.000.000,00	75.000.000,00	78.060.000,00	81.494.640,00	85.479.727,00
	2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	103.500.000,00	140.000.000,00	145.712.000,00	152.123.328,00	159.562.158,00
	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	57.500.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	**1.393.700.000,00**	**1.462.500.000,00**	**1.522.170.000,00**	**1.589.145.480,00**	**1.666.854.692,00**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.02.1.02.0005 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	38.700.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1.280.000.000,00	1.300.000.000,00	1.353.040.000,00	1.412.573.760,00	1.481.648.616,00
	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	75.000.000,00	102.500.000,00	106.682.000,00	111.376.008,00	116.822.294,00
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**78.500.000,00**	**100.000.000,00**	**104.080.000,00**	**108.659.520,00**	**113.972.970,00**
	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	78.500.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**1.563.940.000,00**	**2.065.000.000,00**	**2.149.252.000,00**	**2.243.819.088,00**	**2.353.541.835,00**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**520.522.000,00**	**700.000.000,00**	**728.560.000,00**	**760.616.640,00**	**797.810.792,00**
	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	154.056.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	64.500.000,00	90.000.000,00	93.672.000,00	97.793.568,00	102.575.673,00
	2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	36.450.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	111.460.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	154.056.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**430.800.000,00**	**565.000.000,00**	**588.052.000,00**	**613.926.288,00**	**643.947.281,00**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	15.000.000,00	15.612.000,00	16.298.928,00	17.095.945,00
	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00
	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00	250.000.000,00	260.200.000,00	271.648.800,00	284.932.426,00
	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000,00	50.000.000,00	52.040.000,00	54.329.760,00	56.986.485,00
	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	**612.618.000,00**	**800.000.000,00**	**832.640.000,00**	**869.276.160,00**	**911.783.762,00**
	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	167.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	156.056.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	37.450.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.08.03.1.03.0008 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	126.056.000,00	170.000.000,00	176.936.000,00	184.721.184,00	193.754.049,00
	2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	126.056.000,00	170.000.000,00	176.936.000,00	184.721.184,00	193.754.049,00
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**257.059.094,00**	**350.000.000,00**	**364.280.000,00**	**380.308.320,00**	**398.905.396,00**
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	**257.059.094,00**	**350.000.000,00**	**364.280.000,00**	**380.308.320,00**	**398.905.396,00**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	147.544.590,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	109.514.504,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**189.278.449,00**	**270.000.000,00**	**281.016.000,00**	**293.380.704,00**	**307.727.019,00**
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**189.278.449,00**	**270.000.000,00**	**281.016.000,00**	**293.380.704,00**	**307.727.019,00**
	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	72.544.590,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	116.733.859,00	170.000.000,00	176.936.000,00	184.721.184,00	193.754.049,00
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**390.000.000,00**	**560.000.000,00**	**582.848.000,00**	**608.493.312,00**	**638.248.634,00**
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**222.000.000,00**	**310.000.000,00**	**322.648.000,00**	**336.844.512,00**	**353.316.208,00**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	150.000.000,00	210.000.000,00	218.568.000,00	228.184.992,00	239.343.238,00
	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	72.000.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**168.000.000,00**	**250.000.000,00**	**260.200.000,00**	**271.648.800,00**	**284.932.426,00**
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	168.000.000,00	250.000.000,00	260.200.000,00	271.648.800,00	284.932.426,00
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**499.800.000,00**	**705.000.000,00**	**733.764.000,00**	**766.049.616,00**	**803.509.439,00**
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**244.000.000,00**	**290.000.000,00**	**301.832.000,00**	**315.112.608,00**	**330.521.614,00**
	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	74.000.000,00	90.000.000,00	93.672.000,00	97.793.568,00	102.575.673,00
	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	170.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**255.800.000,00**	**415.000.000,00**	**431.932.000,00**	**450.937.008,00**	**472.987.825,00**
	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.000.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00
	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	15.000.000,00	15.612.000,00	16.298.928,00	17.095.945,00
	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**1.771.500.000,00**	**2.395.000.000,00**	**2.492.716.000,00**	**2.602.395.504,00**	**2.729.652.637,00**
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**229.000.000,00**	**370.000.000,00**	**385.096.000,00**	**402.040.224,00**	**421.699.989,00**
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**229.000.000,00**	**370.000.000,00**	**385.096.000,00**	**402.040.224,00**	**421.699.989,00**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	27.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	115.000.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.14.02.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	55.000.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**631.500.000,00**	**820.000.000,00**	**853.456.000,00**	**891.008.064,00**	**934.578.355,00**
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**351.500.000,00**	**460.000.000,00**	**478.768.000,00**	**499.833.792,00**	**524.275.663,00**
	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	27.500.000,00	50.000.000,00	52.040.000,00	54.329.760,00	56.986.485,00

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	110.000.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	157.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	57.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**280.000.000,00**	**360.000.000,00**	**374.688.000,00**	**391.174.272,00**	**410.302.692,00**
	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	140.000.000,00	180.000.000,00	187.344.000,00	195.587.136,00	205.151.346,00
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	140.000.000,00	180.000.000,00	187.344.000,00	195.587.136,00	205.151.346,00
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**911.000.000,00**	**1.205.000.000,00**	**1.254.164.000,00**	**1.309.347.216,00**	**1.373.374.293,00**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**552.000.000,00**	**705.000.000,00**	**733.764.000,00**	**766.049.616,00**	**803.509.441,00**
	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200.000.000,00	245.000.000,00	254.996.000,00	266.215.824,00	279.233.777,00
	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	160.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	160.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**359.000.000,00**	**500.000.000,00**	**520.400.000,00**	**543.297.600,00**	**569.864.852,00**
	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	295.000.000,00	380.000.000,00	395.504.000,00	412.906.176,00	433.097.288,00
	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
GRAND TOTAL		23.101.409.105,10	23.411.983.249,48	24.366.134.599,74	25.438.093.202,38	26.682.164.978,86

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Angka	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	80,50
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,13	89,15	89,3	89,45	89,6	89,6
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
5	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	14	14	14	14	14
6	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	71,43	78,57	85,71	92,85	100	100
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79	75,99
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,5	3,48	3,46	3,44	3,42	4,4
11	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,2
12	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,4	38,2	38	37,8	37,6	37,6
13	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,8	57,9	58	58,1	58,2	58,3
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,4	66,41	66,42	66,43	66,43	66,44
15	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	20,9	21	21,1	21,2	21,3	21,4
16	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,81	88,82	88,83	88,84	88,85
17	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,45	8,44	8,43	8,42	8,41	8,40
18	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6
19	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,72	62,7	62,74	62,75	62,76	62,77
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81	66,81

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52	89,52
22	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78	43,78

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	indeks	3,5	3,48	3,46	3,44	3,42	4,4
3	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
4	TFR (Angka Kelahiran Total)	indeks	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,2
5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	66,8
6	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,7

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode tahun 2025-2029 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana *Kerja* (Renja) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun yang sama.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi *Kalimantan* Tengah Tahun 2025-2029 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat berjalan efektif. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Palangka Raya, 22 September 2025

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19680717 199003 2 006

POHON KINERJA DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DAERAH

Kinerja Strategis Daerah

MISI 2	MISI 4	MISI 5
Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat	Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat	Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
Tujuan RPJMD 4	**Tujuan RPJMD 7**	**Tujuan RPJMD 8**
Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan	Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah	Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan
1 Indeks Modal Manusia	1 Indeks Modal Manusia	1 Indeks Pembangunan Kebudayaan
Sasaran RPJMD 10	**Sasaran RPJMD 20**	**Sasaran RPJMD 21**
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi	Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan	Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan
1 Indeks pembangunan literasi masyarakat	1 Indeks pembangunan literasi masyarakat	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama
	2 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita) (%)	2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

TUJUAN DI RENSTRA

Kinerja Urusan/ Sub Urusan

Tujuan Renstra

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Dinas P3APPKB

SASARAN PROGRAM KEGIATAN RENSTRA ESELON III

UNIT KERJA

Kinerja Operasional

Sasaran RENSTRA 1	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
1	Nilai Sakip
Sekretaris	

Sasaran Perjanjian Kinerja	
Nilai Sakip	
1	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Terlaksananya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran RENSTRA 2	
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	
4	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak
Kepala Bidang Data dan Informasi	

Sasaran Perjanjian Kinerja	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	
1	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	
1	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	Tersedianya dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	
1	Tersedianya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sasaran RENSTRA 3	
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak	
1	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang lolos Verifikasi Administrasi (VA) Tingkat Provinsi
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	

Sasaran Perjanjian Kinerja	
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang lolos Verifikasi Administrasi (VA) Tingkat Provinsi	
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
1	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sasaran RENSTRA 4	
Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
2	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	
3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak
Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	

Sasaran Perjanjian Kinerja	
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
1	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	
1	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	
1	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sasaran RENSTRA 5	
Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga	
1	Angka kelahiran total/ Total Fertility Rate (TFR)
2	Angka kelahiran remaja umur 15-29 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)
3	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
6	Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)
7	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
8	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
9	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
10	Indeks Lansia Berdaya
11	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
12	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Sasaran Perjanjian Kinerja	
Angka kelahiran total/ Total Fertility Rate (TFR)	
Angka kelahiran remaja umur 15-29 tahun (Age Specific Fertility Rate/	
Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	
1	Terlaksananya Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	
Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)	
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	
1	Terlaksananya Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	
Indeks Lansia Berdaya	
Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	
1	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

CASCADING POHON KINERJA DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sasaran RPJMD 10

Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transformasi Ekonomi

	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	74,27	75,95	77,6	79,3	80,97	82,65

Sasaran RPJMD 20

Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan

	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122,00	109	97	86	77	75
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	20,6	18,80	17,2	15,50	14,20	14,00

Sasaran RPJMD 21

Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi kesehatan

	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,76 - 78,79	79,12 - 79,19	79,47 - 79,59	79,82 - 79,99	80,18 - 80,40	80,54 - 80,81
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,89	73,56	74,22	74,89	75,55	76,22

SASARAN KEPALA DAERAH

Sasaran RENSTRA 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Angka	80,3	80,4	80,4	80,5	80,5	80,5

Sasaran RENSTRA 2

Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

	Indikator	satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,13	89,15	89,3	89,45	89,6	89,6
2	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
3	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
4	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	14	14	14	14	14

Sasaran RENSTRA 3

Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak

	Indikator	satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang lolos Verifikasi Administrasi (VA) Tingkat Provinsi	persen	71,43	78,57	85,71	92,85	100	100
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79	76

Sasaran RENSTRA 4

Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

	Indikator	satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
2	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90

Sasaran RENSTRA 5

Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga

	Indikator	satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	persen	90	90	90	90	90	90
2	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	persen	90	90	90	90	90	90
3	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,8	57,9	58	58,1	58,2	58,3
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,4	66,41	66,42	66,43	66,43	66,44
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	20,9	21	21,1	21,2	21,3	21,4
6	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,81	88,82	88,83	88,84	88,85
7	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,45	8,44	8,43	8,42	8,41	8,4
8	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6
9	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	indeks	62,72	62,73	62,74	62,75	62,76	62,77
10	Indeks Lansia Berdaya	indeks	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81	66,81
11	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	indeks	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52	89,52
12	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	persen	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78	43,78

SASARAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
1	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp539.205.000
Anggaran Tahun 2027		Rp539.205.000
Anggaran Tahun 2028		Rp561.204.563
Anggaran Tahun 2029		Rp585.897.562
Anggaran Tahun 2030		Rp614.547.951

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp9.509.381.769
Anggaran Tahun 2027		Rp9.509.381.769
Anggaran Tahun 2028		Rp9.897.364.544
Anggaran Tahun 2029		Rp10.332.848.583
Anggaran Tahun 2030		Rp10.838.124.877

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
3	Terlaksananya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp42.459.000
Anggaran Tahun 2027		Rp42.459.000
Anggaran Tahun 2028		Rp44.191.327
Anggaran Tahun 2029		Rp46.135.745
Anggaran Tahun 2030		Rp48.391.782

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp267.778.000
Anggaran Tahun 2027		Rp267.778.000
Anggaran Tahun 2028		Rp278.703.342
Anggaran Tahun 2029		Rp290.966.289
Anggaran Tahun 2030		Rp305.194.540

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp3.686.896.457,10
Anggaran Tahun 2027		Rp2.104.248.144,48
Anggaran Tahun 2028		Rp2.189.043.905,74
Anggaran Tahun 2029		Rp2.285.210.522,38
Anggaran Tahun 2030		Rp2.397.106.368,86

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp779.782.336
Anggaran Tahun 2027		Rp779.782.336
Anggaran Tahun 2028		Rp811.597.455
Anggaran Tahun 2029		Rp847.307.743
Anggaran Tahun 2030		Rp888.741.091

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
7	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp1.227.415.000
Anggaran Tahun 2027		Rp1.227.415.000
Anggaran Tahun 2028		Rp1.277.493.532
Anggaran Tahun 2029		Rp1.333.703.247
Anggaran Tahun 2030		Rp1.398.921.335

Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi (Sekretaris)

	Indikator	
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Anggaran Tahun 2026		Rp624.214.000
Anggaran Tahun 2027		Rp624.214.000
Anggaran Tahun 2028		Rp649.681.931
Anggaran Tahun 2029		Rp678.267.935
Anggaran Tahun 2030		Rp711.435.235

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan)

	Indikator	
1	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
Anggaran Tahun 2026		Rp280.500.000
Anggaran Tahun 2027		Rp410.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp426.728.000
Anggaran Tahun 2029		Rp445.504.032
Anggaran Tahun 2030		Rp467.289.177

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan)

	Indikator	
2	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	
Anggaran Tahun 2026		Rp1.393.700.000
Anggaran Tahun 2027		Rp1.462.500.000
Anggaran Tahun 2028		Rp1.522.170.000
Anggaran Tahun 2029		Rp1.589.145.480
Anggaran Tahun 2030		Rp1.666.854.692

Program Perlindungan Perempuan (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga)

	Indikator	
1	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
Anggaran Tahun 2026		Rp612.618.000
Anggaran Tahun 2027		Rp800.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp832.640.000
Anggaran Tahun 2029		Rp869.276.160
Anggaran Tahun 2030		Rp911.783.762

Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga)

	Indikator	
2	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
Anggaran Tahun 2026		Rp257.059.094
Anggaran Tahun 2027		Rp350.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp364.280.000
Anggaran Tahun 2029		Rp380.308.320
Anggaran Tahun 2030		Rp398.905.396

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (Kepala Bidang Data dan Informasi)

	Indikator	
1	Tersedianya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Prov	
Anggaran Tahun 2026		Rp189.278.449
Anggaran Tahun 2027		Rp270.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp281.016.000
Anggaran Tahun 2029		Rp293.380.704
Anggaran Tahun 2030		Rp307.727.019

Program Pemenuhan Hak Anak (Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak)

	Indikator	
1	Tersedianya dokumen pelaksanaan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan provinsi	
Anggaran Tahun 2026		Rp222.000.000
Anggaran Tahun 2027		Rp310.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp322.648.000
Anggaran Tahun 2029		Rp336.844.512
Anggaran Tahun 2030		Rp353.316.208

Program Perlindungan Perempuan (Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)

	Indikator	
1	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
Anggaran Tahun 2026		Rp520.522.000
Anggaran Tahun 2027		Rp700.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp728.560.000
Anggaran Tahun 2029		Rp760.616.640
Anggaran Tahun 2030		Rp797.810.792

Program Perlindungan Perempuan (Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)

	Indikator	
2	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
Anggaran Tahun 2026		Rp430.800.000
Anggaran Tahun 2027		Rp565.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp588.052.000
Anggaran Tahun 2029		Rp613.926.288
Anggaran Tahun 2030		Rp643.947.281

Program Perlindungan Khusus Anak (Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)

	Indikator	
1	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
Anggaran Tahun 2026		Rp244.000.000
Anggaran Tahun 2027		Rp290.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp301.832.000
Anggaran Tahun 2029		Rp315.112.608
Anggaran Tahun 2030		Rp330.521.614

Program Perlindungan Khusus Anak (Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)

	Indikator	
2	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
Anggaran Tahun 2026		Rp255.800.000
Anggaran Tahun 2027		Rp415.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp431.932.000
Anggaran Tahun 2029		Rp450.937.008
Anggaran Tahun 2030		Rp472.987.825

Program Pemenuhan Hak Anak (Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak)

	Indikator	
1	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
Anggaran Tahun 2026		Rp168.000.000
Anggaran Tahun 2027		Rp250.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp260.200.000
Anggaran Tahun 2029		Rp271.648.800
Anggaran Tahun 2030		Rp284.932.426

Program Pengendalian Penduduk (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

	Indikator	
1	Terlaksananya Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	
Anggaran Tahun 2026		Rp229.000.000
Anggaran Tahun 2027		Rp370.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp385.096.000
Anggaran Tahun 2029		Rp402.040.224
Anggaran Tahun 2030		Rp421.699.989

Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

	Indikator	
1	Terlaksananya Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
Anggaran Tahun 2026		Rp351.500.000
Anggaran Tahun 2027		Rp460.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp478.768.000
Anggaran Tahun 2029		Rp499.833.792
Anggaran Tahun 2030		Rp524.275.663

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)

	Indikator	
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Anggaran Tahun 2026		Rp552.000.000
Anggaran Tahun 2027		Rp705.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp733.764.000
Anggaran Tahun 2029		Rp766.049.616
Anggaran Tahun 2030		Rp803.509.441

Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

	Indikator	
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
Anggaran Tahun 2026		Rp280.000.000
Anggaran Tahun 2027		Rp360.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp374.688.000
Anggaran Tahun 2029		Rp391.174.272
Anggaran Tahun 2030		Rp410.302.692

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)

	Indikator	
2	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	
Anggaran Tahun 2026		Rp359.000.000
Anggaran Tahun 2027		Rp500.000.000
Anggaran Tahun 2028		Rp520.400.000
Anggaran Tahun 2029		Rp543.297.600
Anggaran Tahun 2030		Rp569.864.852

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

dr. LINAE VICTORIA ADEN. M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No.11 Telp.(0536) 3224547 Palangka Raya 73112
Website: https://dp3appkb.kalteng go.id/e-Mail : dp3appkb@kalteng.go.id

TINDAK LANJUT RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029 BERDASARKAN HASIL REVIU YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

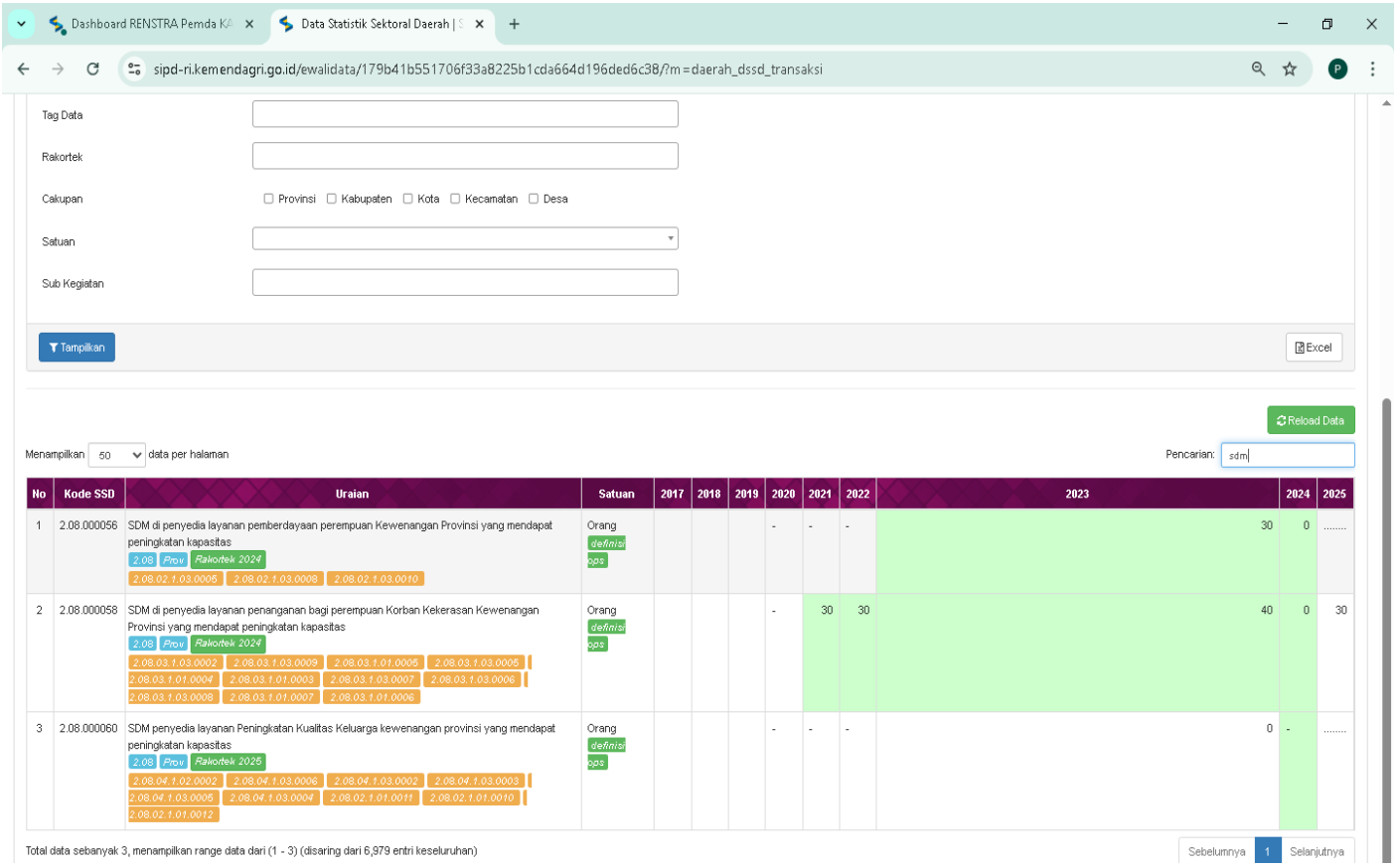
Berikut ini adalah Catatan Hasil Reviu (CHR) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 yang ada di halaman 4 tentang ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (kesesuaia penetapan target sub kegiatan dengan data statistik sektoral daerah). Berdasarkan Kertas Kerja (KKR) 7 terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Data pada kolom Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 belum disajikan/diinput pada aplikasi, sehingga tidak dapat dilakukan pembangdingan antara Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)dengan target sub kegiatan (T0) pada Renstra Tahun 2025-2029.
b. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 menjadi acuan data pada Renstra 2025-2029.
c. Hasil komfirmasi lisan yang diperoleh dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa data akan diinput setelah dilakukan Koordinasi dengan Bidang Teknis Terkait (Bidang Data dan Informasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah) dan DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Tengah pada aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIPD) e-Reviu.
d. Disarankan agar Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar berkoordinasi dengan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan input Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024 supaya diselaraskan dengan Target (T0) pada Renstra Tahun 2025-2029.

Berdasarkan saran dari Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi untuk melakukan pengisian Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Tahun 2024.

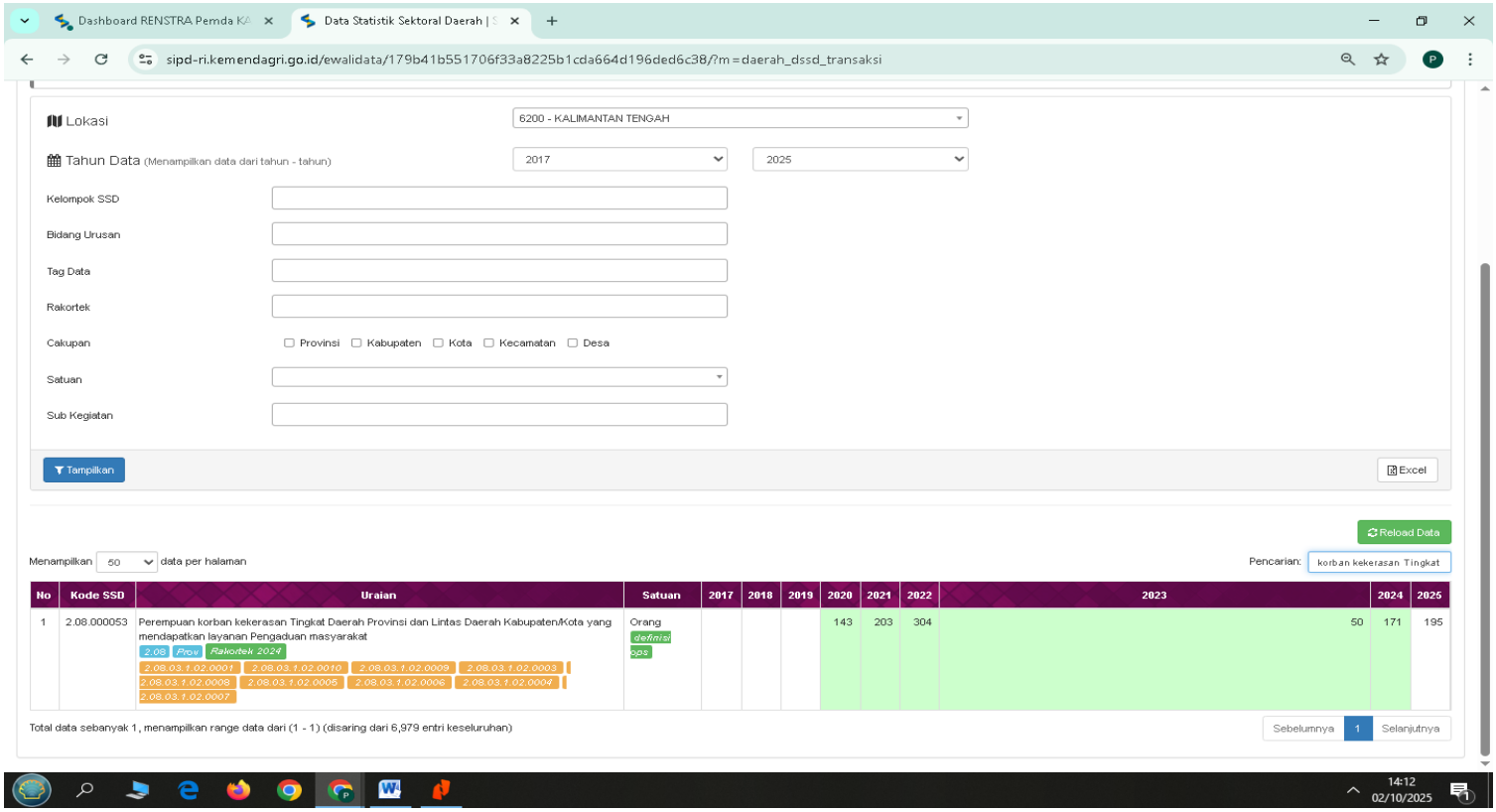
Demikian Tindak Lanjut yang dilakukan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk dijadikan bahan penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Satuan DSSD belum selaras dengan Satuan yang ada Pada Resntra Perangkat Daerah



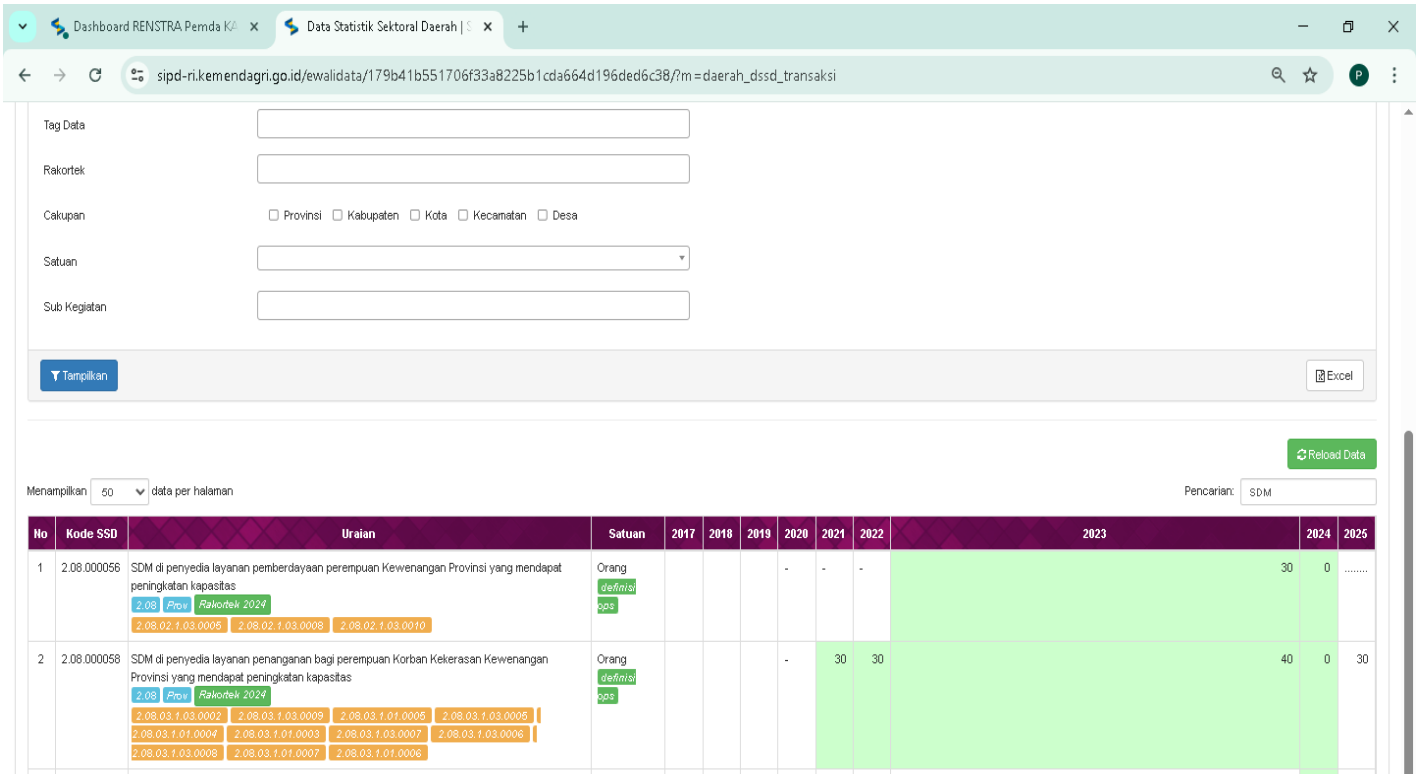
BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKT
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD
						T0	T1	T2	T3	T4	T5	
			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas
			Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas
			monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan	1	1	2	3	4	5	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas

Data Tahun 2024-2025 sudah Terisi



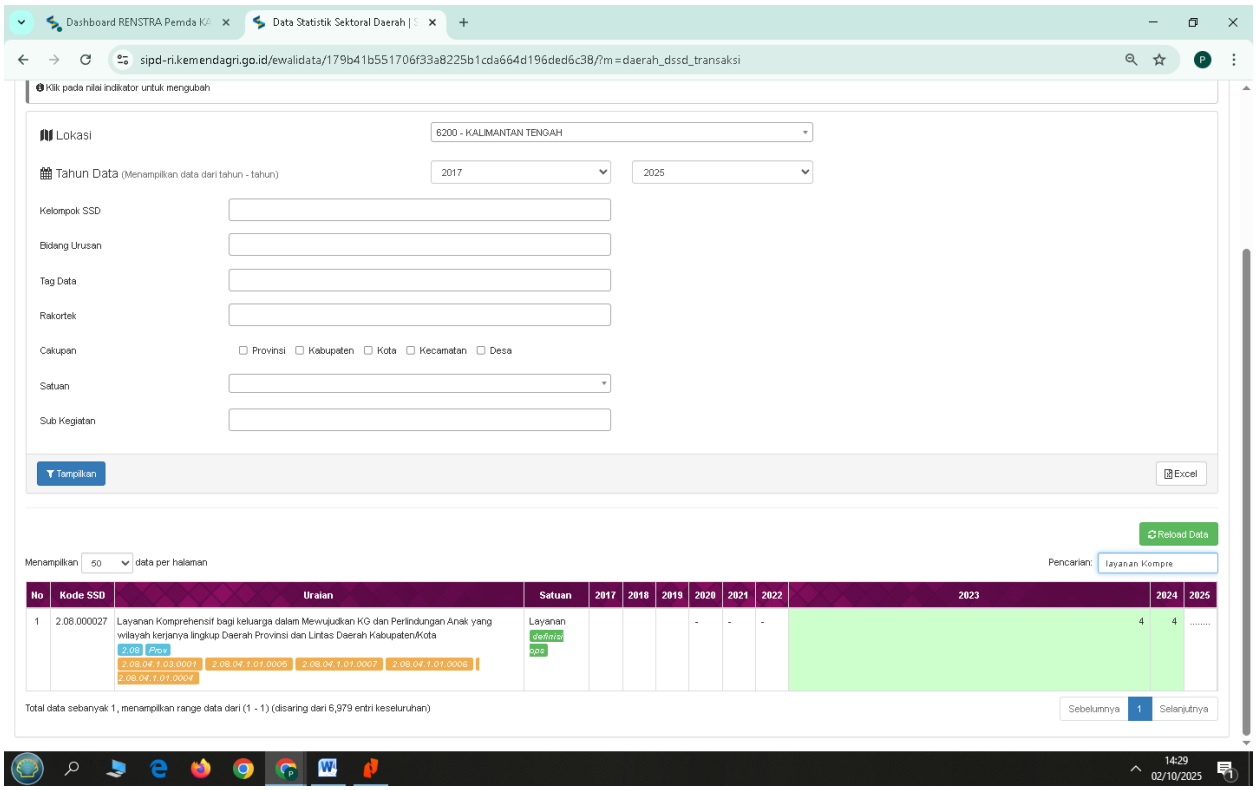
NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD												DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN							NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5							SELARAS	TIDAK SELARAS	
8				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	150	150	170	180	190	200	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.
9				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10	11	15	20	30	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.

Satuan yang ditetapkan dan di gunakan pada Aplikas Ewalidata adalah *orang* sedang kan Pada Renstra PD berbeda



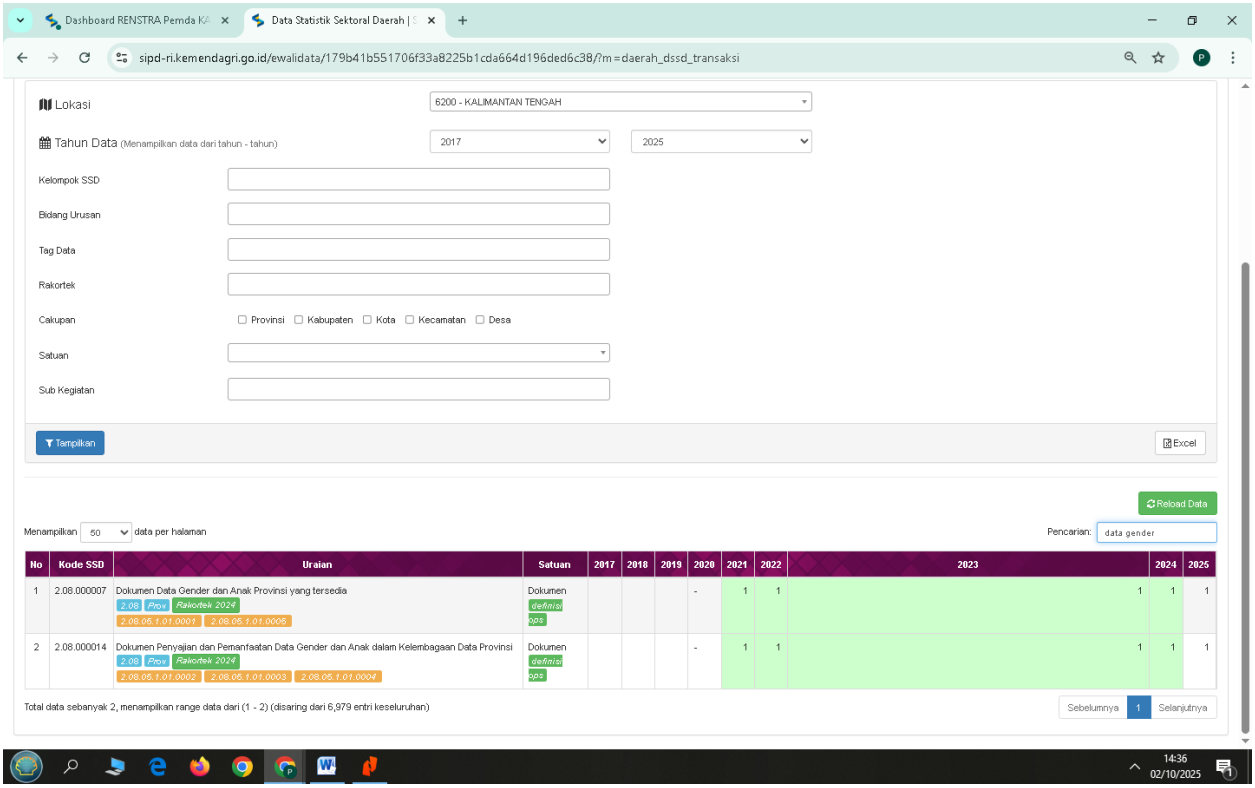
RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU		
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN
					T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".
		Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang	25	25	30	35	40	45	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".
		monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	laporan	1	1	1	3	4	5	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".
		Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Kegiatan	3	4	5	6	7	8	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan

Untuk Satuan pada Ewalidata Belum sesuai dengan yang ada pada aplikas Renstra PD. Sedang data pada tahun 2024 sudah terisi pada Aplikasi Ewalidata



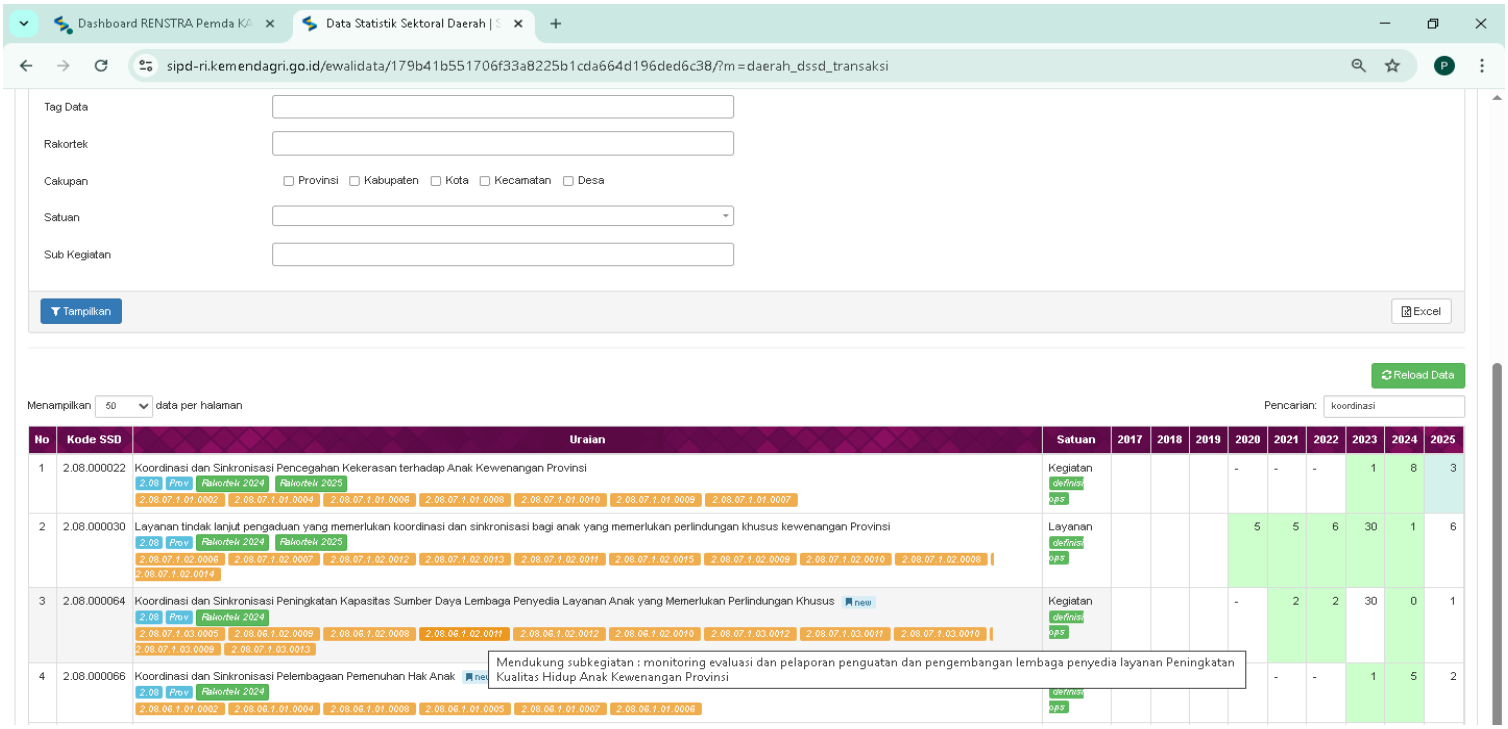
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keselaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0	4			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD, dan data tahun 2024 belum terisi seharusnya "4" layanan.
		Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	50	50	50	50	50	50	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0	4			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD, dan data tahun 2024 belum terisi seharusnya "4" layanan.

Untuk Data Capaian Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi dan Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia Sudah Terisi.



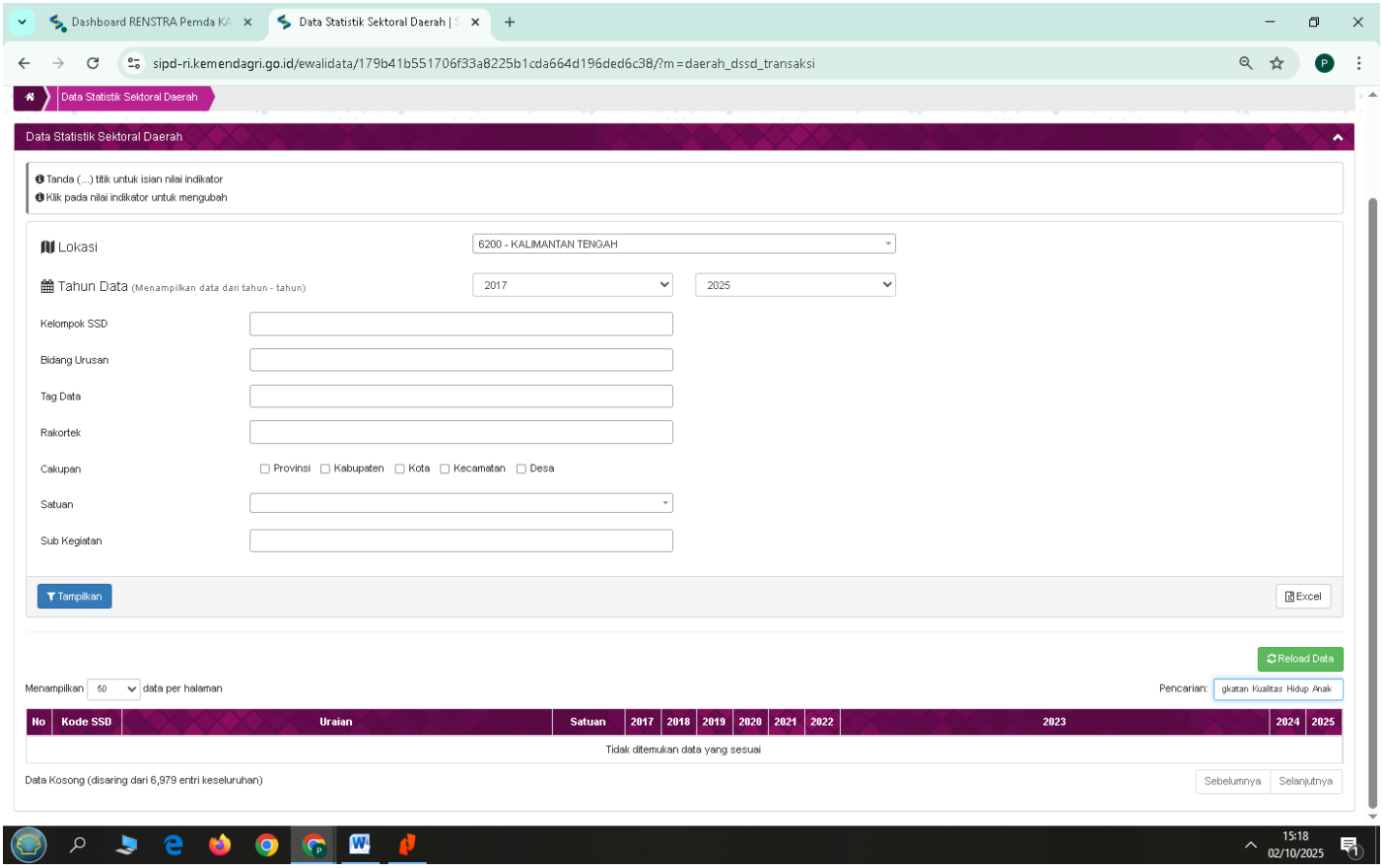
BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN
						T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS	
				PPA															
			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia		1	1			Tidak Selaras	Catatan Data capaian 2024 belum terisi.
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		1	1			Tidak Selaras	Catatan Data capaian 2024 belum terisi.

Untuk Data Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2024 Sudah Terisi pada Aplikasi Ewalidata



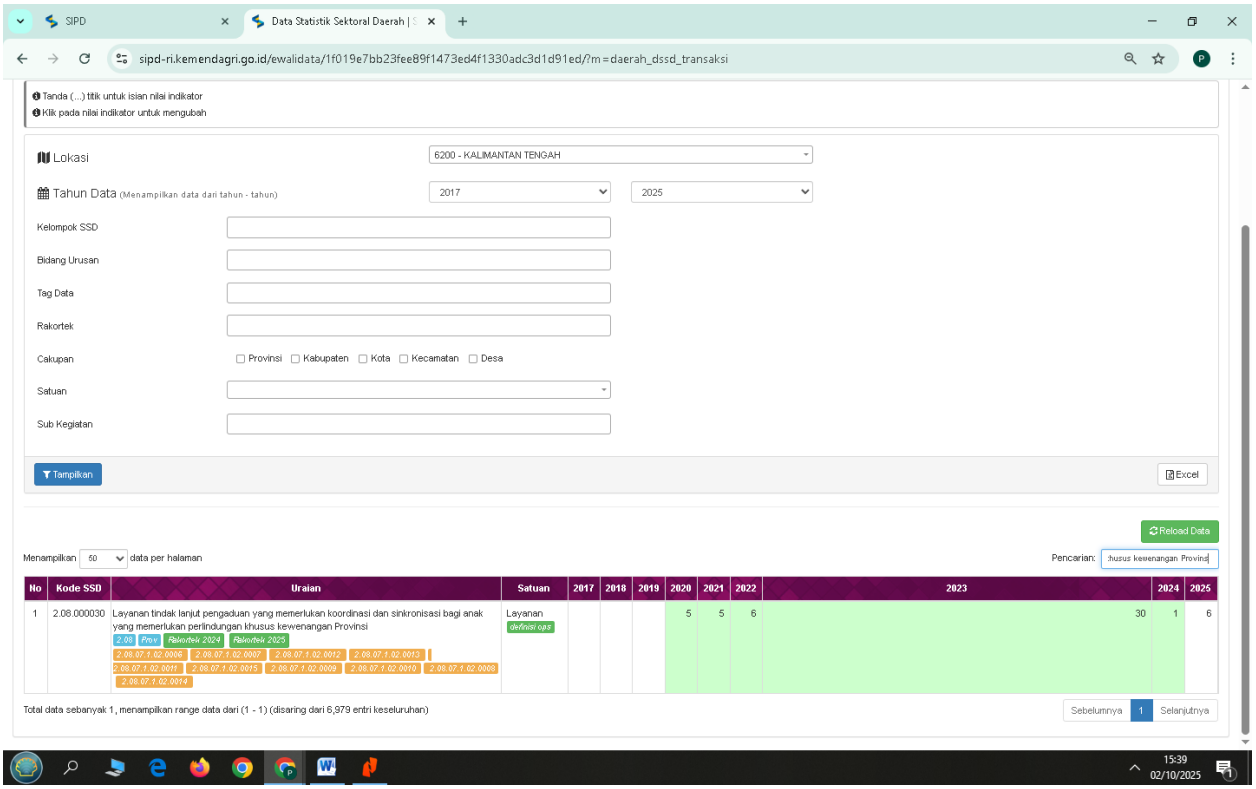
BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
						T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
				PPA																
			Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia		1	1			Tidak Selaras	Catatan Data capaian 2024 belum terisi.	Rekomen Agar data DS disesuaikan d sumber data p Data Statistik Sektoral Daer
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	0	50	50	50	50	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak		0	1			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "kegiatan" dan capaian tahun 2024 belum terisi	Rekomen Agar data DS disesuaikan d sumber data p Data Statistik Sektoral Daer
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Laporan	2	2	2	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak		0	1			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "kegiatan" dan capaian tahun 2024 belum terisi	Rekomen Agar data DS disesuaikan d sumber data p Data Statistik Sektoral Daer

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi. dan Data nama DSSD dalam Ewalidata Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tidak ada dalam DSSD



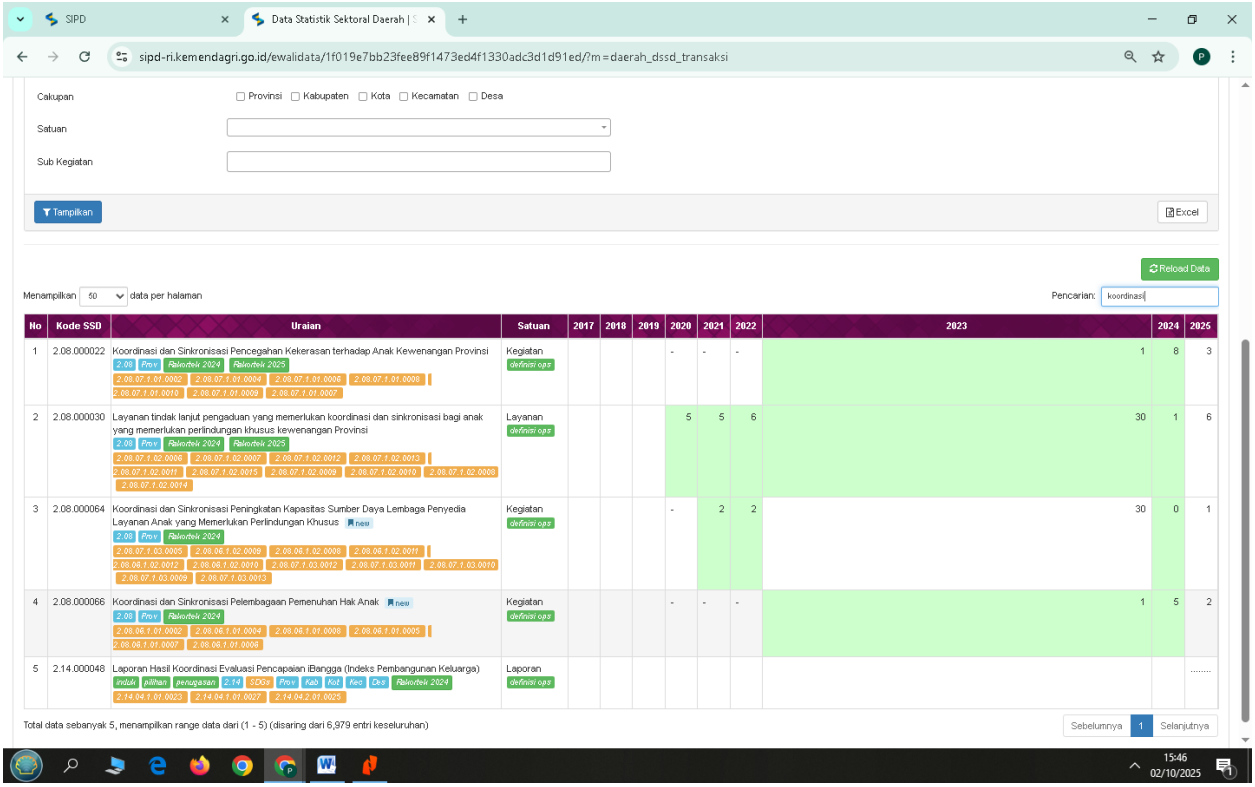
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		-	-			Tidak Selaras	Catatan tidak ada dalam DSSD	Rekomen agar menyajik data sesuai d data dukung y valid.

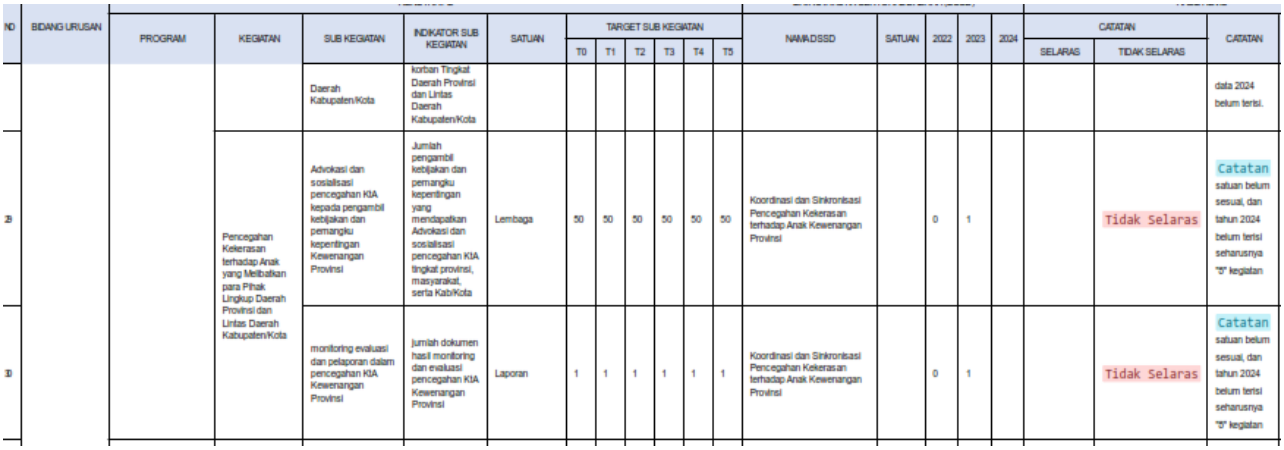
Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi Sudah terisi



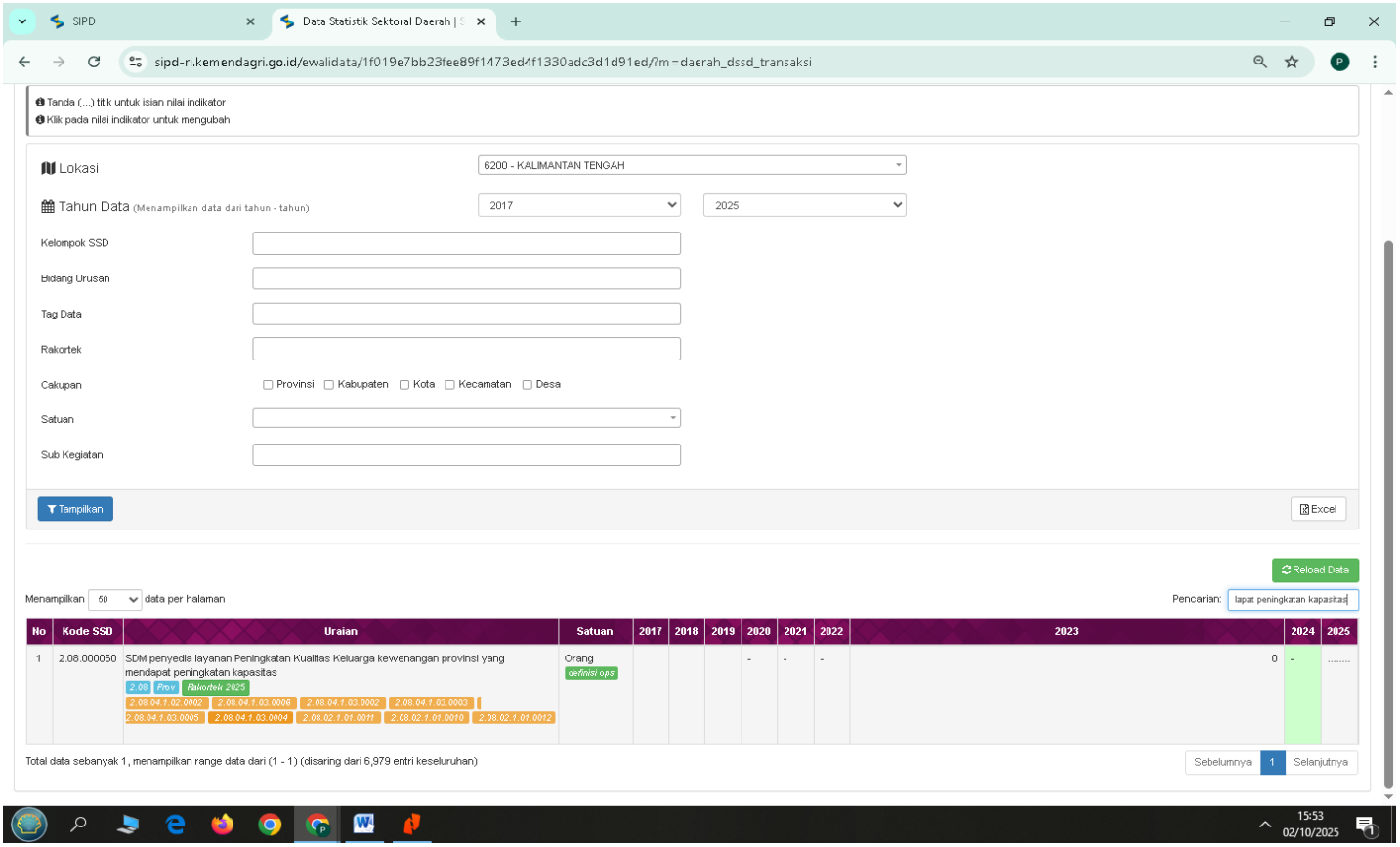
BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN
						T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS	
	KHUSUS ANAK	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi							Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	35	35	36	35	40	42	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.
			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10	12	15	15	20	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.
			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	5	6	5	10	12	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.
			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan	Orang	100	100	100	100	100	100	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan

Untuk Program Perlindungan Khusus Anak pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada data statistik Sektoral nama DSSD nya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi sudah terisi



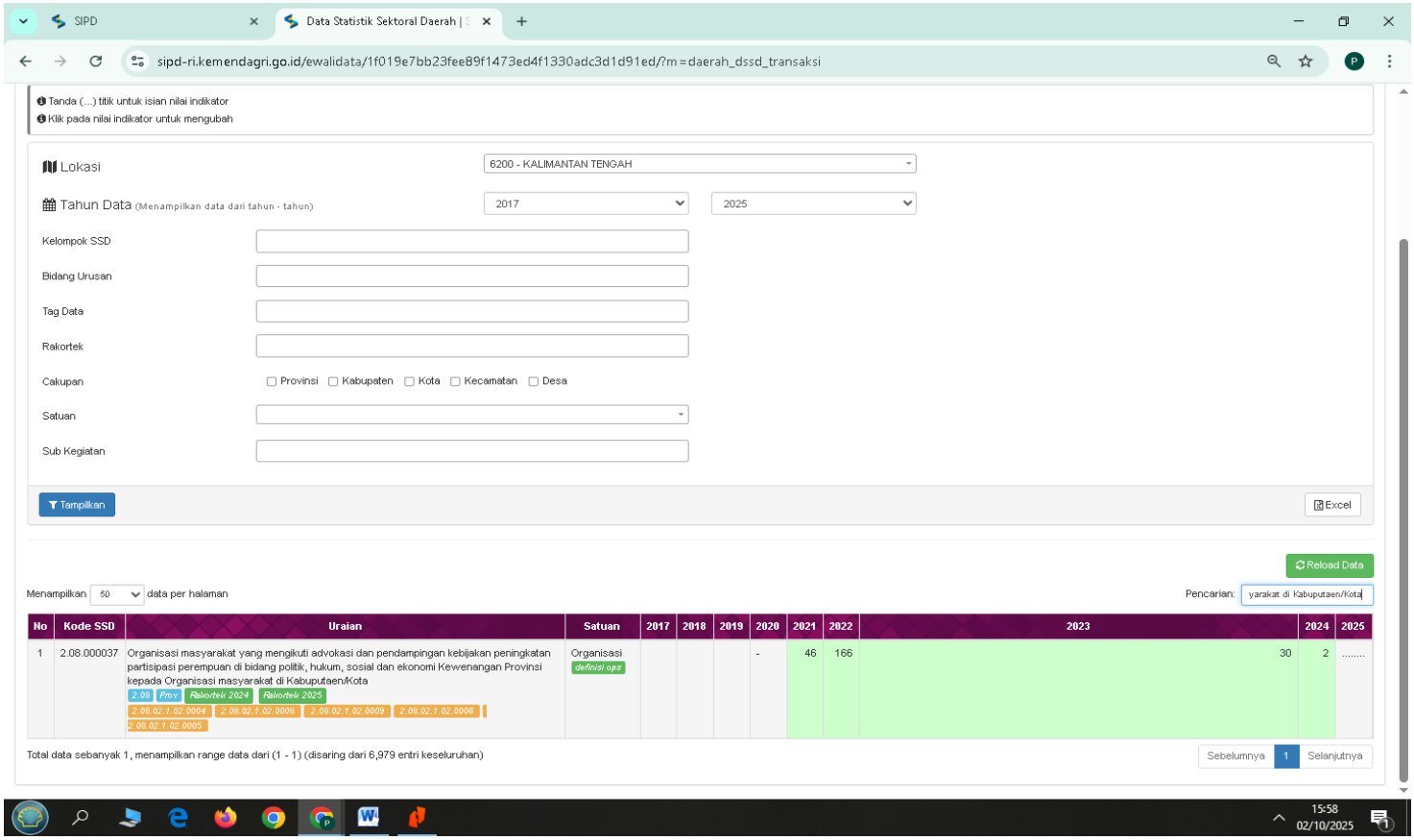


NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS	
				Daerah Kabupaten/Kota	Korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															data 2024 belum terisi.
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	50	50	50	50	50	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		0	1			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai, dan tahun 2024 belum terisi seharusnya "5" kegiatan
				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		0	1			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai, dan tahun 2024 belum terisi seharusnya "5" kegiatan



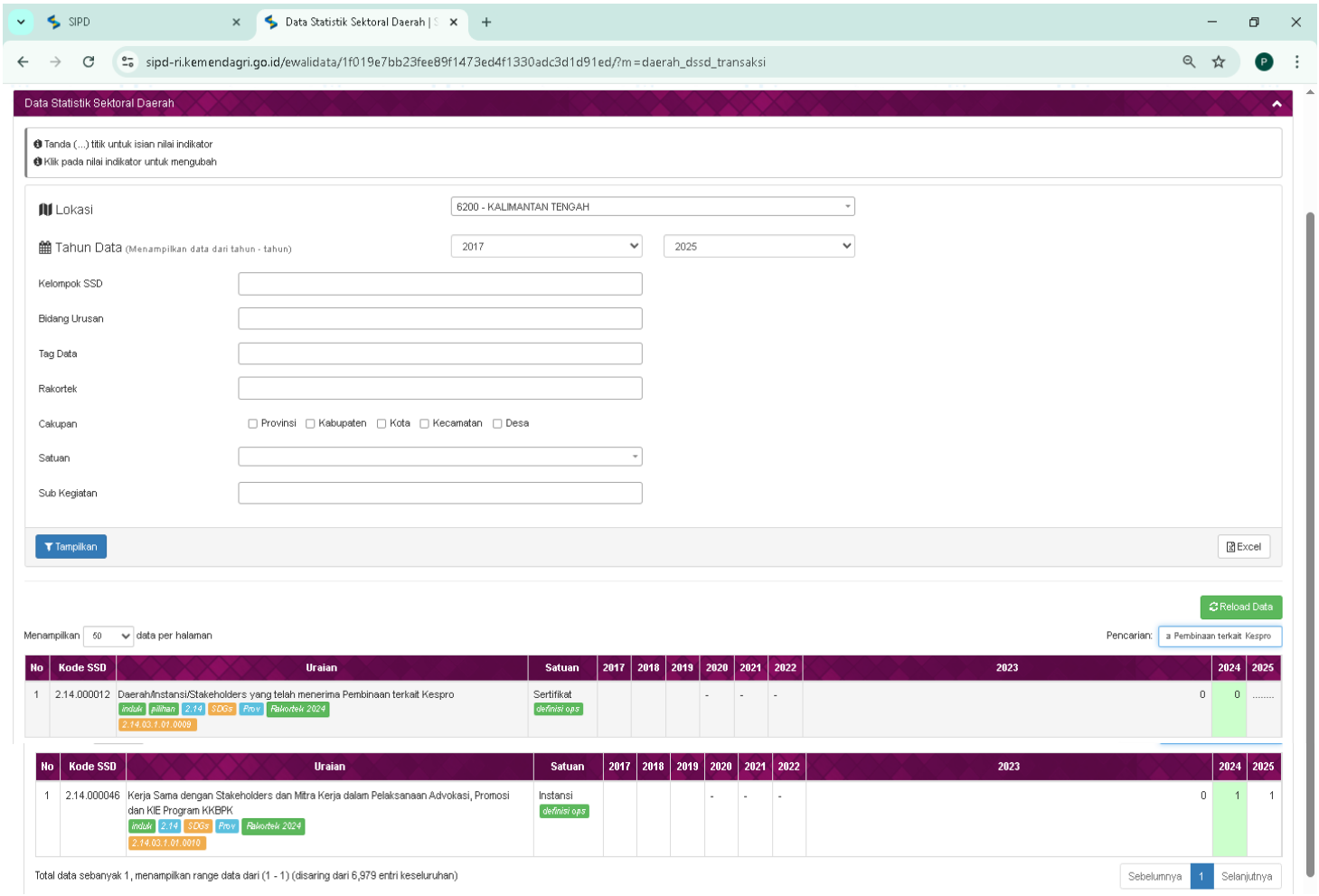
NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
33				Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	orang	100	100	60	65	70	100	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomen -
34				Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	40	50	50	50	60	65	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		-	-			Tidak Selaras	Catatan satuan belum selaras dengan DSSD.	Rekomen Agar data DS disesuaikan d sumber data Data Statistik Sektoral Daer

Untuk KEGIATAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Pada Aplikasi Ewalidata pada nama DSSD Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota



36			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	40	50	55	60	65	70	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota		166	30			Tidak Selaras	Catatan satuan belum selaras dengan DSSD.	Rekomend Agar data DS disesuaikan di sumber data p Data Statistik Sektoral Daer
37				peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	50	50	60	70	55	100	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota		166	30			Tidak Selaras	Catatan satuan belum selaras dengan DSSD.	Rekomend Agar data DS disesuaikan di sumber data p Data Statistik Sektoral Daer

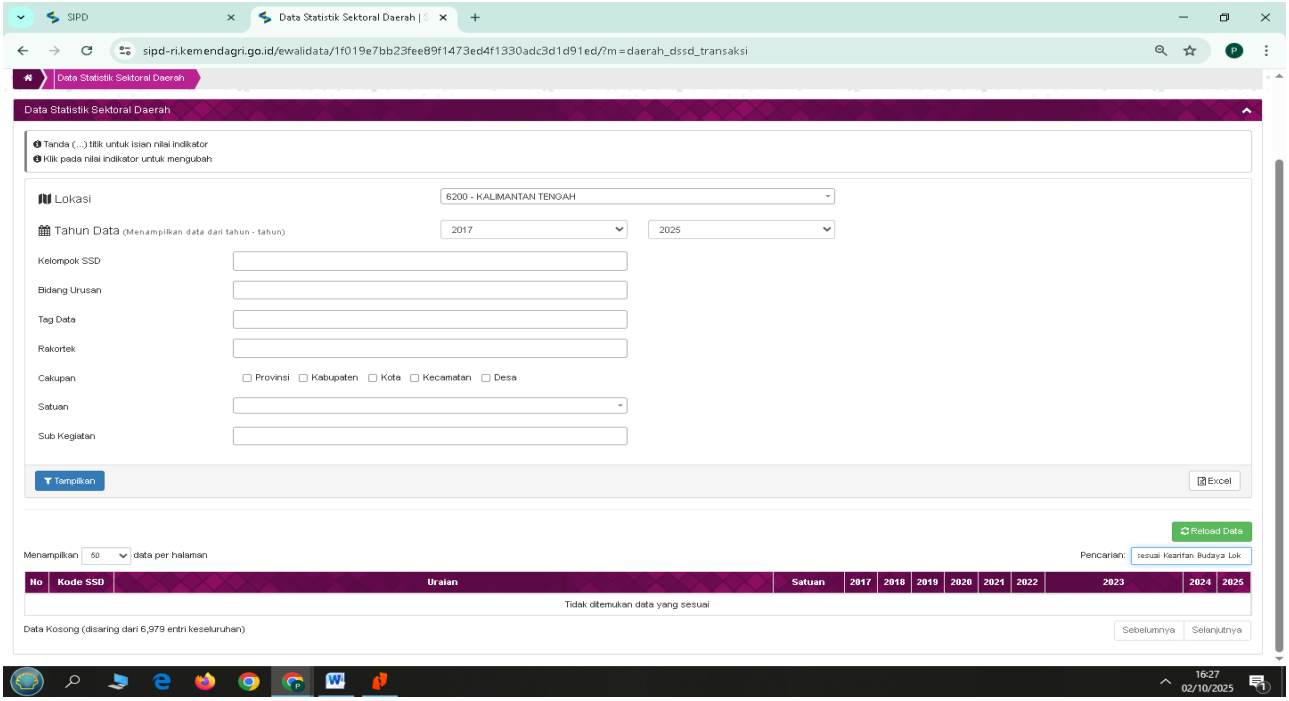
Untuk PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pada Sub Kegaiatan Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan dan Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana, di dalama Data Statistik Sktoral belum selaras demngan Renstra PD.



BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
						T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
		Budaya Lokal	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	Daerah	1	1	1	2	2	2	Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan terkait Kespro		-	-			Tidak Selaras	Catatan Satuan tidak sesuai, seharusnya "sertifikat"	Rekomen Agar data DSS disesuaikan di sumber data p Data Statistik Sektoral Daer
			Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	1	1	1	2	2	2	Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK		-	-			Tidak Selaras	Catatan Belum selaras, Seharusnya satuan "Instansi"	Rekomen Agar data DSS disesuaikan di sumber data p Data Statistik Sektoral Daer

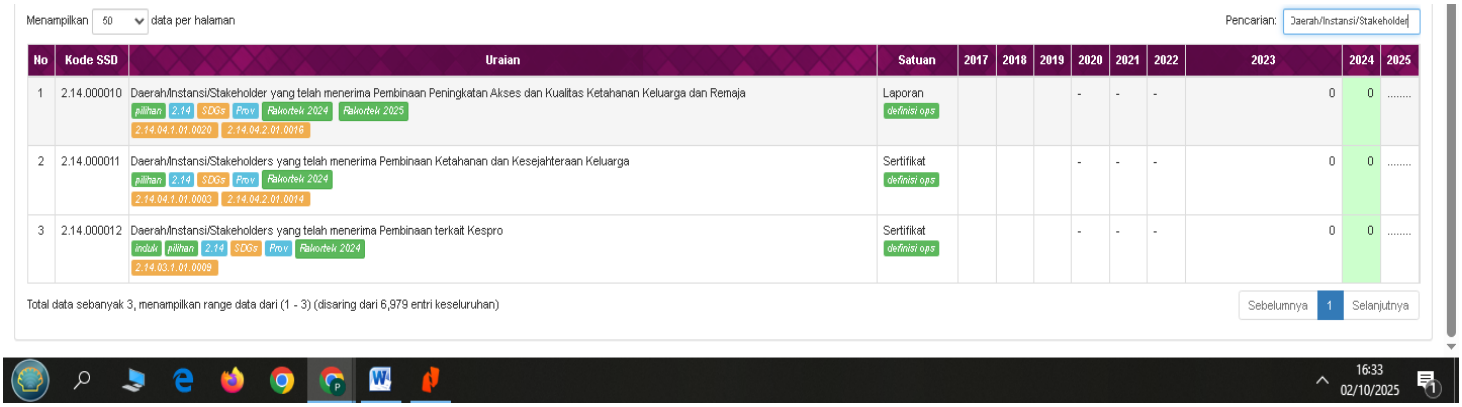
A. Pada PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) dan SUB KEGIATAN Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan belum selaras, tidak ada pada DSSD

B. Pada Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja dan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan



45	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran	Keluarga		700	700	700	700	700	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	-			Tidak Selaras	Catatan belum selaras, tidak ada pada	Rekomend Agar data DSS disesuaikan di sumber data p

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
				Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas															DSSD.	Data Statistik Sektoral Daera
46			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Daerah	1	1	1	2	2	2	Daerah/Instansi/Stakeholder yang telah menerima Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		-	-			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya "Laporan".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan di sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
47				Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Daerah	1	1	1	2	2	2	Daerah yang telah menerima Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		-	-			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya "Laporan".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan di sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
48			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota	14	14	14	14	14	14	Kampung KB yang telah menerima Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga		-	-			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai, seharusnya "kampung KB"	Rekomend Agar data DSS disesuaikan di sumber data p Data Statistik Sektoral Daera



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman https://inspektorat.kalteng.go.id, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU
(L H R)
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2025 – 2029

NOMOR : 700/1.2.1/199/LHR/2025/INSP
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Alamat : Jalan Yos Sudarso. No. 6 Palangka Raya 73112 ☎/fax. (0536) 3222359
Email : inspektorat@kalteng.go.id website : www.inspektorat.kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 - 2029

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
   Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.
   Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil reviu dari 160 Sub Kegiatan terdapat 64 catatan yang selaras dan 96 catatan yang tidak selaras. (sebagaimana yang tertuang dalam lampiran/ KKR 1).
   b. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah

pemangku urusan), berdasarkan hasil reviu dari 4 indikator kinerja 4 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras (sebagaimana yang tertuang dalam lampiran/ KKR 2).

c. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 :
   1) Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan hasil reviu dinyatakan 0 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras.
   2) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan hasil reviu dari 10 Program dinyatakan 10 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras (sebagaimana yang tertuang dalam lampiran/ KKR 4).

d. Kesesuaian antara target kinerja Rancangan Akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024 :
   1) Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja periode sebelumnya, berdasarkan hasil reviu dari 3 IKU dinyatakan 1 catatan yang selaras dan 2 catatan yang tidak selaras (sebagaimana yang tertuang dalam lampiran/KKR 5).
   2) Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode Sebelumnya, berdasarkan hasil reviu dari 1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dinyatakan 0 catatan yang selaras dan 1 catatan yang tidak selaras (sebagaimana yang tertuang dalam lampiran/KKR 6).

e. Kesesuaian dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Periode 2025 – 2029 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil reviu dari 49 Sub kegiatan terdapat 9 catatan yang selaras dan 40 catatan yang tidak selaras (sebagaimana yang tertuang dalam lampiran/KKR 7).

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1/1811/IJ tentang Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan Aplikasi *e-reviu* SIPD.

4. Surat Tugas dari Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP Tanggal 26 Agustus 2025 untuk melakukan Reviu atas Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029.

1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 adalah Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera.
2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, terdiri dari:
   a. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga;
   b. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak;
   c. Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak;
   d. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 :
   a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
   b. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng;
   c. Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi;
   d. Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak;
   e. Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang lolos Verifikasi Administrasi (VA) Tingkat Provinsi;
   f. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif;
   g. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif;
   h. Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR);
   i. Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR);
   j. Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK);
   k. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevelance Rate*/ mCPR);
   l. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP);
   m. Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Met Need);
   n. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD);
   o. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*).

III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
4. RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas :

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
   a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
   b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
   a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
   b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen RPJMD adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029, RENSTRA Perangkat Daerah 2025 – 2029, dan dokumen terkait lainnya.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.
3. Pengujian terbatas melalui analisa dokumen terkait.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebelum finalisasi laporan reviu atas rancangan akhir RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025 - 2029.

VI. Gambaran Umum

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah BAB XVIII Pasal 629 dan Pasal 630 menyatakan bahwa tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendudukdan keluarga berencana;
d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
i. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
j. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

VII. Uraian Hasil Reviu

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029, dinyatakan 64 catatan yang selaras dan 96 catatan yang tidak selaras. Catatan 96 *item* tidak selaras sebagaimana yang dimaksud merujuk pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari Kegiatan dan Subkegiatan kesekretariatan berupa dukungan operasional dan administrasi instansi bersangkutan, yang dinilai tidak berhubungan langsung dengan upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra PD terkait. Rumusan Tujuan dalam Rencana Strategis Periode 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera. Sedangkan Sasaran dalam Renstra PD terdiri dari :
   a) Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga;
   b) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak;
   c) Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak;
   d) Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan.

   Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun Program/Kegiatan/Subkegiatan yang selaras atau berhubungan langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah bersangkutan.

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan Target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan), hasil reviu menyatakan 4 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras. Dengan demikian dapat disimpulkan telah sesuai.

3. Konsistensi dan Keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 :
   a) Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hasil reviu menyatakan 0 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras. Hal ini karena Program urusan pemerintahan yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk dalam Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029.

   b) Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hasil reviu menyatakan 10 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras, dengan demikian dapat disimpulkan telah sesuai.

4. Kesesuaian antara target kinerja Rancangan Akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024 :
   a) Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja periode sebelumnya, hasil reviu menyatakan 1 catatan yang selaras dan 2 catatan yang tidak selaras. Catatan 2 *item* yang tidak selaras tersebut merujuk pada isian Baseline IKU pada Renstra belum di *input* ke sistem SIPD-RI.
      Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar dilakukan *input* data *Baseline* IKU pada SIPD-RI.

   b) Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode Sebelumnya, hasil reviu menyatakan 0 catatan yang selaras dan 1 catatan yang tidak selaras. Catatan 1 item yang tidak selaras tersebut merujuk pada Penetapan target

      IKD (Indikator Kinerja Daerah) Tahun 0 sampai dengan Tahun 5 belum selaras dengan hasil capaian periode sebelumnya.

      Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar menyusun dan menetapkan target IKD dengan berdasarkan hasil evaluasi dan pencapaian tahun sebelumnya.

5 Kesesuaian dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Periode 2025 – 2029 Provinsi Kalimantan Tengah, hasil reviu menyatakan 9 catatan yang selaras dan 40 catatan yang tidak selaras. Catatan 40 *item* yang tidak selaras tersebut merujuk pada penetapan satuan indikator capaian kinerja yang digunakan belum selaras dan relevan dengan satuan indikator Subkegiatan Renstra dengan sumber data DSSD. DSSD yang

dijadikan rujukan adalah data yang diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (*https://www.sipd.go.id/ewalidata*).

Direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah agar menyesuaikan satuan indikator capaian kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja Subkegiatan dengan memperhatikan keselarasan dan relevansi satuan capaian DSSD tahunan. DSSD yang digunakan disesuaikan dengan sumber data pada Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (*https://www.sipd.go.id/ewalidata*).

VIII. Apresiasi

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Palangka Raya, 17 September 2025

Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

EKO SULISTIONO, S.STP, M.AP, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19791107 199810 1 001

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Disusun Oleh/Tanggal	LERRY FEBRIAN LITIK, SH
	Direviu Oleh/Tanggal	DESIAMI RIFKA R., S.Kom, CFrA
	Direviu Oleh/Tanggal	ALI FAKHRURROZI. H, SPi, CFrA

Uraian Catatan Hasil Reviu **)

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor (selaras SPT) 700/048/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 31 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancagan Akhir RENSTRA PD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak

Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **64** catatan yang selaras dan **96** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **4** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

C. konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

1. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

2. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **10** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

D. kesesuaian antara target kinerja Ranhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;
   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **1** catatan yang selaras dan **2** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan
   Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **1** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

E. ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **0** catatan yang selaras dan **0** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam lampiran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
NIP.19680717 199003 2 006

Tanggal 8 September 2025
Supervisor/Pengendali Teknis

ALI FAKHRURROZI. H, SPi, CFrA
NIP 19801104 201101 1 001

KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN,DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHDAN/ATAU PERTUMBUHAN KINERJA URUSAN DAERAHYANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA PDProvinsi Kalimantan TengahPERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga	- MELAKSANAKAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2						2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3						2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				belum selaras dengan pencapaian Sasaran	pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4						2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5					2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
6						2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
7						2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
8					2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
9					2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
10					2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
11						2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
12						2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Sasaran	
13						2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
14						2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
15						2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
16						2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						SKPD	Elektronik pada SKPD				dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	kegiatan yang selara dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapka
17					2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
18						2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
19					2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
20						2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
21						2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
22					2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						Lapangan					Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
23					Pemerintahan Daerah	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
24						2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
25			- Sebagai Bahan Analisi bagi peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
26						2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian,	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen	Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Provinsi yang Tersedia				-	-
27			- Menurunkan Angka Kelahiran	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
28						2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
29						2.14.02.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
30						2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
31			- Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
32						2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	Daerah	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
33					Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
34						2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
35					2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
36						2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
37		Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak	- MELAKSANAKAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
38						2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
39						2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
40						2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
41					2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
42						2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
43						2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Sasaran	
44					2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
45					2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
46					2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
47						2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	kegiatan yang selara dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapka
48						2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
49						2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
50						2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
51						2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
52						2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
53					2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
54					Pemerintah Daerah	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
55					2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
56						2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Sasaran	
57						2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
58					2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
59						2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
60						2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	kegiatan yang selara dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkar
61			- Terbentuknya Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
62						2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
63						2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
64						2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
65					2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.0005 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
66						2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
67						2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas	jumlah SDM lembaga masyarakat,	Orang	Selaras		Catatan	Rekomendasi

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				-	-
68					2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
69			- Sebagai Bahan Analisi bagi peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
70						2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
71			- Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
72						2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
73					2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
74			- Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
75						2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
76					2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
77						2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
78						2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
79						2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
80						2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
81		Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	- MELAKSANAKAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
82						2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											dengan pencapaian Sasaran	telah ditetapkan.
83						2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
84						2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
85					2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
86						2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
87						2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
88					2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
89					2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
90					2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
91						2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
92						2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Sasaran	
93						2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
94						2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
95						2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
96						2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						SKPD	Elektronik pada SKPD				dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	kegiatan yang selara dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapka
97					2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
98						2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
99					2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
100						2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
101						2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
102					2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
					Pemerintahan Daerah	Lapangan					Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
103						2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
104						2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan belum selaras dengan pencapaian Sasaran	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
105			- Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
106						2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
107						2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
108						2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
109						2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
110					2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
111						2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
112						2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
113						2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
114						2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
115						2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
116					2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
117						2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
118						2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
119						2.08.03.1.03.0008 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
120						2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
121			- Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
122						2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
123			- Sebagai Bahan Analisi bagi peningkatan	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
			peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA					
124						2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
125			- Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
126						2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
127					2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
128			- Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
129					Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
130					2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
131						2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
132						2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
133						2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
134						2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah	Orang	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
						Kabupaten/Kota	Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
135		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	- MELAKSANAKAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
136						2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
137						2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
138						2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
139					2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
140						2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
141						2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
142					2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
143					2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
144					2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											sasaran.	
145						2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
146						2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
147						2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
148						2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan,	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	kegiatan yang selara dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapka
149						2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
150						2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
151					2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
152						2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
153					2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
154						2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
155						2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
156					2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
157						2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SELARAS	TIDAK SELARAS		
											sasaran.	
158						2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Tidak Selaras	Catatan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dalam pencapaian sasaran.	Rekomendasi Agar menyusun program/kegiatan/su kegiatan yang selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
159			- Sebagai Bahan Analisi bagi peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
160						2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KETERHUBUNGAN KINERJA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA PDProvinsi Kalimantan TengahPERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:

BIDANG URUSAN YANG DIAMPU:

1.

2.

3.

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN /PROGRAM)	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
					SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	IKU	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	IKD	SASARAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	IKU	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	IKU	TUJUAN	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN,DAN SUBKEGIATAN DENGAN DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DENGANPROGRAM PRIORITAS DAERAH PADA RPJMDProvinsi Kalimantan TengahPERIODE 2025 - 2029

PERANGKAT DAERAH:

URUSAN YANG DIAMPU:

1

2

3

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN(Non Prioritas)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
3	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN(Non Prioritas)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
4	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA(Non Prioritas)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
5	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK(Non Prioritas)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	UNIT	REVIU APIP		CATATAN	REKOMENDASI
				SELARAS	TIDAK SELARAS		
6	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)(Non Prioritas)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
7	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK(Non Prioritas)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
8	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK(Non Prioritas)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
9	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)(Non Prioritas)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
10	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)(Non Prioritas)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -

KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRADENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE SEBELUMNYAProvinsi Kalimantan TengahPERIODE 2025 - 2029

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89.82	89.6	89.13	8300%	89.11	89.13	89.15	89.3	89.45	89.6	89.6	Selaras		Catatan -	Rekomendasi -
2	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	64.05	67	66.05	9500%	0	66.05	66.29	66.53	66.76	67.00	67.24		Tidak Selaras	Catatan Baseline IKU pada renstra belum di input ke sistem SIPD-RI	Rekomendasi Agar dilakukan input data Baseline IKU pada SIPD-RI
3	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.525	46	0.516	10500%	0	0.516	0.510	0.505	0.49	0.46	0.46		Tidak Selaras	Catatan Baseline IKU pada renstra belum di input ke sistem SIPD-RI	Rekomendasi Agar dilakukan input data Baseline IKU pada SIPD-RI

KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRADENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PERIODE SEBELUMNYAProvinsi Kalimantan TengahPERIODE 2025 - 2029

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5							HASIL REVIU			
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET						CATATAN		CATATAN	REKOMENDASI
									T0	T1	T2	T3	T4	T5	SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.5	71.02	64.55	9000%	1:2	2:3	3:4	4:5	5.1:5.5	5.6:5.7	5.8:6		Tidak Selaras	Catatan Penetapan target IKD T0 s.d. T5 belum selaras dnegan hasil capaian periode sebelumnya.	Rekomendasi Agar menyusun dan menetapkan target IKD dengan mengacu hasil evaluasi dan pencapaian tahun sebelumnya.

KESESUAIAN DAN PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAHDALAM SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2025 - 2029Provinsi Kalimantan TengahTAHUN 2025 - 2029

Perangkat Daerah:

Bidang Urusan:

1.

2.

3.

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	80	80	85	85	100	100	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40		Selaras		Catatan -	Rekomend -
2				penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
3				monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan	1	1	2	3	4	5	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
4				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
5				Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
6			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	150	5	6	8	10	12	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
7				layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	12	14	16	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
8				Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	150	150	170	180	190	200	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
9				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10	11	15	20	30	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
10				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	150	170	180	200	230	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
11				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	110	120	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat		304	50			Tidak Selaras	Catatan Data Tahun 2024 belum terisi, seharusnya 171.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
12			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen	10	10	11	12	13	14	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
13				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang	25	25	30	35	40	45	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
14				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	laporan	1	1	1	3	4	5	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
15				Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
16				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	Kegiatan	3	4	5	6	7	8	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan		30	40			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
				dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota								kapasitas							belum sesuai, seharusnya menggunakan satuan "Orang".	sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
17		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0	4			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD, dan data tahun 2024 belum terisi seharusnya "4" layanan.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
18				Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	50	50	50	50	50	50	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		0	4			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai dengan sumber data DSSD, dan data tahun 2024 belum terisi seharusnya "4" layanan.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
19		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		1	1			Tidak Selaras	Catatan Data capaian 2024 belum terisi.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
					PPA																
20				Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia		1	1			Tidak Selaras	Catatan Data capaian 2024 belum terisi.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
21		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	0	50	50	50	50	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak		0	1			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "kegiatan" dan capaian tahun 2024 belum terisi	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
22				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Laporan	2	2	2	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak		0	1			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "kegiatan" dan capaian tahun 2024 belum terisi	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
23			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		-	-			Tidak Selaras	Catatan tidak ada dalam DSSD	Rekomend agar menyajika data sesuai de data dukung ya valid.
24		PROGRAM PERLINDUNGAN	Penyediaan Layanan bagi	Layanan pendampingan	Jumlah Anak Korban	Orang	35	35	35	37	39	40	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan		6	30			Tidak Selaras	Catatan	Rekomend

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
		KHUSUS ANAK	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi							Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.	Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
25				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	35	35	36	38	40	42	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
26				layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10	12	15	18	20	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
27				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	5	6	8	10	12	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan data 2024 belum terisi.	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
28				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan	Orang	100	100	100	100	100	100	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi		6	30			Tidak Selaras	Catatan Satuan belum sesuai seharusnya "layanan" dan	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
				Daerah Kabupaten/Kota	korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															data 2024 belum terisi.	Sektoral Daera
29			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	50	50	50	50	50	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		0	1			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai, dan tahun 2024 belum terisi seharusnya "8" kegiatan	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
30				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		0	1			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai, dan tahun 2024 belum terisi seharusnya "8" kegiatan	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
31		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	2	2	2	2	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)		-	-			Tidak Selaras	Catatan tidak ada dalam DSSD	Rekomend agar menyajika data sesuai de data dukung ya valid.
32				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	laporan	1	1	1	1	1	1	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		45	0			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
33				Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	orang	100	100	60	65	70	100	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomen -
34				Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	40	50	50	50	60	65	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		-	-			Tidak Selaras	Catatan satuan belum selaras dengan DSSD.	Rekomen Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
35			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga	9	9	9	9	10	10	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota		166	30		Selaras		Catatan -	Rekomen -
36				sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	40	50	55	60	65	70	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota		166	30			Tidak Selaras	Catatan satuan belum selaras dengan DSSD.	Rekomen Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
37				peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	50	50	60	70	85	100	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota		166	30			Tidak Selaras	Catatan satuan belum selaras dengan DSSD.	Rekomen Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRAPD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
38			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	50	50	60	70	85	100	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas		0	30		Selaras		Catatan -	Rekomend -
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	30	30	30	32	33	34	Organisasi yang telah mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomend -
40				Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	30	30	30	32	33	34	Organisasi yang telah Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomend -
41			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomend -

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
42			Budaya Lokal	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	Daerah	1	1	1	2	2	2	Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan terkait Kespro		-	-			Tidak Selaras	Catatan Satuan tidak sesuai, seharusnya "sertfikst"	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
43				Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	1	1	1	2	2	2	Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK		-	-			Tidak Selaras	Catatan Belum selaras, Seharusnya satuan "Instansi"	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
44				Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	1	1	1	1	1	1	Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomend -
45		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran	Keluarga		700	700	700	700	700	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	-			Tidak Selaras	Catatan belum selaras, tidak ada pada	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p

NO	BIDANG URUSAN	RENSTRA PD											DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)					HASIL REVIU			
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN						NAMA DSSD	SATUAN	2022	2023	2024	CATATAN		CATATAN	REKOMEN
							T0	T1	T2	T3	T4	T5						SELARAS	TIDAK SELARAS		
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas															DSSD.	Data Statistik Sektoral Daera
46				Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Daerah	1	1	1	2	2	2	Daerah/Instansi/Stakeholder yang telah menerima Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja		-	-			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya "Laporan".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
47				Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Daerah	1	1	1	2	2	2	Daerah yang telah menerima Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		-	-			Tidak Selaras	Catatan Satuan yang ditetapkan belum sesuai, seharusnya "Laporan".	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
48			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota	14	14	14	14	14	14	Kampung KB yang telah menerima Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga		-	-			Tidak Selaras	Catatan satuan belum sesuai, seharusnya "kampung KB"	Rekomend Agar data DSS disesuaikan de sumber data p Data Statistik Sektoral Daera
49				Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		-	-		Selaras		Catatan -	Rekomend -

KERTAS KERJA VERIFIKASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS/BADAN : DP3AP2KB

NO.	URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL	CHECK LIST		REKOMENDASI
			SELARAS	TIDAK SELARAS	
1	MATRIK TINDAK LANJUT CHR APIP	memastikan CHR APIP tentang Reviu Renstra ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan membuat Matrik tindak lanjut berdasarkan CHR.	√		Belum ada Matrik tindak lanjut berdasarkan CHR
2	POHON KINERJA	memastikan keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu.			Agar dilampirkan untuk memastikan keterkaitan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan
3	*CASCADING* KINERJA	memastikan keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu. Penjenjangan Kinerja yang dimaksud memperhatikan komponen struktur perencanaan, struktur organisasi dan struktur anggaran.			Agar dilampirkan untuk memastikan keterkaitan penjenjangan Kinerja Sasaran RPJMD terhadap Kinerja dari Tujuan, Kinerja Sasaran, Kinerja Program, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Urusan yang diampu
4	PROGRAM RENSTRA TERHADAP RPJMD	memastikan keselarasan dari Program dan Kinerja Program pada RPJMD terhadap Program pada RENSTRA PD.	√		-
5	PROGRAM PRIORITAS	memastikan Program Prioritas **KARTU HUMA BETANG SEJAHTERA** sudah masuk pada RENSTRA PD.	√		-
6	HAL-HAL LAIN	memastikan kesesuaian Sistematika, Target dan Prioritas Provinsi dan Nasional (Kementerian/Lembaga)	√		-

Verifikator :
Nama : Nur Hasanah
NIP : 197905162012122002
Jabatan : Perencana Ahli Muda
TTD :

Mengetahui Kepala Bidang :
Nama : Chandra Fuji Asmara, ST., M.Eng
NIP : 197706032003121007
Jabatan : Kepala Bidang PPM
TTD :

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

(RENJA PERUBAHAN-PD)
TAHUN 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/253/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 09 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri:
   u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
   u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
   c. Asisten Administrasi Umum; dan
   d. Kepala Biro Hukum
3. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 ini mengacu pada rencana pelaksanaan program kegiatan yang tetuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada dilingkungan internal dan ekstemal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut guna mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas semoga kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 31 Juli 2025

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Umum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDAnatomi Fisiologi 17
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 31
2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 40
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 50
BAB III TUJAN DAN SASARAN 60
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 60
3.1.1 Kementerian PPPA 60
3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 65
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2025 PD 77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 80
4.1 Program dan Kegiatan 80
BAB V PENUTUP 94

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Proses Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2025 sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas P3APPKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025–2029.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun berfungsi menerjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka

menengah yang tercantum dalam RENSTRA 2025-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimatan Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkroniasai Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025.

2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025.
3. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) Tahun 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
4. Menyediakan dokumen untuk perwujudan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimatan TengahTengah disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR

ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersdiaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2025 DP3APPKB disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah tahun 2023 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2025. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Tahun 2023 DP3APPKB dijabarkan pada **tabel 2.1:**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**02.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)**	**600**	**%**	**13.384.698.064,00**	**300**	**%**	**31.048.617.596**	**50,00**	**%**	**231,97**
		2.8.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**600**	**%**	**519.989.933,25**	**300**	**%**	**803.581.562**	**50,00**	**%**	**154,54**
		2.8.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	6	dokumen	103.683.920,81	**4**	Dokumen	**87.624.550**	**66,67**	%	**84,51**
		2.8.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	6	dokumen	96.076.120,81	**4**	Dokumen	**72.927.400**	**66,67**	%	**75,91**
		2.8.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	6	dokumen	98.646.520,81	**3**	Dokumen	**101.451.200**	**50,00**	%	**102,84**
		2.8.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	6	dokumen	221.583.370,81	**3**	Dokumen	**541.578.412**	**50,00**	%	**244,41**
		2.8.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**600**	**%**	**7.594.752.718,25**	**300**	**%**	**17.951.967.761**	**50,00**	**%**	**236,37**
		2.8.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	7.330.084.662,75	**33**	Bulan	**17.769.676.081**	**45,83**	%	**242,42**
		2.8.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	6	dokumen	103.084.027,75	**3**	Dokumen	**28.577.100**	**50,00**	%	**27,72**
		2.8.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD	6	dokumen	161.584.027,75	**7**	Dokumen	**153.714.580**	**116,67**	%	**95,13**
		2.8.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)**	**600**	**%**	**299.752.083,25**	**300**	**%**	**48.131.700**	**50,00**	**%**	**16,06**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
		2.8.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	306.060.708,25	**36**	Bulan	**48.131.700**	**50,00**	%	**15,73**
		2.8.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**600**	**%**	**339.394.083,25**	**300**	**%**	**91.573.552**	**50,00**	**%**	**26,98**
		2.8.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	345.702.708,25	**36**	Bulan	**91.573.552**	**50,00**	%	**26,49**
		2.8.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**600**	**%**	**1.347.676.434,25**	**300**	**%**	**4.465.925.804**	**50,00**	**%**	**331,38**
		2.8.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	67.897.154,75	**36**	Bulan	**60.439.200**	**50,00**	%	**89,02**
		2.8.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	81.393.154,75	**29**	Bulan	**1.426.626.050**	**40,28**	%	**1752,76**
		2.8.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	76.393.154,75	**36**	Bulan	**147.399.550**	**50,00**	%	**192,95**
		2.8.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	80.643.154,75	**36**	Bulan	**70.445.000**	**50,00**	%	**87,35**
		2.8.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	71.393.154,75	**36**	Bulan	**481.610.000**	**50,00**	%	**674,59**
		2.8.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	826.353.505,75	**36**	Bulan	**2.019.027.004**	**50,00**	%	**244,33**
		2.8.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	143.603.154,75	**24**	Bulan	**260.379.000**	**33,33**	%	**181,32**
		2.8.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)**	**600**	**%**	**889.221.083,25**	**300**	**%**	**1.963.695.102**	**50,00**	**%**	**220,83**
		2.8.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset SKPD (Tahun)	6	tahun	595.345.041,63	**2**	Dokumen	**1.365.917.250**	**33,33**	%	**229,43**
		2.8.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Tahun)	6	tahun	293.876.041,63	**2**	Dokumen	**597.777.852**	**33,33**	%	**203,41**
		2.8.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**600**	**%**	**2.014.319.645,25**	**276**	**%**	**3.600.272.432**	**46,00**	**%**	**178,73**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
		2.8.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	101.584.027,75	**36**	Bulan	**26.582.250**	**50,00**	%	**26,17**
		2.8.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	630.129.189,75	**36**	Bulan	**599.253.432**	**50,00**	%	**95,10**
		2.8.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	1.282.606.427,75	**36**	Bulan	**2.974.436.750**	**50,00**	%	**231,91**
		2.8.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)**	**600**	**%**	**379.592.083,25**	**300**	**%**	**333.943.942**	**50,00**	**%**	**87,97**
		2.8.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	194.876.041,63	**36**	Bulan	**226.633.942**	**50,00**	%	**116,30**
		2.8.01.1.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan	72	bulan	184.716.041,63	**36**	Bulan	**107.310.000**	**50,00**	%	**58,09**
2	**Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan**	**02.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah**	**44**	**orang**	**1.559.490.590,00**	**110**	**Orang**	**3.247.885.980**	**250,00**	**%**	**208,27**
		2/08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**6**	**dokumen**	**326.479.620,00**	**4**	**Dokumen**	**491.083.176**	**66,67**	**%**	**150,42**
		2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen ARG SKPD	35	dokumen	115.993.206,67	**38**	Dokumen	**187.878.564**	**108,57**	%	**161,97**
		2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota	11	kegiatan	115.993.206,67	**15**	Kab/Kota	**203.682.210**	**136,36**	%	**175,60**
		2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Rakor	6	dokumen	94.493.206,67	**2**	Dokumen	**99.522.402**	**33,33**	%	**105,32**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
		2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**6**	**dokumen**	**1.150.017.763,33**	**2**	**Dokumen**	**2.695.752.004**	**33,33**	**%**	**234,41**
		2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	30	dokumen	1.004.993.206,67	**11**	Dokumen	**2.383.556.636**	**36,67**	%	**237,17**
		2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Promosi	18	dokumen	145.024.556,67	**4**	Dokumen	**312.195.368**	**22,22**	%	**215,27**
		2.08.02.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**1**	**dokumen**	**82.993.206,67**	**1**	**Dokumen**	**61.050.800**	**100,00**	**%**	**73,56**
		2.08.02.1.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemerdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih	6	orang	82.993.206,67	**50**	Orang	**61.050.800**	**833,33**	%	**73,56**
3	**Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif**	**02.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan**	**95**	**%**	**889.781.705,00**	**243,75**	**%**	**2.072.919.793**	**256,58**	**%**	**232,97**
		2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak**	**6**	**dokumen**	**434.760.694,67**	**2**	**Dokumen**	**1.200.781.454**	**33,33**	**%**	**276,19**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
		2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang SDM nya terlatih dalam Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dan TPPO	14	kab/kota	74.162.847,33	**10**	Kab/Kota	**158.048.800**	**71,43**	%	**213,11**
		2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	14	kab/kota	360.597.847,33	**10**	Kab/Kota	**1.042.732.654**	**71,43**	%	**289,17**
		2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan**	**6**	**dokumen**	**277.661.271,67**	**2**	**Dokumen**	**620.702.489**	**33,33**	**%**	**223,55**
		2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang dan jasa penunjang pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada UPT PPA	72	bulan	160.899.424,33	**36**	Bulan	**349.477.063**	**50,00**	%	**217,20**
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	6	dokumen	116.761.847,33	**3**	Dokumen	**271.225.426**	**50,00**	%	**232,29**
		2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**6**	**dokumen**	**177.359.738,67**	**2**	**Dokumen**	**251.435.850**	**33,33**	**%**	**141,77**
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah SDM yang terlatih sebagai Tenaga Pendamping Korban	120	orang	126.117.891,33	**111**	Orang	**227.490.850**	**92,50**	%	**180,38**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
			Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kekerasan dan pendataan kasus melalui aplikasi simfoni									
		2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan	18	kegiatan	51.241.847,33	**3**	Kegiatan	**23.945.000**	**16,67**	%	**46,73**
	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	**02.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan**	**120**	**orang**	**191.420.516,00**	**105**	**Orang**	**379.691.450**	**87,50**	**%**	**198,35**
		2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)**	**14**	**kab/kota**	**91.335.133,00**	**17**	**Kab/Kota**	**214.963.100**	**121,43**	**%**	**235,36**
		2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	14	kab/kota	91.335.133,00	**33**	Kab/Kota	**214.963.100**	**235,71**	%	**235,36**
		2.08.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota**	**6**	**dokumen**	**100.085.383,00**	**3**	**Dokumen**	**164.728.350**	**50,00**	**%**	**164,59**
		2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	6	dokumen	100.085.383,00	**3**	Dokumen	**164.728.350**	**50,00**	%	**164,59**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
4	**Mengoptimalkan kualitas data gender dan anak**	**02.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan**	**14**	**dokumen**	**265.167.675,00**	**26**	**Dokumen**	**593.449.310**	**185,71**	**%**	**223,80**
		2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**6**	**dokumen**	**265.167.675,00**	**3**	**Dokumen**	**593.449.310**	**50,00**	**%**	**223,80**
		2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen laporan hasil publikasi data gender dan anak dan laporan Pengembangan Layanan Keterbukaan informasi Publik.	12	laporan	90.781.337,50	**5**	Dokumen	**232.205.668**	**41,67**	%	**255,79**
		2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen profil data terpliah gender tingkat provinsi	6	dokumen	174.386.337,50	**3**	Dokumen	**361.243.642**	**50,00**	%	**207,15**
5	**Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak**	**02.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**14**	**kab/kota**	**437.814.765,00**	**18**	**Kab/Kota**	**1.325.910.558**	**128,57**	**%**	**302,85**
		2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	600	%	228.423.347,50	**101,00**	%	**866.223.104**	**16,83**	%	**379,22**
		2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Dokumen hasil pelaksanaan Pembinaaan dan Bimbingan Pencapaiak Kabupaten/Kota Layak Anak	6	dokumen	136.446.998,75	**3**	Dokumen	**575.547.454**	**50,00**	%	**421,81**
		2.08.06.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	6	dokumen	91.976.348,75	**3**	Dokumen	**290.675.650**	**50,00**	%	**316,03**
		2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**6**	**dokumen**	**209.391.417,50**	**3**	**Dokumen**	**481.359.954**	**50,00**	**%**	**229,89**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
		2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Rakornas FAN	6	dokumen	124.961.348,75	**3**	Dokumen	**183.735.314**	**50,00**	%	**147,03**
		2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)	6	dokumen	84.430.068,75	**2**	Dokumen	**297.624.640**	**33,33**	%	**352,51**
		02.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)**	**70**	**%**	**702.344.371,00**	**238,33**	**%**	**1.252.715.854**	**340,47**	**%**	**178,36**
		2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	6	dokumen	133.700.720,00	**2**	Dokumen	**214.612.000**	**33,33**	%	**160,52**
		2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Proviinsi	6	dokumen	133.700.720,00	**3**	Dokumen	**214.612.000**	**50,00**	%	**160,52**
		2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	**6**	**dokumen**	**568.643.651,00**	**2**	**Dokumen**	**987.749.504**	**33,33**	**%**	**173,70**
		2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	6	dokumen	159.152.720,00	**3**	Dokumen	**335.833.500**	**50,00**	%	**211,01**
		2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak	6	dokumen	409.490.931,00	**3**	Dokumen	**651.916.004**	**50,00**	%	**159,20**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
			yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (DAK)	yang memerlukan perlindungan khusus									
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**1**	**dokumen**	**51.306.000,00**	**2**	**dokumen**	**-**	**200,00**	**%**	**-**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		1	dokumen	51.306.000,00	**2**	dokumen	**-**	**200,00**	%	**-**
6	**Meningkatkan kualitas keluarga**	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)**	**1,96**	**-**	**241.149.920,00**	**2,29**	**-**	**-**	**116,84**	**%**	**-**
		2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**6**	**dokumen**	**241.149.920,00**	**2**	**Dokumen**	**-**	**33,33**	**%**	**-**
		2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	6	dokumen	171.336.310,00	**2**	Dokumen	**-**	**33,33**	%	**-**
		2.14.02.1.01.03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	6	dokumen	69.813.610,00	**2**	Dokumen	**-**	**33,33**	%	**-**
7	**Meningkatnya akseptor KB**	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)**	**5,01**	**%**	**166.448.318,00**	**8,58**	**%**	**235.035.950**	**171,26**	**%**	**141,21**
		2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan**	**Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan**	**6**	**dokumen**	**66.751.409,00**	**3**	**Dokumen**	**-**	**50,00**	**%**	**-**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
			dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**									
		2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	12	kegiatan	66.751.409,00	**4**	Kegiatan	-	**33,33**	%	-
		2.14.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**6**	**dokumen**	**99.696.909,00**	**2**	**Dokumen**	**114.996.250**	**33,33**	**%**	**115,35**
		2.14.03.1.02.03	Pembinaan Promosi Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPKdan Konseling Kesehatan Reproduksi	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	6	dokumen	99.696.909,00	**2**	Dokumen	**114.996.250**	**33,33**	%	**115,35**
	Meningkatkan kualitas keluarga	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	**64,55**	**-**	**178.954.313,00**	**54,25**	**-**	**1.578.452.904**	**84,04**	**%**	**882,04**
		2.14.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui**	**Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga**	**6**	**dokumen**	**178.954.313,00**	**2**	**Dokumen**	**1.578.452.904**	**33,33**	**%**	**882,04**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2023 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD/RENSTRA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun RKPD Tahun 2023 (%)		
					K		Rp	K		Rp	K		%
1	*2*	*4*		*6*	*7*			*8*			*9*		
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
		2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	18	kabupaten/kota	178.954.313,00	**17**	Kab/Kota	**1.578.452.904**	**94,44**	%	**882,04**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG)
    a) Kebijakan berupa Peraturan Daerah
    b) Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender.
    c) Ketersediaan data gender dan anak.
    d) Kemitraan dan jaringan antara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
    e) Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak
    a) Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak KorbaKekerasan. Peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b) Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran serta dunia usaha secara terus menerus dan berkelanjutan.

c) Data terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak berupa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan yang selanjutnya diformulasikan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilaporkan setiap tahunnya.

d) Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya diantaranya adalah UPT PPA, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal.

e) Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak

3. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran. Adapun kegiatan tersebut yaitu Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB Nasional. Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB Nasional ditujukan untuk meningkatkan KIE Program KB.

b) Kegiatan meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.

c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah dilaksanakan adalah kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;

13. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. penyerasian kebijakan kependudukan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 2.1.:

Tabel 2.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Pembangunan	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender.
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
2	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaa n perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
3	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender *machinery* di daerah belum optimal
4	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG
5	Data terpilah gender yang belum *valid* dan *update*.	Kurang nya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan mengenai data terpilah Gender dan Anak	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor
6	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk kesejahteraan Perepuan dan Anak (PUSPA)	
7	Belum terwujudnya Kalimantan Tengah Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/ kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan I Hak Anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
8	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
			Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan pelayanan UPT PPA	Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan layanan UPT serta belum memadai sarana pendukung seperti gedung perkantoran, etalase pelayanan dan belum tersedia rumah aman.	Minimnya dukungan UPT PPA sebagai UPT yang menerima berbagai kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif , mengingat fungsinya sebagai rujukan lanjutan.
10	Tingginya Angka kelahiran total		Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE
			Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi
11	*Stunting* pada anak	Masih tingginya prevalensi *stunting*	Masih minimnya pemahaman keluarga tentang *stunting*
			Praktek pengasuhan yang kurang baik
12	Pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
			Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2025 -2029 adalah :

VISI :

"Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045".

MISI :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
2. Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan yang inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat
3. Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas da mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat sebagai keadilan sosial
5. Pemberdayaan keadilan local dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:

a. **Misi Kedua** : "**Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat"**
b. **Misi Keempat : "Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial"**.
c. **Misi Kelima :" Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045"**

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
f) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal Falsafah Huma betang (Rumah Besar) Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:
b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman Pancasilais dan cinta damai
c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

1) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
2) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI
"Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045"
Misi 2 **Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat** **Misi 4** **Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social** **Misi 5** **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045**

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan permasalahan lintas sector (*crosscutting issues*) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partispasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan *Focal Point* Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Kalimantan Tengah Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha penentuan menjadi Pejabat	Kesempatan dan peluang untuk Perempuan masih tinggi dengan didukungnya Perda PUG No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif

VISI

"Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi 2

Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat

Misi 4

Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social

Misi 5

Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
3	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cederung rendah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		
4	Data terpilah gender yang belum *valid* dan *update*	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/kota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Rendahnya penididikan dan kualitas hidup masyarakat 2. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan merupaka	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal 2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu	1. Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

		n aib keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasus nya.		penanganan kasus kekerasan 3. Adanya kemajuan tehnologi, menyebab	4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang

VISI **"Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045"**					
Misi 2 **Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat** **Misi 4** **Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social** **Misi 5** **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045**					
NO.	**PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB**	**FAKTOR INTERNAL**		**FAKTOR EKSTERNAL**	
		PENGHAMBAT	**PENDORONG**	**PENGHAMBAT**	**PENDORONG**
		3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak		kan anak – anak dengan mudanya mengakses *social media*, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	menangani perlindungan perempuan dan anak
7	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Terbatasnya kouta penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang yang dibutuhkan UPT PPA	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	Sudah terbentuknya UPT Provinsi dan beberapa UPT kabupaten yang memacu pemenuhan kebutuhan SDM seuai kualifikasi

VISI "Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045"					
Misi 2 Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat Misi 4 Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social Misi 5 Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Tingkat kesadaran usia untuk berkeluarga yang masih rendah akibat dari rendahnya ekonomi keluarga	Sebagai *leading sector* terkait anak akan memudahkan koordinasi dengan lintas sektor dan SKPD terkait	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
2	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Budaya dan agama terentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan

akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	 81,98% 1,64%
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	100%
3.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak - Indeks Perlindungan Anak (IPA) - Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	 59,56% 100%
4.	Meningkatkan kualitas keluarga - Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) - Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) - Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	 54,25 2,29 19,51
5.	Meningkatnya akseptor KB - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR) - Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	 74,38 8,58
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Susunan Organisasinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Kepala Dinas , membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Bidang.

a. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
   - Sub Bagian Penyusunan Program;
   - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Seksi :
   - Seksi Pemantapan Kelembagaan PUG;
   - Seksi Pemantauan dan Evaluasi PUG;
   - Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

c. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat , membawahi 3 (tiga) Seksi:
   - Seksi Data;
   - Seksi Penyebarluasan Informasi;
   - Seksi Partisipasi Masyarakat.

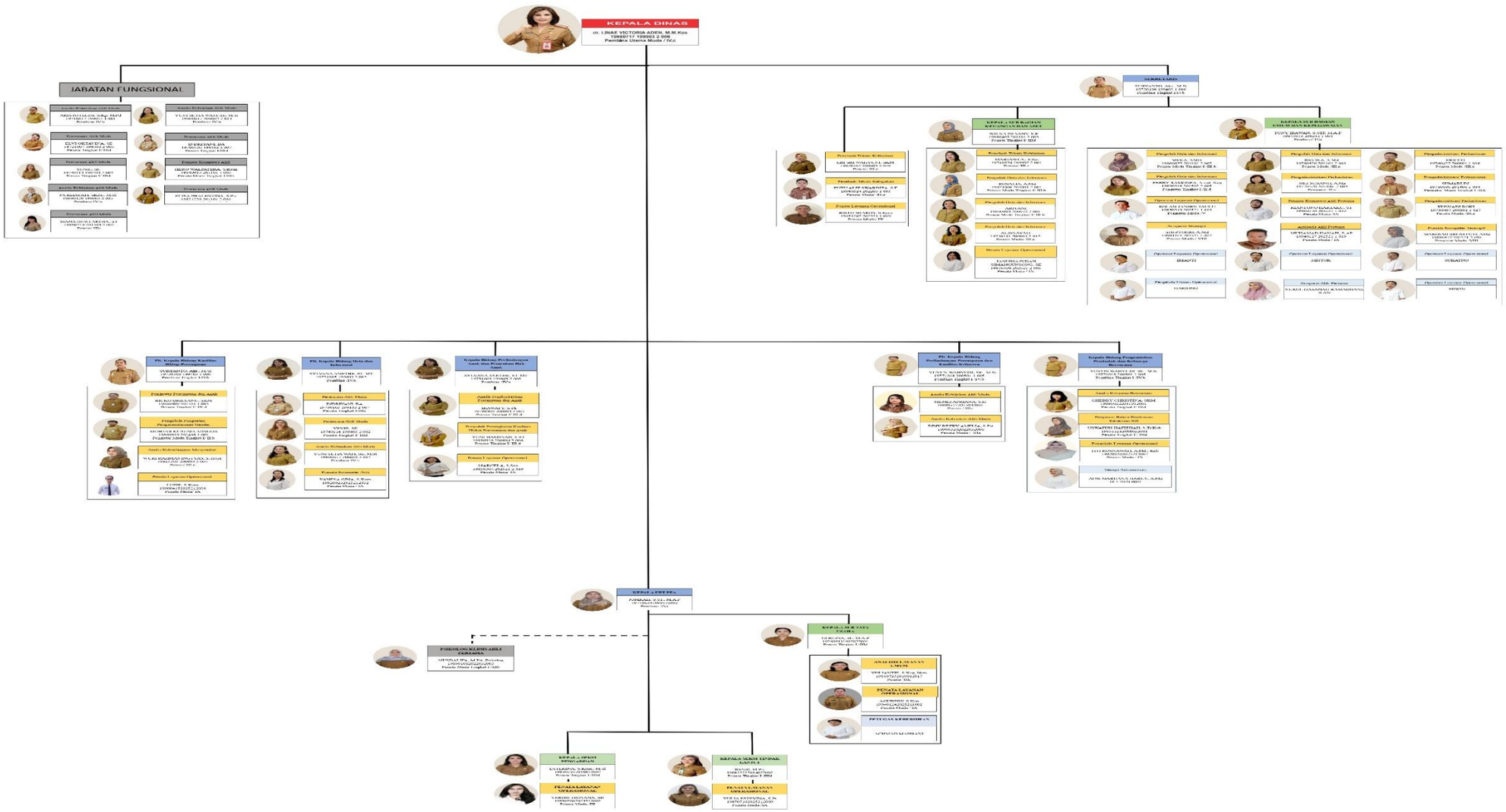
d. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi 3 (tiga) Seksi :
   - Seksi Tumbuh Kembang Anak;
   - Seksi Perlindungan Anak;
   - Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak.

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi 3 (tiga) Seksi :
   - Seksi Perlindungan Perempuan
   - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga;
   - Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi
   - Seksi Pengendalian Penduduk;
   - Seksi Kesehatan Reproduksi;
   - Seksi Keluarga Berencana.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.20 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan klasifikasi A, dengan susunan sebagai berikut :

- UPT –PPA adalah unsur pelaksana teknis yang berada di baah dan bertanggung jab kepada Kepala Dinas
- Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengaduan
- Seksi Tindak Lanjt Kasus
- Kelompok Jabatan Fungsional


KEPALA DINAS
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
19690717 199803 2 009
Pembina Utama Muda / IV.c
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA UPTD PPA
PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

A. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
- Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan, anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor mupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
- Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan kadilam dan hak asasi serta kelmbagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan,sosiaisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang PUG, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

B. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- Tingkat pemahaman aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlalu;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana.
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan perlu peningkatan
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparatur negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tantangan

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indek Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.

- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG
- Meningkatnya kasus kekekrasan pada Anak dan Perempuan
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

Peluang

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja

- Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Kemajuan teknologi informasi
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanaan keluarga
- Kemudahan informasi tentang KB
- Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

Kekuatan

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Terbentuknya jejaring kelembagaan
- Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait
- Dukungan lintas Sektor yang terkait dalam perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah
- Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Kelemahan

- Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
- *Reward* and *Punishment* belum berjalan optimal
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
- Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Anggaran masih terbatas
- Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

E. Isu-isu strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
   a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
   b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
   c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :

a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
d. Perkawinan Usia Anak tertinggi no 2 di Indonesia

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan Tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalah kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi penlindung anak-anak untuk berkembang

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan priorotas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian,

pennyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahn dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2025-2029. Disatu sisi, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 ini memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maka DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan akhir RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan akhir RKPD tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan akhir RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Akhir RKPD**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2025

Provinsi Kalimantan Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	**2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			***16.728.239.977,35***	***14.221.608.490,17***
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)**	**100**	**14.130.252.102,35**	**11.393.260.654,16**
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	**228.501.248,67**	**291.871.531,66**
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	1	22.153.700,00	22.153.700,00
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1	20.000.000,00	20.000.000,00
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	1	21.135.246,67	21.135.246,67
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	1	165.212.302,00	228.582.584,99
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	**9.450.363.034,00**	**8.418.690.394,55**
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	9.409.336.769,00	8.377.664.129,55

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1	5.161.500,00	5.161.500,00
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD	1	35.864.765,00	35.864.765,00
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	**23.488.400,00**	**43.488.400,00**
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	23.488.400,00	43.488.400,00
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	**36.000.000,00**	**15.000.000,00**
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan	12	36.000.000,00	15.000.000,00
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	**1.069.082.911,68**	**866.413.555,95**
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	22.295.000,00	37.818.000,00
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	355.167.000,00	156.221.827,00
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12	52.600.000,00	62.835.500,00
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan	12	28.636.894,20	72.789.818,00
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	515.359.417,48	397.923.810,95
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	95.024.600,00	138.824.600,00
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	**1.038.415.000,00**	**23.800.000,00**
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset SKPD (Tahun)	1	871.015.000,00	23.800.000,00
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Tahun)	1	167.400.000,00	-
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	**1.876.627.608,00**	**1.314.763.290,00**
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan	12	11.248.700,00	11.248.700,00
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan	12	246.367.908,00	192.214.985,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	1.619.011.000,00	1.111.299.605,00
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	**407.773.900,00**	**419.233.482,00**
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan	12	142.296.400,00	161.346.400,00
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan	12	50.735.200,00	50.735.200,00
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	214.742.300,00	207.151.882,00
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Jumlah *Focal Point* PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah**	**40**	**949.722.360,02**	**1.482.618.739,02**
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	**120.374.002,02**	**144.090.381,02**
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen ARG SKPD	30	48.356.000,00	38.145.621,00
	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota	10	38.495.000,00	88.495.000,00
	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Rakor	1	33.523.002,02	17.449.760,02
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	**812.254.998,00**	**1.324.234.998,00**
	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5	711.514.000,00	1.258.014.000,00
	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Promosi	3	100.740.998,00	66.220.998,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	**17.093.360,00**	**14.293.360,00**
	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih	35	17.093.360,00	14.293.360,00
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan**	**92,5**	**455.591.583,00**	**423.026.583,00**
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	**96.237.533,00**	**54.813.533,00**
	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang SDM nya terlatih dalam Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dan TPPO	11	19.316.038,00	8.994.038,00
	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	11	76.921.495,00	45.819.495,00
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	**226.641.000,00**	**247.668.000,00**
	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang dan jasa penunjang pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada UPT PPA	12	86.000.000,00	86.000.000,00
	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	1	140.641.000,00	161.668.000,00
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	1	**132.713.050,00**	**120.545.050,00**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
		Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			
	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlatih sebagai Tenaga Pendamping Korban Kekerasan dan pendataan kasus melalui aplikasi simfoni	60	113.197.000,00	101.029.000,00
	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan	2	19.516.050,00	19.516.050,00
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan**	**50**	**5.634.940,00**	**183.543.129,00**
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	1	**5.634.940,00**	**87.396.439,50**
	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	13	5.634.940,00	87.396.439,50
	2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	**105.325.611,00**	**96.146.689,50**
	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	105.325.611,00	96.146.689,50
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**14**	**31.956.518,00**	**254.255.425,00**
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**1**	**73.369.093,00**	**254.255.425,00**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen laporan hasil publikasi data gender dan anak dan laporan Pengembangan Layanan Keterbukaan informasi Publik.	2	288.313.810,00	85.325.212,50
	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen profil data terpliah gender tingkat provinsi	1	103.527.361,00	168.930.212,50
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**12**	**288.313.810,00**	**158.603.428,00**
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	85,71	103.527.361,00	85.937.361,00
	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	1	25.742.995,00	25.742.995,00
	2.08.06.1.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1	77.784.366,00	60.194.366,00
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**1**	**184.786.449,00**	**72.666.067,00**
	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)	1	140.693.240,00	68.818.858,00
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen hasil Rakornas FAN	1	44.093.209,00	3.847.209,00
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)**	**65**	**793.399.570,98**	**697.574.570,99**
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak**	**1**	**314.766.070,98**	**255.084.070,99**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Proviinsi	1	112.126.000,00	112.126.000,00
	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	202.640.070,98	142.958.070,99
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	**1**	**478.633.500,00**	**442.490.500,00**
	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30	121.638.500,00	73.038.500,00
	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30	356.995.000,00	369.452.000,00
2	**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		-	***535.049.574,00***	***252.711.112,00***
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)**	**1,96**	**34.807.869,00**	**9.002.869,00**
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**1**	**34.807.869,00**	**9.002.869,00**
	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1	34.807.869,00	9.002.869,00
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)**	**5,01**	**218.813.277,00**	**208.474.335,00**
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**1**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi kerja sama dengan stakeholde rs dan mitra kerja dalam pelaksana an advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	2	200.000.000,00	200.000.000,00
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1**	**18.813.277,00**	**8.474.335,00**
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	**30**	18.813.277,00	8.474.335,00
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	**64,55**	**281.428.428,00**	**35.233.908,00**
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga**	**1**	**281.428.428,00**	**35.233.908,00**
	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	3	281.428.428,00	35.233.908,00
GRAND TOTAL				**17.263.289.551,35**	**14.474.319.602,17**

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

forum OPD sebagai sarana dua arah atau wadah organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, stakeholders, lembaga dinas/ instansi terkait dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyusun dan merencanakan program kerja pembangun untuk tahun 2025. Sebagai OPD yang menangani dan terkait terhadap isu-isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Rancangan rencana kerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didiskusikan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan-usulan tersebut disajikan pada **Tabel 2.4** :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan tahun 2025

Provinsi Kalimantan Tengah

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan) 2 kegiatan (Rp. 100.000.000,-)	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang II	1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
2	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menurunnya Indeks Pembangunan Gender) 2 kegiatan (Rp. 150.000.000,-)	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang II	1	Dokumen	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
3	Rendahya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga perlu dilaksanakan pelatihan ketrampilan dalam pengolahan bahan baku lokal untuk peningkatan kapasitas sehingga mampu meningkatkan peran serta perempuan	Kab. Lamandau	Bulik	Bukit Indah	1	Dokumen	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Lamandau, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
4	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pemahaman Forum Anak tentang 2P. (Pelatihan Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) = 1 Kegiatan)	Kab. Kapuas	Selat	Selat Tengah	1	Dokumen	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
5	Tingginya angka pernikahan anak	Masih tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap	Kab. Kapuas	Selat	Selat Tengah	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan,	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan	disetujui

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Anak. Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak = 1 Kegiatan						dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	
6	menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi	Masih lemahnya kualitas SDM. Pelatihan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Selat	Selat Tengah	1	Dokumen	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Kapuas, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
7	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pernikahan anak. Sosialisasi Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Basarang	Basarang	1	Kegiatan	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Usulan ini dilaksanakan di Kabupaten (tidak hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan), telah termuat pada RKPD 2024 dan penganggaran melekat pada APBD TA 2024 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
8	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pernikahan anak. Sosialisasi Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Kapuas Hilir	Barimba	1	Kegiatan	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Usulan Kabupaten Kapuas untuk sosialasi pernikahan anak dibawah umur dilaksanakan pada RKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pengganggaran melekat di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
9	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pernikahan anak. Sosialisasi Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Kapuas Timur	Anjir Serapat Timur	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Usulan Kabupaten Kapuas untuk sosialasi pernikahan anak dibawah umur dilaksanakan pada RKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pengganggaran melekat di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
10	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pernikahan anak. Sosialisasi Tentang Pernikahan Anak Di Bawah Umur = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Pulau Petak	Sei Tatas	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Usulan Kabupaten Kapuas untuk sosialasi pernikahan anak dibawah umur dilaksanakan pada RKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pengganggaran melekat di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
11	Tingginya angka pernikahan anak	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat	Kab. Kapuas	Kapuas Barat	Mandomai	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan	Usulan ini dilaksanakan di Kabupaten (tidak hingga ke tingkat kecamatan dan	ditolak

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	tentang peran PATBM. Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) = 1 Kegiatan						Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	kelurahan), telah termuat pada RKPD 2024 dan penganggaran melekat pada APBD TA 2024 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	
12	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran PATBM. Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Dadahup	Dadahup	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Usulan ini dilaksanakan di Kabupaten (tidak hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan), telah termuat pada RKPD 2024 dan penganggaran melekat pada APBD TA 2024 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
13	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran PATBM. Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Kapuas Murung	Palingkau Lama	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Usulan ini dilaksanakan di Kabupaten (tidak hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan), telah termuat pada RKPD 2024 dan penganggaran melekat pada APBD TA 2024 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
14	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran PATBM. Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Bataguh	Pulau Kupang	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Usulan ini dilaksanakan di Kabupaten (tidak hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan), telah termuat pada RKPD 2024 dan penganggaran melekat pada APBD TA 2024 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
15	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran PATBM. Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) = 1 Kegiatan	Kab. Kapuas	Kapuas Kuala	Lupak Dalam	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Usulan ini dilaksanakan di Kabupaten (tidak hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan), telah termuat pada RKPD 2024 dan penganggaran melekat pada APBD TA 2024 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
16	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran PATBM. Sosialisasi Tentang	Kab. Kapuas	Tamban Catur	Tamban Jaya	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Usulan ini dilaksanakan di Kabupaten (tidak hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan), telah termuat pada RKPD 2024 dan penganggaran melekat pada	ditolak

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kalimantan Tengah	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) = 1 Kegiatan						Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	APBD TA 2024 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	
17	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	PLANG KELURAHAN DAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK UKURAN 120X90 CM	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Lanjas	1	Dokumen	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tidak direkomendasikan karena usulan merupakan kegiatan pekerjaan pengadaan yang kewenangan anggarannya di tingkat Kabupaten Barito Utara	ditolak
18	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Pengadaan PAKET SOUND SYSTEM Perkuatan IPG terkait Sarana Prasarana IPG	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Lanjas	1	Dokumen	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tidak direkomendasikan karena usulan merupakan kegiatan pekerjaan pengadaan yang kewenangan anggarannya di tingkat Kabupaten Barito Utara	ditolak
19	Rendahya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Pengadaan LAPTOP PUG	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Lanjas	1	Dokumen	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tidak direkomendasikan karena usulan merupakan kegiatan pekerjaan pengadaan yang kewenangan anggarannya di tingkat Kabupaten Barito Utara	ditolak
20	menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi	Pengadaan Videotron Out Door Bertema Bangga Kencana	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Lanjas	1	Dokumen	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tidak direkomendasikan karena usulan merupakan kegiatan pekerjaan pengadaan yang kewenangan anggarannya di tingkat Kabupaten Barito Utara	ditolak
21	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Tingginya penikahan usia dini di Kabupaten Lamandau sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan sasaran Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MAN	Kab. Lamandau	Bulik	Nanga Bulik	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Lamandau, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
22	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Melakukan Sosialisasi Progam dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Gunung Mas, sedangkan pengganggaran melekatdi APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
23	Rendahya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kegiatan Bimbingan Teknis Kovensi Hak Anak	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Gunung Mas , sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
24	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Masih Tingginya Perkawinan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan Pagu Anggaran Rp. 31.290.000 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)	Kab. Pulang Pisau	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Direkomendasikan mengingat prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Pulang Pisau masih cukup tinggi namun pelaksanaannya tetap di ibu kota kabupaten	disetujui
25	menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi	Perlunya sosialisasi tentang pentingnya pentingnya pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-	Kab. Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Kahayan Hilir	1	Dokumen	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Belum direkomendasikan mengingat pentingnya pemakaian kontrasepsi juga dilakukan oleh BKKBN	ditolak
26	Rendahya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kurangnya Tingkat Pengetahuan Perempuan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan sasaran peserta Organisasi Perempuan Di Kabupaten Pulang Pisau yang terdaftar di Badan Kesbangpol Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp 34.658.000,-	Kab. Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Kahayan Hilir	1	Dokumen	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan karena kegiatan akan dilaksanakan Di bukit Liti Untuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan anggaran yang melekat di APBD TA 2024 Pada DP3APPKB Provinsi Kalteng	ditolak
27	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Adanya Permasalahan Gender atau Ketimpangan gender dalam peran antara Laki-laki dan Perempuan dalam Pembangunan yang berkelanjutan tujuan dan target kesetaraan gender	Kab. Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Kahayan Hilir	1	Dokumen	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan, akan tetapi Dinas P3APPKB Hanya melakukan pembinaan melalui Monitoring dang Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Pulang Pisau	ditolak

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		menjadi penting dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan sebagai alat analisis yang berguna untuk pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja dan responsif gender. sasaran Pelaksanaan kegiatan 30 OPD di Kabupaten/Kota Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp 34.658.000,-								
28	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Kecamatan (6 kegiatan, Pagu 150.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Arut Selatan	Madurejo	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Lamandau, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	ditolak
29	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Pelatihan /Diklat Pencatatan dan Pelaporan untuk UPTD PPA se Kalimantan Tengah sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM (1 Kegiatan, Pagu 100.000.000	Kab. Kotawaringin Barat	Arut Selatan	Madurejo	1	Dokumen	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan karena Dinas P3APPKB Provinsi akan melaksanakan Pelatihan serupa pada Bulan April 2024 yang akan dilaksakana di Kota Palangka Raya	ditolak
30	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Rapat Koordinasi Forum Anak Kabupaten Se Kalimantan Tengah (1 Kegiatan, Pagu 100.000.000)	Kab. Kotawaringin Barat	Arut Selatan	Madurejo	1	Dokumen	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Belum direkomedasikan mengingat RAKOR Forum Anak se Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi KALTENG	ditolak
31	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Melayu	1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan akan tetapi Dinas P3APPKB Hanya melakukan pembinaan melalui Monitoring dang Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Barito Utara	ditolak
32	Menurunnya Indeks	Pelatihan Kewirausahaan Perempuan	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Melayu	1	Dokumen	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia	Belum direkomendasikan untuk Tahun 2025 karena keterbatasan Penganggaran	ditolak

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pembangunan Gender							Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pelatihan sehingga belum menjadi Prioritas di tingkat kabupaten	
33	Rendahya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kurangnya partisipasi dari perangkat daerah dalam memahami Pengarusutamaan Gender termasuk perencanaan penganggaran Rensfonsif Gender, Kurangnya analisis berbagai isu gender, kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat anatara perempuan dan laki-laki dalam acuan membuat kebijakan kegiatan pembangunan, sebagai masukan bagi pemegang kebijakan dalam mengambil keputusan dalam rangka peingkatan kualitas jidup keluarga dan perlindungan anak.	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	1	Dokumen	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan akan tetapi Dinas P3APPKB Hanya melakukan pembinaan melalui Monitoring dang Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Gunung Mas	ditolak
34	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Pelatihan Peran Forum anak sebagai pelopor dan pelapor (2P)	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Melayu	1	Dokumen	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Belum direkomendasikan mengingat pelatihan yang diperlukan oleh Kabupaten Barito Utara adalah Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk meningkatkan capai Kabupaten Layak Anak	ditolak
35	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Sosialisasi tentang Pernikahan anak dibawah umur	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Melayu	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Barito Utara cukup tinggi	disetujui

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
36	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Pelatihan pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kab. Barito Utara	Teweh Tengah	Melayu	1	Dokumen	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan karena Dinas P3APPKB masih berfokus pada Pembentukan PUSPAGA Provinsi dan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Keanggotaan Tim Profesional, Konselor dan tenaga administrasi	ditolak
37	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Sosialisasi Pernikahan Anak Dibawah Umur	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Seruyan cukup tinggi	disetujui
38	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan) 2 kegiatan (Rp. 100.000.000,-)	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	1	Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
39	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Pelatihan Kewirausahaan Perempuan (Menurunnya Indeks Pembangunan Gender) 2 kegiatan (Rp. 150.000.000,-)	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Usulan ini dapat diakomodir dengan Lokus pada Kabupaten Seruyan, sedangkan pengganggaran melekat di APBD TA 2025 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	disetujui
40	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Konveksi Hak Anak, Pembentukan Forum Anak di 10 Kecamatan, Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak, dan Permainan PUSPAGA.	Kab. Murung Raya	Murung	Beriwit	1	Dokumen	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Direkomendasikan mengingat Prevalansi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Murung Raya cukup tinggi dan prevalansi stuntingnya juga cukup tinggi	disetujui
41	Tingginya angka pernikahan anak di usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan Pelatihan Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat dan Sosialisasi Anti Perundungan dan Kekerasan.	Kab. Murung Raya	Murung	Beriwit	1	Dokumen	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan mengingat yang diperlukan oleh Kabupaten Murung Raya adalah Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk mendukung KLA	ditolak
42	Rendahya partisipasi	- Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan	Kab. Murung Raya	Murung	Beriwit	1	Dokumen	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Belum di rekomendasikan karena kegiatan ini sudah dilaksanakan di tahun 2019	ditolak

No	Usulan	Masalah	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan	Volume	Satuan	Sub kegiatan	Rekomendasi SKPD	Verifikasi SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	perempuan dalam pembangunan	Pendampingan PUG termasuk PPRG. - Peningkatan Kewirausahaan Perempuan melalui pelatihan.						Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	akan tetapi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng akan memberikan pembinaan melalui Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Murung Raya	
43	Rendahya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Murung Raya	Murung	Beriwit	1	Dokumen	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Belum direkomendasikan untuk tahun 2025 karena Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di tingkat kecamatan dan desa merupakan ruang lingkup Kabupaten.	ditolak

BA
B III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kemeneterian PPPA

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019–2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024.RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

4. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
5. peningkatan perlindungan anak; dan
6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

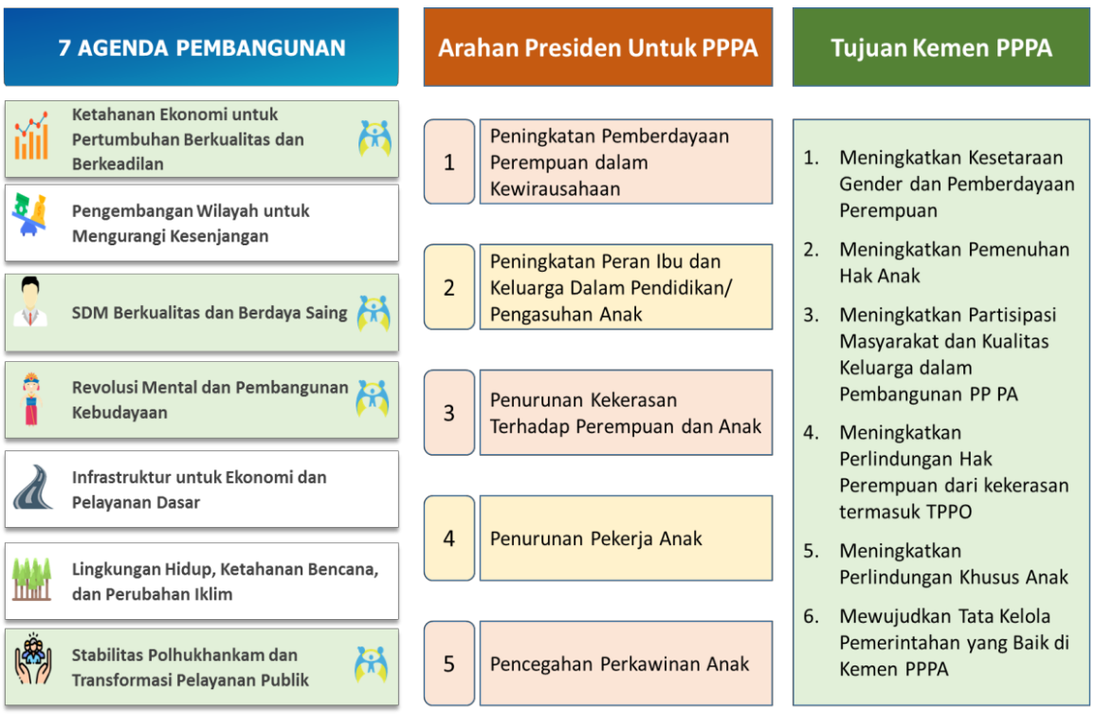
Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing’, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan Perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan Anak;
3. penurunan ke kerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.



Gambar 3.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Indeks Pembagunan Gender (IPG)
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.	TPAK Perempuan
4.	Indeks PUG Nasional
5.	Indek Perlindungan Anak (IPA)
6.	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8.	Prosentasi balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9.	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10.	Indeks Kualitas Keluarga
11.	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperenhensip (SPHPN dan Simponi)
12.	Persentasi pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13.	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR 2018)
14.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komperensif (SNPHAR dan Simponi)
15.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16.	Indek Reformasi Birokrasi
17.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18.	Tingkat Maturitas SPIP
19.	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

A. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu 2. Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

B. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

D. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

E. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

F. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- Indeks Reformasi Birokrasi;
- Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- Tingkat Maturitas SPIP; dan
- Nilai SAKIP.

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Penyederhanaan Regulasi 4. Penyederhanaan Birokrasi, dan 5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalamhal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung

pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan BerdayaSaing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaransebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.

3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;

1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, denganfokus strategi untuk:

a. peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
b. perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintahdaerah;
c. peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
d. peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
e. penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi;dan
f. penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksisecara komprehensif.

b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan: PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remajadalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalampembentukan karakter.
3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

c. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
    1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
    2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
    3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluargabagi remaja.
    4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
    5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
    6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
    7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
d. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan(GDPK).
2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
   1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
   2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
   3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
   4) Peningkatan KB Pria.
   5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) danpeningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
   6) Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB.
f. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
   1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
   2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
g. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
   1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
   2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuatpengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi ProgramBangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program BanggaKencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta PenguatanKerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui
strategi:
   a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB,
   b. serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
   c. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
   d. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
   e. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
   f. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tanggaan yang berkualitas.

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
   a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;
   b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
   c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
   d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikanperkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baikoleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan)mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/KegiatanBangga Kencana yang inklusif gender.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Peremuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.2

Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Nasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
2.	Perlindungan Perempuan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional - Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi danlintas Daerah Kabupaten / kota - Penyediaan layanan rujukanl lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		perlindungan perempuan	- Penguatan dan pengembanganlembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
3.	Kualitas Keluarga	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anakyang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Sistem Data Gender dan Anak	- Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		kelembagaan data di tingkat nasional		
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

Tabel 3.3
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian Penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran	- Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam - pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	- Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pelaksanaan danpeningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	- Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	------	------

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2025 PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfataan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025 – 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Visi

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APPKB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempun
Tujuan 3	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
Tujuan 4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak
Tujuan5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan 6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan 1 *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah "*Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender"* yang ditandai dengan:

a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
c. Persentase perempuan di lembaga legislatif
d. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Tujuan 2 *Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempun*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah "*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO"* yang ditandai dengan:

a. Rasio kekerasan terhadap perempuan da TPPO

"Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO" yang ditandai dengan:

a. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Tujuan 3 *Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak*

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

"*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak"*

yang ditandai dengan:

a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
b. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
b. Rasio anak korban kekerasan

"Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak"

yang ditandai dengan:

a. Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Tujuan 4 *Meningkatkan kualitas data gender dan anak*

Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:

"Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak"

yang ditandai dengan:

a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Tujuan 5 *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

"Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran"

yang ditandai dengan:

a. Hasil Penilaian SAKIP

Tujuan 6 *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan

:

"Menurunnya angka kelahiran,Ketahanan Keluarga dan Stunting "

yang ditandai dengan:

a. Angka Kelahiran Total/ *Total Fertality Rate (TFR)*

b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ moderm Contraceptive (mPCR)

c. Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

d. Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR)

e. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2025 disusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Nomenkalur Permendagri 90 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,**

   Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

   Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Sun Kegiatan :

   a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

   Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan :

   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Pengadaan Mebel
c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
c) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

b) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

b) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring antar Lembaga

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Kegiatan :

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

a) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
b) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
c) Advokasi dan Sosialisasi GDPK

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan : Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

a) Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan :

a) Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

b) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

c) Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja d) Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2024 memuat indikator kinerja *outcome/output* masing-masing Program/kegiatan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat diihat dalam **tabel 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	**2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			***16.728.239.977,35***	***14.221.608.490,17***
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)**	**100**	**14.130.252.102,35**	**11.393.260.654,16**
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	**228.501.248,67**	**291.871.531,66**
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	1	22.153.700,00	22.153.700,00
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1	20.000.000,00	20.000.000,00
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	1	21.135.246,67	21.135.246,67
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	1	165.212.302,00	228.582.584,99
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	**9.450.363.034,00**	**8.418.690.394,55**
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	9.409.336.769,00	8.377.664.129,55

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1	5.161.500,00	5.161.500,00
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD	1	35.864.765,00	35.864.765,00
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	**23.488.400,00**	**43.488.400,00**
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	23.488.400,00	43.488.400,00
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	**36.000.000,00**	**15.000.000,00**
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan	12	36.000.000,00	15.000.000,00
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	**1.069.082.911,68**	**866.413.555,95**
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	22.295.000,00	37.818.000,00
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	355.167.000,00	156.221.827,00
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12	52.600.000,00	62.835.500,00
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan	12	28.636.894,20	72.789.818,00
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	515.359.417,48	397.923.810,95
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan	12	95.024.600,00	138.824.600,00
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)	100	**1.038.415.000,00**	**23.800.000,00**
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset SKPD (Tahun)	1	871.015.000,00	23.800.000,00
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Tahun)	1	167.400.000,00	-
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	**1.876.627.608,00**	**1.314.763.290,00**
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan	12	11.248.700,00	11.248.700,00
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan	12	246.367.908,00	192.214.985,00
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan	12	1.619.011.000,00	1.111.299.605,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	**407.773.900,00**	**419.233.482,00**
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan	12	142.296.400,00	161.346.400,00
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan	12	50.735.200,00	50.735.200,00
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	214.742.300,00	207.151.882,00
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Jumlah *Focal Point* PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah**	**40**	**949.722.360,02**	**1.482.618.739,02**
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	**120.374.002,02**	**144.090.381,02**
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen ARG SKPD	30	48.356.000,00	38.145.621,00
	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota	10	38.495.000,00	88.495.000,00
	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Rakor	1	33.523.002,02	17.449.760,02
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	**812.254.998,00**	**1.324.234.998,00**
	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5	711.514.000,00	1.258.014.000,00
	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Promosi	3	100.740.998,00	66.220.998,00

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	**17.093.360,00**	**14.293.360,00**
	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih	35	17.093.360,00	14.293.360,00
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan**	**92,5**	**455.591.583,00**	**423.026.583,00**
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	**96.237.533,00**	**54.813.533,00**
	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang SDM nya terlatih dalam Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dan TPPO	11	19.316.038,00	8.994.038,00
	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	11	76.921.495,00	45.819.495,00
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	**226.641.000,00**	**247.668.000,00**
	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang dan jasa penunjang pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada UPT PPA	12	86.000.000,00	86.000.000,00
	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan	1	140.641.000,00	161.668.000,00
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan	1	**132.713.050,00**	**120.545.050,00**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
		Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			
	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang terlatih sebagai Tenaga Pendamping Korban Kekerasan dan pendataan kasus melalui aplikasi simfoni	60	113.197.000,00	101.029.000,00
	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan	2	19.516.050,00	19.516.050,00
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan**	**50**	**5.634.940,00**	**183.543.129,00**
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	1	**5.634.940,00**	**87.396.439,50**
	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	13	5.634.940,00	87.396.439,50
	2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	**105.325.611,00**	**96.146.689,50**
	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota	1	105.325.611,00	96.146.689,50
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**14**	**31.956.518,00**	**254.255.425,00**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**1**	**73.369.093,00**	**254.255.425,00**
	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen laporan hasil publikasi data gender dan anak dan laporan Pengembangan Layanan Keterbukaan informasi Publik.	2	288.313.810,00	85.325.212,50
	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen profil data terpliah gender tingkat provinsi	1	103.527.361,00	168.930.212,50
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**12**	**288.313.810,00**	**158.603.428,00**
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	85,71	103.527.361,00	85.937.361,00
	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	1	25.742.995,00	25.742.995,00
	2.08.06.1.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1	77.784.366,00	60.194.366,00
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**1**	**184.786.449,00**	**72.666.067,00**
	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)	1	140.693.240,00	68.818.858,00
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen hasil Rakornas FAN	1	44.093.209,00	3.847.209,00
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)**	**65**	**793.399.570,98**	**697.574.570,99**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak**	**1**	**314.766.070,98**	**255.084.070,99**
	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Proviinsi	1	112.126.000,00	112.126.000,00
	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	202.640.070,98	142.958.070,99
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	**1**	**478.633.500,00**	**442.490.500,00**
	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30	121.638.500,00	73.038.500,00
	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30	356.995.000,00	369.452.000,00
2	**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		-	***535.049.574,00***	***252.711.112,00***
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)**	**1,96**	**34.807.869,00**	**9.002.869,00**
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**1**	**34.807.869,00**	**9.002.869,00**
	2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1	34.807.869,00	9.002.869,00
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)**	**5,01**	**218.813.277,00**	**208.474.335,00**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM	Target Capaian	PAGU RKPD TAHUN 2025	PAGU RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**1**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi kerja sama dengan stakeholde rs dan mitra kerja dalam pelaksana an advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	2	200.000.000,00	200.000.000,00
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1**	**18.813.277,00**	**8.474.335,00**
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	**30**	18.813.277,00	8.474.335,00
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	**64,55**	**281.428.428,00**	**35.233.908,00**
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga**	**1**	**281.428.428,00**	**35.233.908,00**
	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	3	281.428.428,00	35.233.908,00
GRAND TOTAL				**17.263.289.551,35**	**14.474.319.602,17**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (Trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perangkat Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi Keluaran berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat.

Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas akhir yang paling mendasar dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (impact) dari capaian layanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder, mengingat jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dan

lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

RANWAL RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

(RENJA TAHUN 2026)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

jdih.kalteng.go.id

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

jdih.kalteng.go.id

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

jdih.kalteng.go.id

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun tentang 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

jdih.kalteng.go.id

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
(2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
(3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pendahuluan;
    b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
    c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
    d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
    e. Penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
    1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
    2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
    3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
        a. RSUD Doris Sylvanus;
        b. RSJ Kalawa Atei; dan
        c. RSUD Hanau.
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
    5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

jdih.kalteng.go.id

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

jdih.kalteng.go.id

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
    a. Biro Administrasi Pimpinan;
    b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
    c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    d. Biro Hukum;
    e. Biro Perekonomian;
    f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
    g. Biro Administrasi Pembangunan;
    h. Biro Organisasi; dan
    i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

jdih.kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik dan diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini disusun dengan memerhatikan target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD dan Rencana Strategis dalam rangka mengatasi dan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada dilingkungan internal dan ekstemal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini disusun sebagai dasar pengukuran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut guna mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas semoga kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, September 2025

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Umum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDAnatomi Fisiologi 22
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 34
2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 49
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 54
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 56
BAB III TUJAN DAN SASARAN 75
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 75
3.1.1 Kementerian PPPA 75
3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 53
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2025 PD 94
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 98
4.1 Program dan Kegiatan 98
BAB V PENUTUP 119

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Proses Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA -PD) Tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2026 sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas P3APPKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025–2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA -PD) Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun berfungsi menerjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA 2025-2029 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimatan Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkroniasai Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026.
3. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN PD) Tahun 2026 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
4. Menyediakan dokumen untuk perwujudan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) Tahun 2026 DP3APPKB Provinsi Kalimatan TengahTengah disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR

ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersdiaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2026 DP3APPKB disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimatan Tengah tahun 2024 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2026. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Tahun 2023 DP3APPKB dijabarkan pada **tabel 2.1:**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.08	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**16.986.495.773**					***16.133.777.497***	93,22	93,91
02.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.187.996.782**	**Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)**	**100**	**100**	**%**	**12.745.771.198**	92,96	**93,78**
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**378.412.500**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**%**	**407.444.224**	98,72	**99,44**
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.573.877	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	32.500.750	99,78	99,78
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.046.968	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1	1	Dokumen	31.031.410	99,95	99,95
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Laporan	31.496.800	99,94	99,94
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.275.179	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Laporan	312.415.264	98,37	99,31
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**8.144.034.135**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**7.513.913.134**	90,63	90,63

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah								
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.069.876.833	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	55	Orang/Bulan	7.439.925.554	90,54	90,54
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	9.998.800	99,99	99,99
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.157.302	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	Dokumen	63.988.780	99,74	99,74
2.08.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**31.231.906**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**36.185.800**	99,87	99,87
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.231.906	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	12	Dokumen	36.185.800	99,87	**99,87**
2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**70.873.906**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**136.223.565**	84,52	96,93
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.873.906	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	30	Orang	136.223.565	84,52	96,93
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.145.329.323**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**2.509.446.919**	99,13	99,76
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	Paket	23.898.200	99,84	99,84
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	900.574.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	Paket	917.469.500	99,09	99,63

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor								
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.008.485	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	Paket	58.008.300	100,00	100
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	Dokumen	1.590.000	99,38	99,38
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.133.129	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan	90.044.600	99,90	99,9
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.942.077	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan	1.269.306.419	99,80	99,8
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	180.134.100	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	**12**	**Dokumen**	**149.129.900**	**93,13**	**100**
2.08.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**284.182.506**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**%**	**282.170.609**	99,29	100
2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.855.456	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	54.160.000	98,73	100
2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.327.050	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	228.010.609	99,43	100
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.702.967.242**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**%**	**1.373.536.073**	91,35	96

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.703.452	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan	13.697.000	99,95	99,95
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.577.648	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan	203.482.961	66,81	83,22
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.369.686.142	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan	1.156.356.112	97,55	99,24
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**430.965.264**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**%**	**486.850.874**	99,16	99,67
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.004.900	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	Unit	136.380.557	98,82	98,82
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.645.953	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	Unit	67.636.847	99,99	99,99
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	265.314.411	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	282.833.470	99,13	100
02.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.124.855.574**	**Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah**	**35**	**35**	**Orang**	**831.081.860**	83,96	83,96

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**199.043.476**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**1**	**1**	**Dokumen**	**195.954.998**	98,45	98,45
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	25	25	Kebijakan	71.904.400	96,80	96,8
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	9	9	Laporan	71.901.150	99,88	99,88
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	52.778.439	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1	1	Dokumen	52.149.448	98,81	98,81
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**888.786.298**	**Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**1**	**1**	**Dokumen**	**598.947.312**	79,46	79,46
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	781.071.310	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang Keluaran politik, hukum, sosial dan ekonomi	5	30	Orang	394.411.170	72,23	72,23
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	107.714.988	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg	3	3	Lembaga	204.536.142	98,47	98,47

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi						
2.08.02.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**37.025.800**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**1**	**1**	**Dokumen**	**36.179.550**	97,71	**97,71**
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/ Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30	30	Orang	36.179.550	97,71	**97,71**
02.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**552.052.238**	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan**	**90**	**90**	**%**	**519.785.357**	98,81	99,66
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**172.690.311**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak**	**1**	**1**	**Dokumen**	**168.757.322**	97,72	99,79
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi	50.362.102	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program	9	9	Dokumen	50.331.800	99,94	99,94

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122.328.209	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	9	9	Perangkat Daerah	118.425.522	96,81	99,73
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**230.059.781**	**Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan**	**1**	**1**	**Dokumen**	**228.723.435**	99,42	99,42
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50	50	Orang	135.813.304	99,06	99,07
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	92.961.102	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	85	85	Layanan	92.910.131	99,95	99,95

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi								
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**149.302.146**	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	1	Dokumen	**122.304.600**	99,19	99,9
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	25	Orang	102.198.900	99,88	99,88
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	46.985.000	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100	100	Orang	20.105.700	95,81	**100**
02.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**258.520.478**	**Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan**	**45**	**45**	**Orang**	**240.632.500**	96,43	**96,43**
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	**73.796.000**	**Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak**	**12**	**12**	**Kab/Kota**	**71.364.700**	96,71	**96,71**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kewenangan Provinsi								
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	71.364.700	96,71	96,71
2.08.04.1.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**184.724.478**	**Dokumen hasil pelaksanaan pelayanan baginkeluarga dalam mewujudkan KG lintas prov dan kab/kota**	**1**	**1**	**Dokumen**	**169.267.800**	96,31	**96,31**
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	184.724.478	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Layanan	169.267.800	96,31	96,31
02.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**217.530.460**	**Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**13**	**13**	**Dokumen**	**199.676.790**	97,39	**97,39**
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis**	**217.530.460**	**Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data**	**1**	**1**	**Dokumen**	**199.676.790**	97,39	**97,39**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		**Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**						
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66.673.010	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	1	Dokumen	53.417.190	98,60	98,6
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1	1	Dokumen	146.259.600	96,95	96,95
02.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**637.058.913**	**Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**10**	**14**	**Kab/Kota**	**635.137.435**	99,70	**99,7**
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**282.855.606**	**Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**71**	**50**	**%**	**281.356.428**	99,47	**99,47**
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74.409.706	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	23.939.700	98,07	98,07
2.08.06.1.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	208.445.900	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	25	25	Perangkat Daerah	257.416.728	99,60	99,6

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**354.203.307**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**1**	**1**	**Dokumen**	**353.781.007**	99,88	**99,88**
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30	30	orang	104.140.072	99,94	99,94
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	250.000.000	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	Kegiatan	249.640.935	99,86	99,86
02.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**1.008.481.328**	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)**	**60**	**60**	**%**	**961.692.357**	97,31	**97,4**
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**514.985.634**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak**	**1**	**1**	**Dokumen**	**471.098.157**	95,22	**95,22**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen	91.644.600	95,34	95,34
2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	418.858.893	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	14	Kegiatan	379.453.557	95,19	**95,19**
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**493.495.694**	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	**1**	**1**	**Dokumen**	**490.594.200**	99,41	99,58
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	121.578.742	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30	30	Orang	121.522.100	99,95	99,95
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371.916.952	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30	30	Orang	369.072.100	99,24	99,46

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	***998.065.209***					***828.123.264***	97,65	97,65
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**151.984.773**	**Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)**	2	2,28	Indeks	**143.446.176**	94,38	94,38
2.14.02.1.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**151.984.773**	**Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**1**	**1**	**Dokumen**	**143.446.176**	94,38	**94,38**
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	151.984.773	Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	1	Dokumen	143.446.176	94,38	94,38
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	-	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	-	Dokumen	-	-	-
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**64.222.990**	**Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)**	5	5	%	**36.238.120**	99,72	99,72
2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan**	**27.883.045**	**Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB**	**1**	**-**	**Dokumen**	**-**	**-**	**-**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		**sesuai kearifan budaya lokal**						
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	27.883.045	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1	-	Dokumen	-	-	-
2.14.03.1.02	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**36.339.945**	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1**	**1**	**Dokumen**	**36.238.120**	99,72	99,72
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam	36.339.945	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan	30	30	Organisasi	36.238.120	99,72	99,72

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target		Realisasi s/d 31 Desember 2024				
			Output/Outcomes	Volume	Volume Output/ outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Bangga Kencana		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**781.857.446**	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	**65**	**62,70**	%	**648.438.968**	98,29	98,29
2.14.04.1.01	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**781.857.446**	**Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga**	**1**	**1**	**Dokumen**	**648.438.968**	98,29	98,29
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	781.857.446	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	1	Dokumen	648.438.968	98,29	98,29
	PAGU TOTAL*	**17.984.560.982**					**16.961.900.761**	**93,43**	**94,08**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG)
   a) Kebijakan berupa Peraturan Daerah
   b) Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender.
   c) Ketersediaan data gender dan anak.
   d) Kemitraan dan jaringan antara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
   e) Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak

a) Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak KorbaKekerasan. Peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b) Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran serta dunia usaha secara terus menerus dan berkelanjutan.

c) Data terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak berupa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan yang selanjutnya diformulasikan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilaporkan setiap tahunnya.

d) Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya diantaranya adalah UPT PPA, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal.

e) Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak

3. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran. Adapun kegiatan tersebut yaitu Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB Nasional. Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB Nasional ditujukan untuk meningkatkan KIE Program KB.

b) Kegiatan meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.

c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah dilaksanakan adalah kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;

8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;

11. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. penyerasian kebijakan kependudukan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 2.1.:

Tabel 2.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Pembangunan	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
			Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender.
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
2	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaa n perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
3	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender *machinery* di daerah belum optimal
4	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Data terpilah gender yang belum *valid* dan *update*.	Kurang nya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan mengenai data terpilah Gender dan Anak	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor
6	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota
	Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk kesejahteraan Perepuan dan Anak (PUSPA)	
7	Belum terwujudnya Kalimantan Tengah Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/ kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan I Hak Anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
8	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
			Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

9	Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan pelayanan UPT PPA	Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan layanan UPT serta belum memadai sarana pendukung seperti gedung perkantoran, etalase pelayanan dan belum tersedia rumah aman.	Minimnya dukungan UPT PPA sebagai UPT yang menerima berbagai kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif , mengingat fungsinya sebagai rujukan lanjutan.
10	Tingginya Angka kelahiran total		Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Menurunnya rasio	Belum optimalnya penggerakan KB
		pemakaian	bersama mitra kerja dan
		kontrasepsi.	pengembangan KIE
			Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi
11	*Stunting* pada anak	Masih tingginya	Masih minimnya pemahaman
		prevalensi *stunting*	keluarga tentang *stunting*
			Praktek pengasuhan yang kurang baik
12	Pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya	Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga
		pendewasaan usia	
		pernikahan	
			Kurangnya pemahaman remaja
			tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini
			Belum optimalnya peran serta
			organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2025 -2029 adalah :

VISI :

"Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045".

MISI :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
2. Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan yang inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat
3. Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas da mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat sebagai keadilan sosial
5. Pemberdayaan keadilan local dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:

a. **Misi Kedua** : "**Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat"**
b. **Misi Keempat : "Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial"**.
c. **Misi Kelima :" Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta**

kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
f) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal Falsafah Huma betang (Rumah Besar) Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:
b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman Pancasilais dan cinta damai
c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

1) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;

2) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI
"Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045"
Misi 2 **Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat** **Misi 4** **Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social** **Misi 5** **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045**

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan permasalahan lintas sector (*crosscutting issues*) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan askes partispasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan *Focal Point* Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Kalimantan Tengah Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Kesempatan dan peluang untuk Perempuan masih tinggi dengan didukungnya Perda PUG No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif

VISI

"Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi 2

Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat

Misi 4

Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social

Misi 5

Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDERONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
3	Banyaknya pelaku Ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cederung rendah	Masih adanya diskriminasi dalam Memperoleh akses Terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempua	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		
4	Data terpilah gender yang belum *valid* dan *update*	Kurang nya SDM yang memahami utk pengu pulan data/penginputandata	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/kota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA 1. Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT 4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Rendahnya Penididikan dan Kualitas hidup Masyaraka t 2. Masih adanya pemaham an masyaraka t bahwa kekerasan merupaka n aib keluarga sehingga mereka enggan melaporka n kasus nya.	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	1. Implement asi Peraturan Perundang - undangan belum optimal 2. Belum terbentukn ya kelompok masyaraka t untuk peduli dan membantu penangan an kasus kekerasan 3. Adanya kemajuan tehnologi, menyebab	

VISI **“Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”**					
Misi 2 **Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat** **Misi 4** **Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social** **Misi 5** **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045**					
NO.	**PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB**	**FAKTOR INTERNAL**		**FAKTOR EKSTERNAL**	
		PENGHAMBAT	**PENDORONG**	**PENGHAMBAT**	**PENDORONG**
		3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak		kan anak – anak dengan mudanya mengakses *social media*, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	menangani perlindungan perempuan dan anak
7	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Terbatasnya kouta penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang yang dibutuhkan UPT PPA	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	Sudah terbentuknya UPT Provinsi dan beberapa UPT kabupaten yang memacu pemenuhan kebutuhan SDM seuai kualifikasi

VISI "Mengangkat Harkat dan Martabat khusunya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045"					
Misi 2 Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat Misi 4 Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan social Misi 5 Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045					
NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Tingkat kesadaran usia untuk berkeluarga yang masih rendah akibat dari rendahnya ekonomi keluarga	Sebagai *leading sector* terkait anak akan memudahkan koordinasi dengan lintas sektor dan SKPD terkait	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
2	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Budaya dan agama terentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel
2.3.

Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	 74,60% 3,16%
2.	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	100%
3.	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan terhadap anak - Indeks Perlindungan Anak (IPA) - Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	 60,37% 100%
4.	Meningkatkan kualitas keluarga - Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) - Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) - Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	 62,70 2,28 36
5.	Meningkatnya akseptor KB - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR) - Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	 73,02 6,82
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

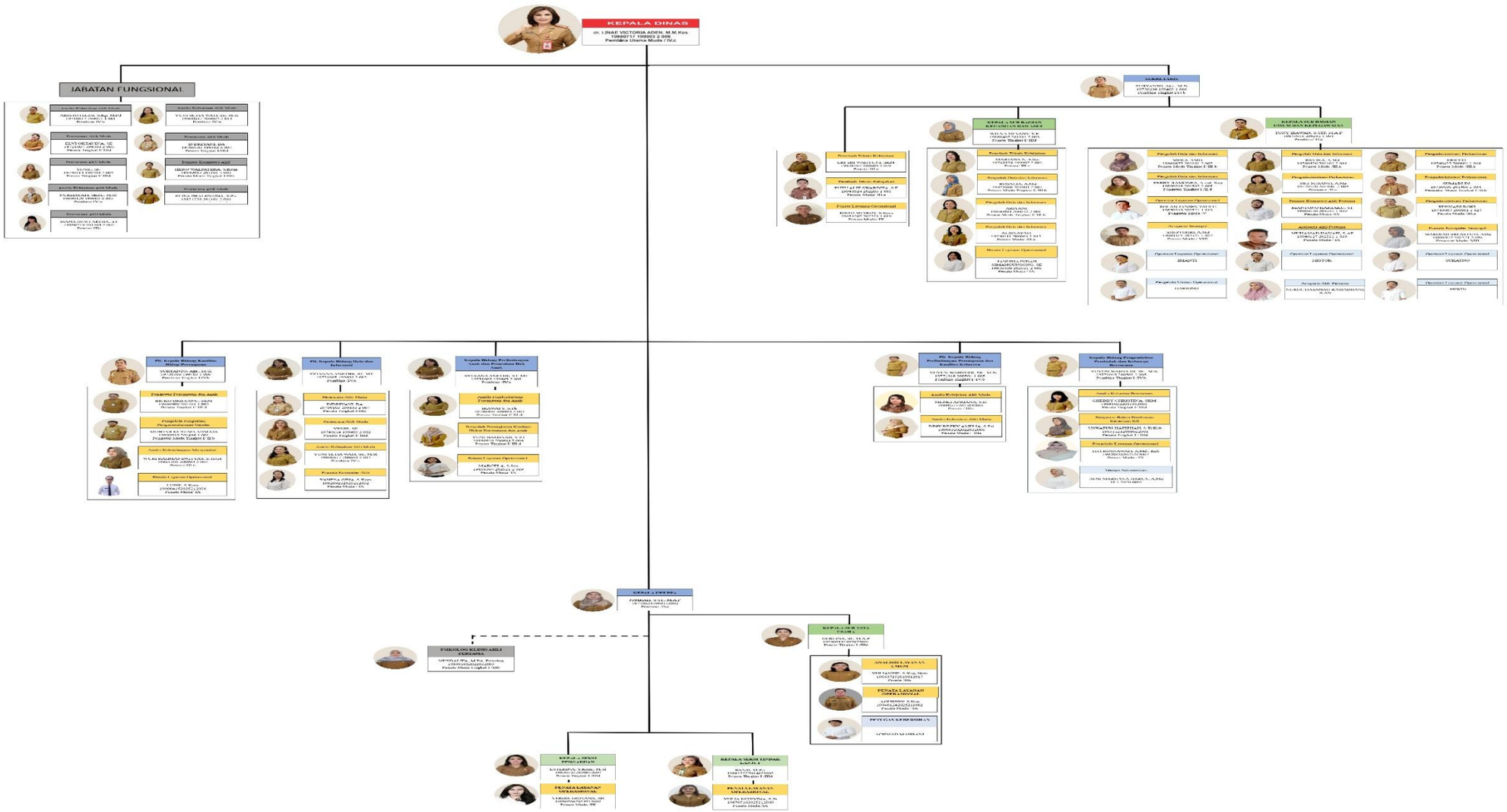
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/40/2025 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka tugas pokok Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Melaksanakan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
5) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
6) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
7) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
9) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Dinas; dan
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Adapun gambaran skema struktur organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut pada Gambar 2.1


KEPALA DINAS
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
19692717 199903 2 006
Pembina Utama Muda / IV.c
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, ASET
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
Pl. Kepala Bidang Kualitas Pelayan Reproduksi
Pl. Kepala Bidang Data dan Informasi
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Ketahanan Keluarga
Pl. Kepala Bidang Pembinaan Penyuluhan dan Kualitas Keluarga
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KEPALA UPTD PPA
PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
PETUGAS KEPERSIDAN

Secara umum Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu:

a). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

b). Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan 2 urusan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dengan 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Susunan organisasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Berencana, terdiri atas:

Berikut akan dipaparkan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dan kelompok jabatan fungsional dalam Struktur Organisasi Dinas P3 Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

1) Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender;
2) Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3) Menetapkan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
4) Menetapkan program data dan informasi gender dan anak;
5) Menetapkan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
6) Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
7) Menetapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
8) Menguatkan pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas;
9) Menguatkan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
10) Menetapkan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
11) Melaksanakan keserasian kebijakan kependudukan;
12) Melaksanakan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) Menghimpun bahan/data perencanaan dan penyusunan program serta anggaran Dinas;
2) Melaksanakan perumusan administrasi kepegawaian;
3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
4) Melaksanakan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
5) Melaksanakan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
6) Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
    a) **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, yang mempunyai tugas: pengelolaan keuangan dan aset.
    b) **Sub Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas: mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

1) Merumuskan kajian dan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan

pendidikan;

2) Melaksanakan fasilitasi pembentukan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
3) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
4) Melaksanakan pengordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
5) Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
6) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
7) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
8) Melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
9) Melaksanakan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;

10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
11) Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.

D. Bidang Data dan Informasi

Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

3) Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

5) Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

8) Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website* (e-*gov*);

9) Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan parstisipasi masyarakat;

E. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

1. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
5) Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
7) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
8) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum

koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembanagn lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
4) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
5) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
6) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
8) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
7) Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
8) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
9) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
10) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, penggerakan dan informasi;
11) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk;

H. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) mempunyai tugas operasional teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :

1) Memberikan layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
2) Memberikan layanan penadampingan hukum;
3) Memberikan layanan penadampingan psikologis;
4) Memberikan layanan penadampingan bimbingan rohani;
5) Memberikan perlindungan khusus;

6) Memberikan layanan penjangkauan korban;
7) Melaksanakan pengelolaan kasus;
8) Memberikan layanan penampungan sementara;
9) Memberikan layanan mediasi terkait kasus anak;
10) Memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
11) Memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;

Susunan organisasi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA), terdiri atas :

1. **Seksi Bagian Tata Usaha**, yang mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub bagian Atata Usaha yang meliputi penyususnan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaaan naskah dinas.
2. **Seksi Pengaduan**, yang mempunyai tugas : melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung, dan melindungi korban di penampungan sementara.
3. **Seksi Tindak Lanjut**, yang mempunyai tugas : melaksanakan mediasi, emlakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya dan penadampingan korban dalam upaya pemulihan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

1. Pranata Komputer Ahli Pratama
2. Perencana Ahli Pertama
3. Perencana Ahli Muda
4. Analis Kebijakan Ahli Muda

2) Jabatan Fungsional Umum

Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum juga ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

A. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
- Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan, anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor mupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
- Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan kadilam dan hak asasi serta kelmbagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan,sosiaisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang PUG, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

B. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- Tingkat pemahaman aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlalu;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana.
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan perlu peningkatan
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparatur negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

<u>Tantangan</u>

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indek Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.

- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG
- Meningkatnya kasus kekekrasan pada Anak dan Perempuan
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

Peluang

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja

- Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Kemajuan teknologi informasi
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanaan keluarga
- Kemudahan informasi tentang KB
- Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

Kekuatan

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Terbentuknya jejaring kelembagaan
- Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait
- Dukungan lintas Sektor yang terkait dalam perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah
- Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Kelemahan

- Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
- *Reward* and *Punishment* belum berjalan optimal
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
- Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Anggaran masih terbatas
- Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

E. Isu-isu strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
   a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
   b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
   c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

2. Perlindungan Anak :
   a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
   b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
   c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
   d. Perkawinan Usia Anak tertinggi no 2 di Indonesia

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan Tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalah kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi penlindung anak-anak untuk berkembang

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan priorotas

daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian, pennyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahn dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2025-2029. Disatu sisi, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025 ini memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maka DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan akhir RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan akhir RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan akhir RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Akhir RKPD**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2026 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2026

Provinsi Kalimantan Tengah

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	**2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		-	**21.329.909.105,10**	-	-
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)**	**100%**	**16.677.131.562,10**		
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**539.205.000,00**		
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	146.037.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	42.015.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	323.153.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**9.509.381.769,00**		
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan Orang/ Bulan	9.409.336.769,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.838.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	89.207.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)**	**100**	**42.459.000,00**		
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.459.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100**	**267.778.000,00**		
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	267.778.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**3.686.896.457,10**		
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	711.462.457,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73.640.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	65.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.656.760.000,10	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	133.034.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)**	**100**	**779.782.336,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	14 Unit	529.782.336,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**1.227.415.000,00**		
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	866.615.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)**	**100**	**624.214.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	199.214.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Jumlah *Focal Point* PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah**	**40**	**1.752.700.000,00**		
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**1**	**280.500.000,00**		
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 Kebijakan	66.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	1 Laporan	53.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang	103.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	50 Lembaga	57.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**1**	**1.393.700.000,00**		
	2.08.02.1.02.0005 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	9 Lembaga	38.700.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	1.280.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**1**	**78.500.000,00**		
	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	78.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan**	**92,5**	**1.563.940.000,00**		
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak**	**1**	**520.522.000,00**		
	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	25 Orang	64.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Laporan	36.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	111.460.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	4 Kegiatan	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan**	**1**	**430.800.000,00**		
	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	17.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	180.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	47.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**1**	**612.618.000,00**		
	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	80 Orang	167.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	10 Dokumen	156.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	37.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0008 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan**	**50**	**257.059.094,00**		
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)**	**1**	**257.059.094,00**		
	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	50 Lembaga	109.514.504,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**14**	**189.278.449,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**1**	**189.278.449,00**		
	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	72.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	116.733.859,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**12**	**390.000.000,00**		
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**85,71**	**222.000.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50 Lembaga	150.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Laporan	72.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**1**	**168.000.000,00**		
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dakumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	168.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)**	**65**	**499.800.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak**	**1**	**244.000.000,00**		
	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	74.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Laporan	170.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	**1**	**255.800.000,00**		
	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	105.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	108.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	16.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
2	**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		-	**1.771.500.000,00**	-	-
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)**	**1,96**	**229.000.000,00**		
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**1**	**229.000.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	27.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	115.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	55.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)**	**5,01**	**631.500.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**1**	**351.500.000,00**		
	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	27.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	1 Daerah	110.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	157.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	57.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1**	**280.000.000,00**		
	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 Organisasi	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30 Organisasi	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	**64,55**	**911.000.000,00**		
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga**	**1**	**552.000.000,00**		
	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	700 Keluarga	200.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Dokumen hasil pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1**	**359.000.000,00**		
	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	14 Kabupaten/Kota	295.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
GRAND TOTAL				**23.101.409.105**		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kemeneterian PPPA

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019–2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024.RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun

2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

4. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
5. peningkatan perlindungan anak; dan
6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

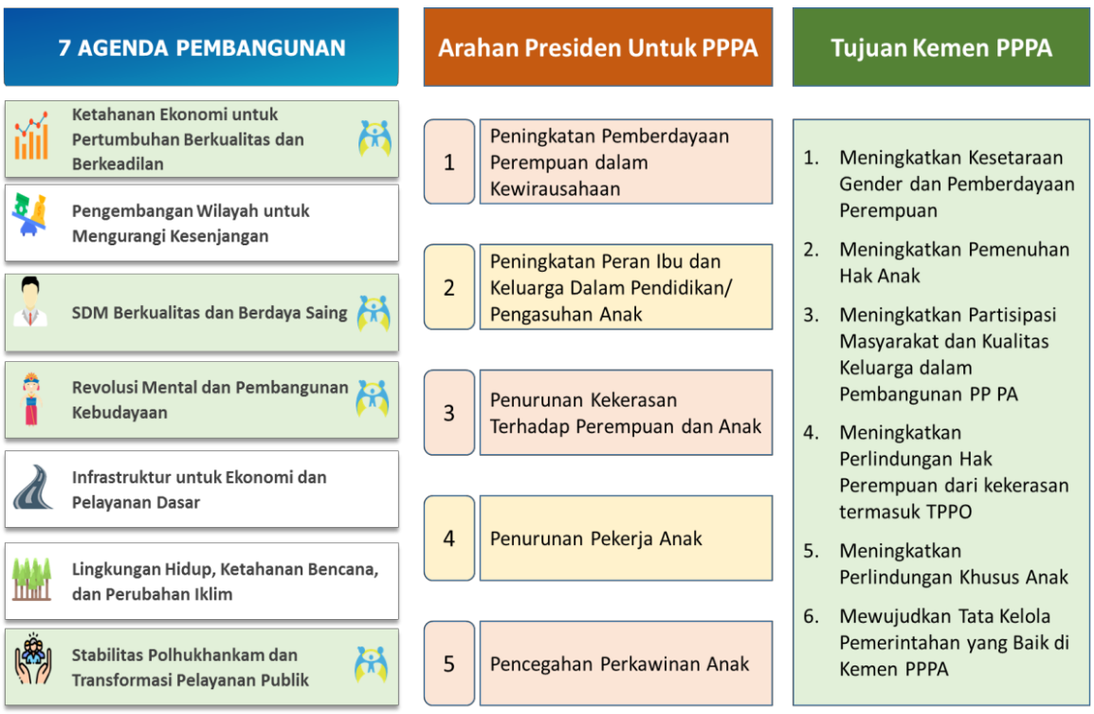
Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing’, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan Perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
2. Indeks Pemberdayaan Gender IDG)

3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan Anak;
3. penurunan ke kerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.



Gambar 3.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Indeks Pembagunan Gender (IPG)
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.	TPAK Perempuan
4.	Indeks PUG Nasional
5.	Indek Perlindungan Anak (IPA)
6.	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8.	Prosentasi balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9.	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10.	Indeks Kualitas Keluarga
11.	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperenhensip (SPHPN dan Simponi)
12.	Persentasi pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13.	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR 2018)
14.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komperensif (SNPHAR dan Simponi)
15.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16.	Indek Reformasi Birokrasi
17.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18.	Tingkat Maturitas SPIP
19.	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan

keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

A. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu 2. Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

B. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

C. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

D. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

E. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

F. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- Indeks Reformasi Birokrasi;
- Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- Tingkat Maturitas SPIP; dan
- Nilai SAKIP.

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Penyederhanaan Regulasi 4. Penyederhanaan Birokrasi, dan 5. Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalamhal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung

pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan BerdayaSaing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaransebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.

3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;

1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, denganfokus strategi untuk:

a. peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
b. perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintahdaerah;
c. peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender;
d. peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
e. penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi;dan
f. penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksisecara komprehensif.

b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan: PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remajadalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalampembentukan karakter.
3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

c. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
    1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
    2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
    3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluargabagi remaja.
    4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
    5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
    6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
    7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
d. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan(GDPK).
2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
   1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
   2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
   3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
   4) Peningkatan KB Pria.
   5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) danpeningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
   6) Peningkatan kemandirian PUS dalamber-KB.
f. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
   1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
   2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
g. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
   1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
   2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi ProgramBangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program BanggaKencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil

Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta PenguatanKerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB,
b. serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
c. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
d. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
e. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
f. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tanggaan yang berkualitas.

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:

a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;
b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikanperkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baikoleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan)mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/KegiatanBangga Kencana yang inklusif gender.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Peremuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut

Tabel 3.2

Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Nasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
2.	Perlindungan Perempuan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional - Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi danlintas Daerah Kabupaten / kota - Penyediaan layanan rujukanl lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota	- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		perlindungan perempuan	- Penguatan dan pengembanganlembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi	- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
3.	Kualitas Keluarga	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota	- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anakyang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Sistem Data Gender dan Anak	- Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi	- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		kelembagaan data di tingkat nasional		
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

Tabel 3.3
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian Penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran	- Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam - pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	- Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pelaksanaan danpeningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	- Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	------	------

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2025 PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfataan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025 – 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Visi

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APPKB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimatan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1	Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempun
Tujuan 3	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
Tujuan 4	Meningkatkan kualitas data gender dan anak
Tujuan5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan 6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan 1 *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah "*Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender"* yang ditandai dengan:

a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
c. Persentase perempuan di lembaga legislatif
d. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Tujuan 2 *Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempun*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah "*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO"* yang ditandai dengan:

a. Rasio kekerasan terhadap perempuan da TPPO

"Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO" yang ditandai dengan:

a. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Tujuan 3 *Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak*

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

"*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak"*

yang ditandai dengan:

a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
b. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
b. Rasio anak korban kekerasan

"Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak"

yang ditandai dengan:

a. Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Tujuan 4 *Meningkatkan kualitas data gender dan anak*

Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:

"Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak"

yang ditandai dengan:

a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Tujuan 5 *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

"Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran"

yang ditandai dengan:

a. Hasil Penilaian SAKIP

Tujuan 6 *Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan

:

"Menurunnya angka kelahiran,Ketahanan Keluarga dan Stunting "

yang ditandai dengan:

a. Angka Kelahiran Total/ *Total Fertality Rate (TFR)*

b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ moderm Contraceptive (mPCR)

c. Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

d. Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR)

e. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2025 disusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Nomenkalur Permendagri 90 Tahun 2019 dengan secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2024 memuat indikator kinerja *outcome/output* masing-masing Program/kegiatan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat diihat dalam **table 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2026

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	**2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		-	**21.329.909.105,10**	-	-
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)**	**100%**	**16.677.131.562,10**		
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**539.205.000,00**		
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	146.037.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	42.015.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	323.153.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**9.509.381.769,00**		
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan Orang/ Bulan	9.409.336.769,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.838.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	89.207.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)**	**100**	**42.459.000,00**		
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.459.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100**	**267.778.000,00**		
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	267.778.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**3.686.896.457,10**		
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	711.462.457,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73.640.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	65.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.656.760.000,10	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	133.034.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (%)**	**100**	**779.782.336,00**		
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	14 Unit	529.782.336,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**1.227.415.000,00**		
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	866.615.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)**	**100**	**624.214.000,00**		
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	199.214.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Jumlah *Focal Point* PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah**	**40**	**1.752.700.000,00**		
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**1**	**280.500.000,00**		
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 Kebijakan	66.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	1 Laporan	53.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang	103.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	50 Lembaga	57.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**1**	**1.393.700.000,00**		
	2.08.02.1.02.0005 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	9 Lembaga	38.700.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	1.280.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 Orang	75.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**1**	**78.500.000,00**		
	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	78.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan**	**92,5**	**1.563.940.000,00**		
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak**	**1**	**520.522.000,00**		
	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	25 Orang	64.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Laporan	36.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	111.460.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	4 Kegiatan	154.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan**	**1**	**430.800.000,00**		
	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	17.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	180.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	47.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**1**	**612.618.000,00**		
	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	80 Orang	167.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	10 Dokumen	156.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	37.450.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0008 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	10 Lembaga	126.056.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan**	**50**	**257.059.094,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	**Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)**	**1**	**257.059.094,00**		
	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	50 Lembaga	109.514.504,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**14**	**189.278.449,00**		
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**1**	**189.278.449,00**		
	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni	1 Dokumen	72.544.590,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		PPA				
	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	116.733.859,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**12**	**390.000.000,00**		
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	**Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA**	**85,71**	**222.000.000,00**		
	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50 Lembaga	150.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Laporan	72.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**1**	**168.000.000,00**		
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah dakumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	168.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)**	**65**	**499.800.000,00**		
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak**	**1**	**244.000.000,00**		
	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	50 Lembaga	74.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Laporan	170.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	**Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	**1**	**255.800.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	105.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	108.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	16.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	8.800.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	18.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
2	**2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		-	**1.771.500.000,00**	-	-
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)**	**1,96**	**229.000.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**1**	**229.000.000,00**		
	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	27.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	115.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	55.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)**	**5,01**	**631.500.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	**1**	**351.500.000,00**		
	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	27.500.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	1 Daerah	110.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	157.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya	1 Laporan	57.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		Lokal				
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1**	**280.000.000,00**		
	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	30 Organisasi	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30 Organisasi	140.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	**64,55**	**911.000.000,00**		
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga**	**1**	**552.000.000,00**		

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	700 Keluarga	200.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	160.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Dokumen hasil pelaksanaan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1**	**359.000.000,00**		
	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	14 Kabupaten/Kota	295.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
			Tahun 2026			
			Target Capaian	Pagu RKPD 050/020/TAPD/2025 Tanggal: 26 Juni 2025	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
	2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan	32.000.000,00	PAD	DP3APPKB PROV. KALTENG
GRAND TOTAL				**23.101.409.105**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja-PD) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (Trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perangkat Perangkat Daerah (RENJA-PD) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi Keluaran berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat.

Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas akhir yang paling mendasar dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (impact) dari capaian layanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder, mengingat jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.